



# PERUBAHAN

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

## KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021

*'Menuju Dharmasraya  
Mandiri dan Berbudaya'*





# PERDA

Tentang  
**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016 – 2021**

*'Menuju Dharmasraya  
Mandiri dan Berbudaya'*





BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2)
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 Februari 2019

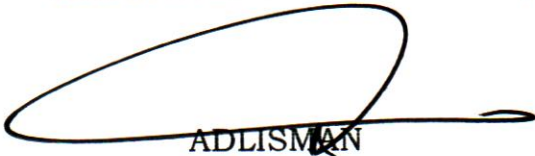
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (1/13/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan/ kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021, serta sekaligus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Perubahan RPJMD ini didasarkan pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 serta sesuai arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dimana surat edaran bersama ini meminta pemerintah daerah melalui Bupati dan DPRD untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dengan prinsip money follows program.

Selain adanya perubahan muatan/substansi, perubahan RPJMD ini juga melakukan penyesuaian terhadap tata cara perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut penjelasan yang menjadi dasar dalam perubahan RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. perlu adanya penyempurnaan muatan pada tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan sekaligus penyesuaian pada Indikator sasaran.
  - b. Perlunya peningkatan sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra PD

- c. Adanya masukan dan saran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terkait dengan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang disinkronkan dan diakomodir dalam RPJMD
2. Arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016, adapun muatan RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang akan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
  - a. penyelerasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
  - b. penyelerasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - c. penyelerasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
  - d. penyelerasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. penyelerasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
  - f. penyelerasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
3. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga terdapat perubahan dalam sistematika, jenis data, maupun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 22



# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
1.4.	Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.5.	Sistematika Penulisan .....	I-9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi .....	II-2
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-7
2.3.	Aspek Daya Saing .....	II-20
2.4.	Aspek Pelayanan Umum .....	II-21
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-3
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-3
3.1.2.	Neraca Daerah .....	III-15
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-18
3.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-19
3.2.2.	Kebijakan Belanja Daerah .....	III-21
3.2.3.	Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-22
3.3.	Perhitungan Kerangka Pendanaan (2016 s/d 2021) .....	III-25
<b>BAB IV.</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2.	Isu Strategis .....	IV-29
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b> .....	<b>V-1</b>
5.1.	Visi .....	V-1
5.2.	Misi .....	V-2
5.3.	Tujuan dan Sasaran .....	V-2
5.4.	Prioritas Pembangunan .....	V-7
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>IX-1</b>
9.1	Pedoman Transisi dan Perubahan .....	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan.....	IX.2



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-3
Tabel 2.2	Jumlah penduduk dan jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 (jiwa)	II-6
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-6
Tabel 2.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-8
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	II-9
Tabel 2.6	Perbandingan Pertumbuhan PDB/ PDRB Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 (ADHK Tahun 2010)	II-10
Tabel 2.7	Perkembangan Inflasi nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015	II-11
Tabel 2.8	PDB Perkapita Nasional, PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2016 (Rp Juta)	II-12
Tabel 2.9	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015	II-12
Tabel 2.10	Persentase penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-13
Tabel 2.11	Angka Melek huruf Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-14
Tabel 2.12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-14
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya	II-15
Tabel 2. 14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-16
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-17
Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-17
Tabel 2.17	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmnasraya Tahun 2010-2015	II-18
Tabel 2.18	Penguatan Cadangan pangan Kabupaten Dharmasraya	II-18

	Tahun 2010-2015	
Tabel 2.19	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-19
Tabel 2.20	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-19
Tabel 2.21	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-20
Tabel 2.22	Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-21
Tabel 2.23	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio murid-murid Sekolah Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-22
Tabel 2.24	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015	II-23
Tabel 2.25	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio murid-murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-24
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 s/d 2015	II-25
Tabel 2.27	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah kabupaten Dharmasraya tahun 2010 s/d 2015	II-26
Tabel 2.28	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II-27
Tabel 2.29	Jumlah Siswa Putus Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-27
Tabel 2.30	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)	II-28
Tabel 2.31	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-29
Tabel 2.32	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-30
Tabel 2.33	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-31
Tabel 2.34	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-32
Tabel 2.35	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-32
Tabel 2.36	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-33
Tabel 2.37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-33
Tabel 2.38	Jumlah Penderita HIV dan AIDS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-34

Tabel 2.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-35
Tabel 2.40	Cakupan Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-36
Tabel 2.41	Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-37
Tabel 2.42	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah Yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014	II-37
Tabel 2.43	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-38
Tabel 2.44	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-40
Tabel 2.45	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-40
Tabel 2.46	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-41
Tabel 2.47	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-42
Tabel 2.48	Indikator Bidang Pertahanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-43
Tabel 2.49	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010s/d 2015	II-44
Tabel 2.50	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-45
Tabel 2.51	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-47
Tabel 2.52	Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-48
Tabel 2.53	Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-49
Tabel 2.54	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-50
Tabel 2.55	Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II-51
Tabel 2.56	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-52
Tabel 2.57	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-52
Tabel 2.58	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-52
Tabel 2.59	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-54
Tabel 2.60	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-54
Tabel 2.61	Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-56
Tabel 2.62	Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015 (ton)	II-57
Tabel 2.63	Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-57
Tabel 2.64	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-58
Tabel 2.65	Indikator Bidang Perindustrian K Kabupaten Dharmasraya	II-58

Tabel 2.66	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-59
Tabel 2.67	Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-60
Tabel 2.68	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010 - 2015	II-62
Tabel 2.69	Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-63
Tabel 2.70	Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-64
Tabel 2.71	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/ Kota ke Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-64
Tabel 2.72	Penetapan APBD Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010 - 2015	II-65
Tabel 2.73	Persentase Pejabat yang Mengikuti PIM II, PIM III dan PIM IV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-65
Tabel 2.74	Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-66
Tabel 2.75	Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	II-67
Tabel 2.76	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-68
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-4
Tabel 3.2	Proporsi Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan (Persen)	III-10
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-13
Tabel 3.4	Persentase Proporsi Belanja Daerah berdasarkan Jenis Belanja	III-14
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-15
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015 (Rupiah)	III-16
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-21
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Dharmasraya	III-24
Tabel 3.7	Proyeksi Kerangka Pendanaan (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Rupiah)	III-26
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-4
Tabel 4.2	Persandingan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	IV-32
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016 - 2021	V-4
Tabel 6.1	Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VI-2
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VII-2

Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VIII-4

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-3
Tabel 2.2	Jumlah penduduk dan jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 (jiwa)	II-6
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-6
Tabel 2.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-8
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	II-9
Tabel 2.6	Perbandingan Pertumbuhan PDB/ PDRB Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 (ADHK Tahun 2010)	II-10
Tabel 2.7	Perkembangan Inflasi nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015	II-11
Tabel 2.8	PDB Perkapita Nasional, PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2016 (Rp Juta)	II-12
Tabel 2.9	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015	II-12
Tabel 2.10	Persentase penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-13
Tabel 2.11	Angka Melek huruf Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-14
Tabel 2.12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-14
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya	II-15
Tabel 2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-16
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-17
Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-17
Tabel 2.17	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-18
Tabel 2.18	Penguatan Cadangan pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-18
Tabel 2.19	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-19

Tabel 2.20	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-19
Tabel 2.21	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-20
Tabel 2.22	Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-21
Tabel 2.23	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio murid-murid Sekolah Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-22
Tabel 2.24	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015	II-23
Tabel 2.25	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio murid-murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-24
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 s/d 2015	II-25
Tabel 2.27	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah kabupaten Dharmasraya tahun 2010 s/d 2015	II-26
Tabel 2.28	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II-27
Tabel 2.29	Jumlah Siswa Putus Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II-27
Tabel 2.30	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)	II-28
Tabel 2.31	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-29
Tabel 2.32	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-30
Tabel 2.33	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015	II-31
Tabel 2.34	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-32
Tabel 2.35	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-32
Tabel 2.36	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-33
Tabel 2.37	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-33
Tabel 2.38	Jumlah Penderita HIV dan AIDS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-34
Tabel 2.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-35
Tabel 2.40	Cakupan Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015	II-36
Tabel 2.41	Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015	II-37

Tabel 2.42	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah Yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014	II-37
Tabel 2.43	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-38
Tabel 2.44	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-40
Tabel 2.45	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-40
Tabel 2.46	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-41
Tabel 2.47	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-42
Tabel 2.48	Indikator Bidang Pertahanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-43
Tabel 2.49	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010s/d 2015	II-44
Tabel 2.50	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-45
Tabel 2.51	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-47
Tabel 2.52	Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-48
Tabel 2.53	Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-49
Tabel 2.54	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-50
Tabel 2.55	Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II-51
Tabel 2.56	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-52
Tabel 2.57	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-52
Tabel 2.58	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-52
Tabel 2.59	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-54
Tabel 2.60	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-54
Tabel 2.61	Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-56
Tabel 2.62	Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015 (ton)	II-57
Tabel 2.63	Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-57
Tabel 2.64	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-58
Tabel 2.65	Indikator Bidang Perindustrian K Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-58
Tabel 2.66	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-59
Tabel 2.67	Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-60
Tabel 2.68	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010 - 2015	II-62
Tabel 2.69	Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-63
Tabel 2.70	Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-64
Tabel 2.71	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/ Kota ke Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-64

Tabel 2.72	Penetapan APBD Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010 - 2015	II-65
Tabel 2.73	Persentase Pejabat yang Mengikuti PIM II, PIM III dan PIM IV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-65
Tabel 2.74	Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-66
Tabel 2.75	Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	II-67
Tabel 2.76	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	II-68
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-4
Tabel 3.2	Proporsi Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan (Persen)	III-10
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-13
Tabel 3.4	Persentase Proporsi Belanja Daerah berdasarkan Jenis Belanja	III-14
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015	III-15
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015 (Rupiah)	III-16
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-21
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Dharmasraya	III-24
Tabel 3.7	Proyeksi Kerangka Pendanaan (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Rupiah)	III-26
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-4
Tabel 4.2	Persandingan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	IV-32
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016 - 2021	V-4
Tabel 6.1	Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VI-2
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VII-2
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VIII-4

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tema / agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005 – 2015	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Muatan Dokumen RPJPD, RPJMD dan RTRW	I-6
Gambar 2.1	Potensi Pengembangan Wilayah	II-2
Gambar 2.2	Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya	II-9
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya 2010 – 2015	II-13
Gambar 2.4	Grafik Persentase Angka Rata-rata Lama sekolah Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya 2010 – 2015	II-15
Gambar 2.5	Grafik Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya 2010 – 2015	II-16
Gambar 2.6	Panjang Jalan Menurut Konsisi dan Pemerintah Yang Berwenang	II-37
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (Assets- Based Development)	IV-3
Gambar 5.1	Skematik Keterkaitan Antara Visi, Misi dengan Perumusan Tujuan dan Sasaran, Program	V-3



## RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 – 2021



*'Menuju Dharmasraya  
Mandiri dan Berbudaya'*





# *Bab I*

## **PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan perencanaan pembangunan di daerah memperhatikan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang terdiri dari 32 urusan, yaitu 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 32 urusan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk dinas, sedangkan fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk badan dan inspektorat. Adapun fungsi penunjang tersebut terdiri dari perencanaan, keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. fungsi lain dimaksud yang masih dilaksanakan adalah fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan bangsa dan politik hingga menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan umum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berlaku setelah RPJMD ditetapkan, maka berdampak pada susunan perangkat daerah sebagai pelaksana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pentingnya perubahan RPJMD.

Disamping itu adanya Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Surat edaran bersama tersebut meminta pemerintah daerah melalui Bupati dan DPRD untuk

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dengan prinsip *money follows program*.

Penyelarasan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 selain didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan nasional yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antarbagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dengan Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos bersama dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya bersepakat untuk melaksanakan perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku. Selain mendukung pelaksanaan SPPN, hal ini juga digunakan sebagai momen dalam pemantapan RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah sebagai dokumen yang dapat dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai *benchmarking* dan bahan dalam peninjauan rencana maupun pelaksanaan program kerja pemerintah daerah oleh stakeholder terkait lainnya (masyarakat dan pihak swasta) serta dapat meningkatkan partisipasinya dalam membangun Dharmasraya lebih maju ke depannya.

Adapun muatan RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang akan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. penyelerasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
- b. penyelerasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- c. penyelerasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- d. penyelerasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. penyelerasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
- f. penyelerasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.

Setelah adanya perubahan RPJMD ini, diharapkan adanya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Sumatera barat dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya, sekaligus dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

#### **A. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara umum dalam proses penyusunannya maupun fungsinya, RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen lainnya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten mempedomani RPJPD Kabupaten Dharmasraya sekaligus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 Maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, muatan lain yang juga perlu diperhatikan adalah RPJMD kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya. Setelah RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, maka RPJMD ini akan dijadikan pedoman dalam penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) setiap tahunnya sampai tahun 2021, dimana tahun 2021 merupakan tahun transisi dari periode kepala daerah dengan periode berikutnya, selain itu RPJMD dapat dijadikan pedoman utama dalam menyusun dokumen perencanaan komplementer lainnya untuk percepatan pembangunan daerah, seperti masterplan, rencana induk, maupun perencanaan strategis lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya". Maju artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian daerah sejajar atau bahkan lebih baik dari daerah lain. Berbudaya artinya terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa serta norma adat.

Sebagai kabupaten hasil pemekaran, pembangunan Kabupaten Dharmasraya pertama kali dimulai dengan mengembangkan berbagai potensi

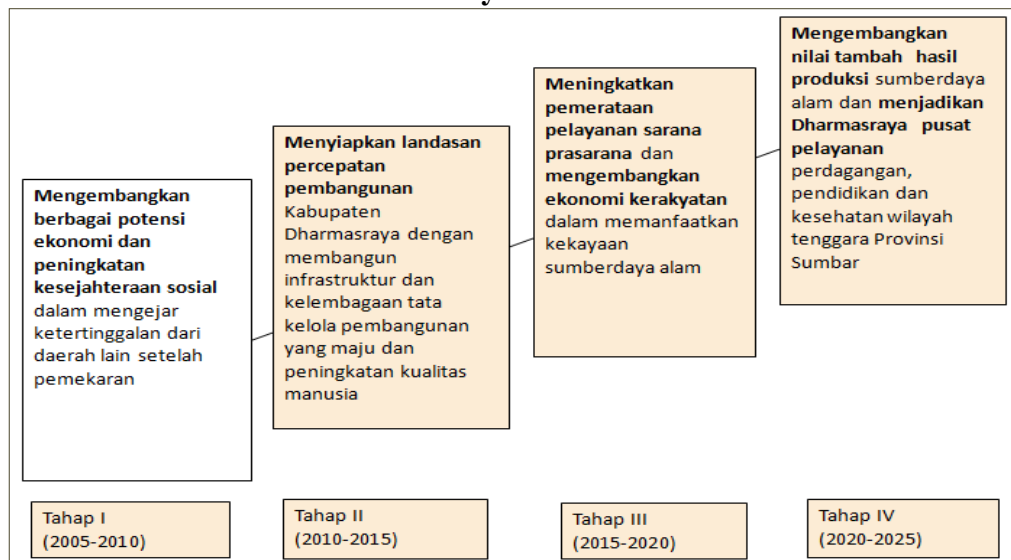
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dan kemudian secara bertahap menyiapkan landasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyiapkan landasan kelembagaan, infrastruktur dan tata kelola pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dan seterusnya selanjutnya mewujudkan nilai tambah ekonomi dan pemusatan aktifitas sosial ekonomi untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumbar.

Prioritas pembangunan dalam tahap III RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah. Berikut dikutip fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III RPJPD 2005-2025:

- a. Membangun sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan sosial bagi penduduk dan peningkatan hasil produksi.
- b. Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- c. Membangun sarana pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tata cara penulisan RPJMD sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **Tema/Agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025**

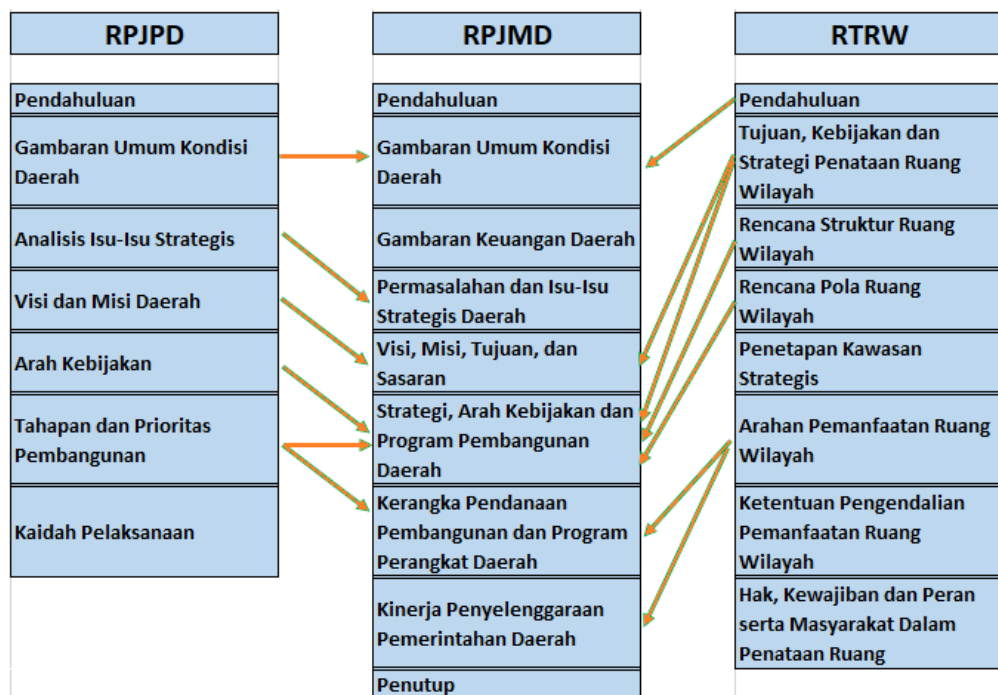


Dengan visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang ditetapkan “Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya” maka RPJMD ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya dengan tema ; meningkatkan pemerataan pelayanan sarana prasarana dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam, dalam rangka meningkatkan nilai tambah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, serta masih perlunya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

## B. Hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penataan ruang

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) tidak berjalan sendiri. Dimana perencanaan pembangunan berjalan saling bersinergi dengan perencanaan wilayah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.2. Keterkaitan muatan dokumen RPJPD, RPJMD dan RTRW**



Dilihat dari muatannya, dokumen perencanaan lebih berfungsi dalam menentukan fokus (target sektoral) pembangunan yang dilihat dari bidang kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah, sedangkan rencana tata ruang menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan oleh sektor yang

terlihat dari kebijakan dalam menetapkan kawasan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari dokumen perencanaan dan dokumen tata ruang saling melengkapi, atau dengan kata lain dokumen perencanaan mengisi keruangan yang telah ditetapkan dalam dokumen penataan ruang yaitu, RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memperhatikan Dokumen rencana tata ruang wilayah baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: “Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya”. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yang dipedomani dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan ditunjang dengan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya dan mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- b. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang hari dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa depan Masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas hampir mencapai 5000 Ha. Sementara tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan.
- c. Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah dan pengembangan lebih lanjut industri pengolahan.
- d. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat dengan dilengkapi sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center. Pengembangan Kawasan Perikanan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung didukung peningkatan

sarana pendukung budidaya (pembibitan) dan pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.

- e. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksplotasinya menjadi hutan restorasi.
- f. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.
- g. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.
- h. Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster
- i. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.
- j. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupatendan interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; dan
- k. Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

Terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) perumusan perubahan RPJMD ini telah dilakukan integrasi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Kebijakan rencana dan program (KRP) berupa: perbaikan perumusan arah kebijakan, penambahan arah kebijakan baru, dan perbaikan program prioritas. Terutama menyangkut pada muatan RPJMD pada misi 2, 3, 4, 5, dan 6.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016–2021 adalah untuk penyempurnaan dalam menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam bentuk dokumen RPJMD secara utuh. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Mendukung keselaran, sinerginitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas No.050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019
5. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016–2021 terdiri dari 9 (sembilan) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan substansi umum dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan/ penyajian dokumen RPJMD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan data disertai dengan analisis yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang disusun berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah, serta aspek daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah. Bab ini meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan serta analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama periode Bupati dan Wakil Bupati, penyajiannya permasalahan pembangunan disajikan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan selama tahun rencana (2016-2021).

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini memuat indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini menjelaskan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen perubahan RPJMD ini. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun di tahun berikutnya.



# *Bab II*

## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

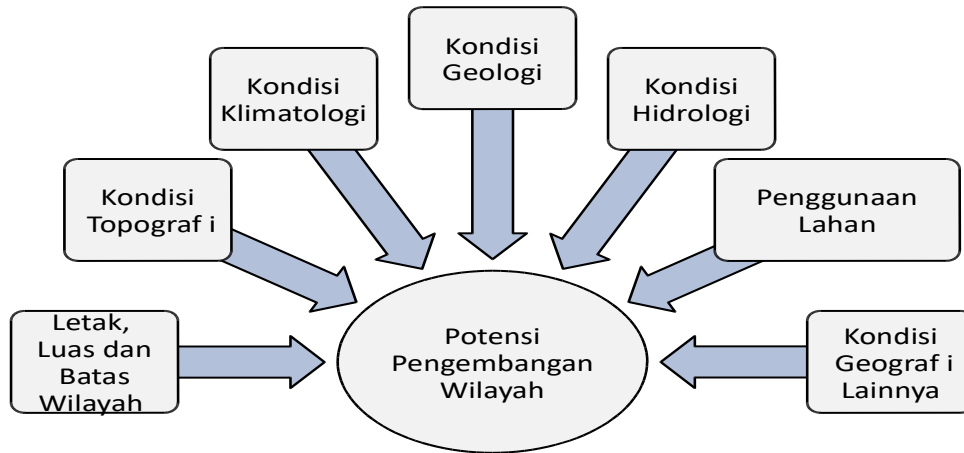
Dalam perumusan maupun penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data pembangunan, grafik dan analisis yang menjelaskan data informasi kondisi daerah hingga tahun 2015. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek Daya Saing Daerah, dan (4) aspek pelayanan umum.

Data dan analisis gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2010 sampai tahun 2015 serta tergantung pada ketersediaan data yang ada disertai sumber data untuk mendukung penyajian bab berikutnya seperti : permasalahan, isu strategis, serta sampai kepada penjabaran visi, visi dan program bupati dan wakil bupati yang akan disusun secara sistematis. Data yang disajikan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selama periode RPJMD ini. Selain itu juga dilakukan penyelarasan dengan mempedomani indikator pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal ini dapat dijadikan tolak ukur (*benchmark*) pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan daerah yang lebih luas, yaitu menyandingkan indikator kinerja Provinsi Sumatera Barat dan nasional dengan kondisi Kabupaten Dharmasraya

Pengukuran capaian pembangunan nantinya akan dijadikan sumber informasi utama agar lebih fokus dalam peningkatan pelayanan dan kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan bidang urusan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2016-2021.

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi Kabupaten Dharmasraya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Potensi Pengembangan Wilayah**

#### a. Kondisi Geografi

Untuk melihat sekilas gambaran fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Dharmasraya, yang disajikan berdasarkan unsur kondisi geografi yaitu :

##### - Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi  $00^{\circ}48'25,4''$ -  $1^{\circ}41'40,3''$  LS dan  $101^{\circ}8'32,5''$ - $101^{\circ}53'30,2''$  BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu  $2.961,13 \text{ Km}^2$  (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas  $3.025,99 \text{ km}^2$  (302.599) Ha.

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## b. Kondisi Fisik Daerah

### - Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya**

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
<b>Jumlah</b>		<b>302.599</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

### - Kondisi klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

### - Kondisi geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian

saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

- Kondisi hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Didaerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 dapat disajikan secara umum sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

### 3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.
  - (a). Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai.
  - (b). Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kekeringan ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

### c. Kondisi Demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 (jiwa)**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	98892	102.083	104.801	108.935	112.227	115.515
2	Perempuan	92.530	95.516	97.800	101.756	104.678	107.597
<b>Jumlah (jiwa)</b>		<b>191.422</b>	<b>197.599</b>	<b>202.601</b>	<b>210.691</b>	<b>216.905</b>	<b>223.112</b>
<b>Rasio jenis kelamin (persen)</b>		<b>106,88</b>	<b>106,88</b>	<b>107,16</b>	<b>107,06</b>	<b>107,21</b>	<b>107,36</b>
<b>Pertumbuhan penduduk (persen)</b>		<b>2,65</b>	<b>2,83</b>	<b>2,53</b>	<b>3,99</b>	<b>2,95</b>	<b>2,86</b>
<b>Rata-rata pertumbuhan (persen)</b>		<b>2,97</b>					

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dan data diolah Tahun 2017

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	21.512	9,64	4,21
3	Koto Besar	56.057	18,53	26.071	11,69	0,47
2	Asam Jujuhan	48.541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22.120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12.145	4,01	17.163	7,69	1,41
7	Tiumang	13.443	4,44	12.499	5,60	0,93
6	Padang Laweh	6.062	2,00	6.535	2,93	1,08
8	Sitiung	12.457	4,12	26.367	11,82	2,12
9	Timpeh	32.301	10,67	15.378	6,89	0,48
10	Pulau Punjung	44.316	14,65	42.514	19,06	0,96
11	IX Koto	50.050	16,54	8.468	3,80	0,17
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>302.599</b>	<b>100</b>	<b>223.112</b>	<b>100</b>	<b>0,74</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, data diolah

Pada tabel di atas, Dharmasraya memiliki luas wilayah 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat

berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, serta faktor ekonomi terutama yang dipengaruhi oleh sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah yang berasal dari komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator makro lainnya antara posisi Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat maupun nasional.

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga IPM ini dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM metode baru berbeda dengan perhitungan IPM hingga tahun 2013. Mulai tahun 2014 indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam perhitungan IPM, namun diganti dengan indikator lain yaitu harapan lama sekolah. Adanya perbedaan indikator dan rumus perhitungan IPM juga tidak seperti IPM sebelumnya. IPM metode baru terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator angka harapan hidup, kemudian dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita disesuaikan. Untuk melihat posisi

capaian IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap nasional, dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel dibawah :

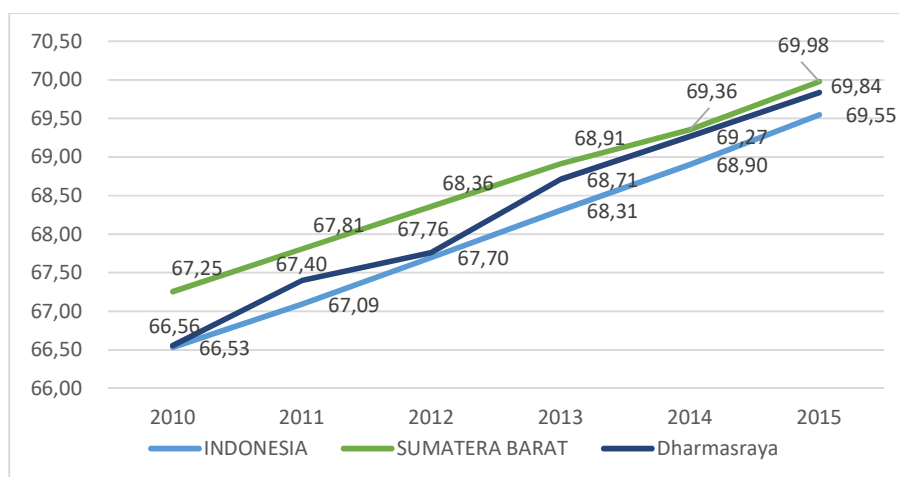
**Tabel 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)  
Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Nasional</b>	<b>66,53</b>	<b>67,09</b>	<b>67,70</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>
Angka harapan hidup	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78
Harapan lama sekolah	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55
Angka rata-rata lama sekolah	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84
pengeluaran perkapita disesuaikan	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150
<b>Sumatera Barat</b>	<b>67,25</b>	<b>67,81</b>	<b>68,36</b>	<b>68,91</b>	<b>69,36</b>	<b>69,98</b>
Angka harapan hidup	67,59	67,79	68,00	68,21	68,32	68,66
Harapan lama sekolah	12,22	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60
Angka rata-rata lama sekolah	8,13	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42
pengeluaran perkapita disesuaikan	9.339	9.409	9.479	9.570	9.621	9.804
<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>66,56</b>	<b>67,40</b>	<b>67,76</b>	<b>68,71</b>	<b>69,27</b>	<b>69,84</b>
Angka harapan hidup	69,45	69,54	69,63	69,72	69,76	70,16
Harapan lama sekolah	10,66	10,85	11,05	11,79	12,19	12,36
Angka rata-rata lama sekolah	7,43	7,83	7,88	7,94	7,99	8,03
pengeluaran perkapita disesuaikan	10.373	10.434	10.470	10.505	10.550	10.713

Sumber : <http://www.bps.go.id>, Tahun 2018

Dilihat dari tabel di atas, terlihat posisi IPM Kabupaten Dharmasraya berada di bawah Provinsi Sumatera Barat, namun berada di atas IPM nasional. Namun apabila dibandingkan untuk masing-masing indikator IPM, pada angka harapan hidup, Dharmasraya berada di atas Provinsi Sumbar. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita disesuaikan, Kabupaten Dharmasraya berada di atas nasional maupun provinsi, sedangkan untuk indikator pada dimensi pendidikan, baik untuk harapan lama sekolah maupun angka rata-rata lama sekolah berada di bawah nasional maupun provinsi.

**Gambar 2.2. Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya**



Dilihat dari grafik di atas, perkembangan IPM dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, ketiga data IPM mengalami perubahan positif, namun trend perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat, hal ini terlihat dari semakin mendekatinya IPM Dharmasraya dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Barat begitupun jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Kabupaten Dharmasraya semakin jauh di atas capaian IPM nasional,

Selanjutnya apabila dibandingkan capaian indikator IPM Kabupaten Dharmasraya dengan 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat di tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah :

**Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015**

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
1	Kepulauan Mentawai	64,05	11,48	6,27	5 684	57,41	19
2	Pesisir Selatan	69,96	13,04	8,11	8 412	68,07	12
3	Solok	67,35	12,88	7,57	9 334	67,12	14
4	Sawah Lunto/Sijunjung	65,22	11,94	7,33	9 796	65,30	17
5	Tanah Datar	68,75	13,35	7,93	10 103	69,49	10
6	Padang Pariaman	67,64	13,54	6,89	10 260	68,04	11
7	Agam	71,30	13,59	8,17	8 859	69,84	8
8	Limapuluh Koto	69,23	12,76	7,91	8 774	67,65	13
9	Pasaman	66,26	12,70	7,63	7 340	64,01	18
10	Solok Selatan	66,64	12,37	7,98	9 653	67,09	15
11	Dharmasraya	70,16	12,36	8,03	10 713	69,84	9

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
12	Pasaman Barat	67,03	12,30	7,83	8 109	65,26	16
13	Kota Padang	73,19	15,60	10,97	13 522	80,36	1
14	Kota Solok	72,74	14,27	10,77	11 350	76,83	4
15	Kota Sawah Lunto	69,27	12,69	9,66	8 931	69,87	7
16	Kota Padang Panjang	72,45	15,01	11,09	9 670	75,98	5
17	Kota Bukit Tinggi	73,52	14,92	10,79	12 330	78,72	2
18	Kota Payakumbuh	72,93	14,21	10,29	12 622	77,42	3
19	Kota Pariaman	69,59	14,49	9,96	11 814	74,98	6
	Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	
	Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Dari tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2015 sebesar 69,84 dan berada pada rangking 9 dari 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini 69,84, naik dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 69,27, dan berada sedikit di atas IPM Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 69,36 namun sedikit berada di bawah IPM nasional sebesar 69,90. Dilihat dari perbandingan indikator pembentuk IPM, indikator angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan berada di atas provinsi, namun pada dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi.

Melihat kondisi tersebut, maka ke depannya, percepatan pembangunan bidang pendidikan mesti lebih diprioritaskan dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga Dharmasraya mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

## 2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk melihat pertumbuhan PDRB dapat dilihat dari tabel di bawah :

**Tabel 2.6 Perbandingan Pertumbuhan PDB/PDRB Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 (ADHK Tahun 2010)**

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDB Nasional	6,22	6,49	6,03	5,58	5,02	4,79
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,34	6,34	6,31	6,02	5,85	5,41
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,51	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2011, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 6,34% hingga 6,56%, namun perkembangannya hingga tahun 2015, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki masih tumbuh di atas nasional.

### 3. Laju inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2014. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

**Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2015**

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	8,36
2	Sumatera Barat	7,84	5,37	4,16	10,87	11,58	1,08
3	Kota Padang	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	0,85
4	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	9,24	2,79

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2010 - 2016

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2010 sampai dengan 2015 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2015 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagai angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

#### 4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

**Tabel 2.8 PDB Perkapita Nasional, PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2016 (Rp juta)**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	PDB perkapita Nasional	28,8	32,4	35,10	36,50	41,92	45,14
1.2.	PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat	21,58	24,06	26,29	28,99	32,13	34,63
1.3.	PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya	23,65	26,03	28,07	30,51	33,05	34,83

Sumber : <http://www.bps.go.id>

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terlihat selalu berada di atas provinsi namun berada di bawah PDB perkapita nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di atas rata-rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

#### 5. Indeks Gini (Gini rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4-0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah

**Tabel 2.9 Indeks Gini Rasio Nasional. Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015**

No.	Indeks Gini	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	0,380	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
2	Provinsi Sumatera Barat	0,330	0,329	0,350	0,338	0,321	0,342
3	Kabupaten Dharmasraya	-	0,369	0,425	0,340	0,324	0,356

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>

Berdasarkan data di atas, terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah, lebih baik dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai dari tahun 2010 hingga 2015 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik,

maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

## 6. Tingkat Kemiskinan

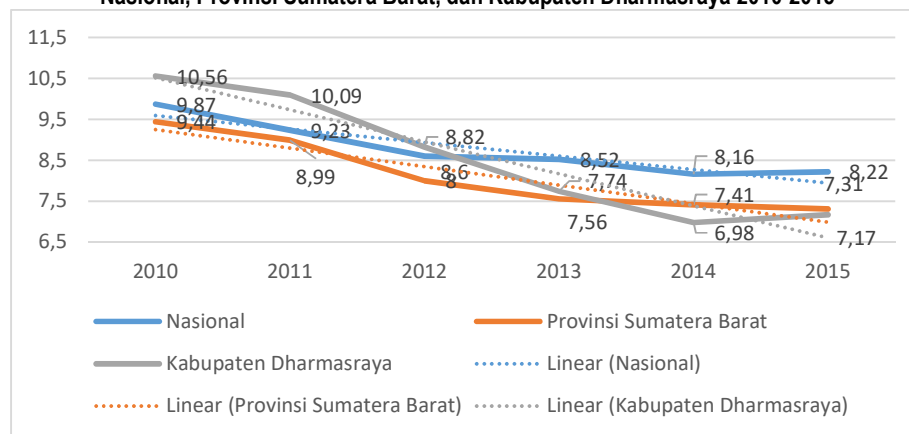
Seiring semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya naiknya PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi yang positif serta menurunnya indeks gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan penduduk, hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.10 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Nasional</b>	<b>9,87</b>	<b>9,23</b>	<b>8,60</b>	<b>8,52</b>	<b>8,16</b>	<b>8,22</b>
Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	31.023,39	30.018,93	28.594,64	28.553,93	27.727,78	28.513,57
Jumlah penduduk (juta jiwa)	237,6	242	245,4	248,8	252,2	255,5
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>9,44</b>	<b>8,99</b>	<b>8,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7,41</b>	<b>7,31</b>
Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	430,02	442,09	397,86	380,63	354,74	349,53
Jumlah penduduk (jiwa)		4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.289
<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>10,56</b>	<b>10,09</b>	<b>8,82</b>	<b>7,74</b>	<b>6,98</b>	<b>7,17</b>
Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	20,30	19,57	18,18	16,42	15,22	15,89
Jumlah penduduk (jiwa)	192.100	198.273	204.510	210.686	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

**Gambar 2.3. Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya 2010-2015**



Kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya lebih cepat dibandingkan dengan nasional maupun provinsi, hal ini diperlihatkan oleh kecuraman garis trend tingkat kemiskinan, jika di tahun 2010 tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya diatas nasional dan provinsi, di tahun 2015 capaiannya sudah di bawah nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. begitupun trend kemiskinan Provinsi Sumatera

Barat juga lebih baik dibandingkan nasional. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. meskipun terjadi sedikit kenaikan tingkat kemiskinan di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun di Kabupaten Dharmasraya, namun ke depannya expectasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik.

## 7. Angka melek huruf

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas di Dharmasraya.

**Tabel 2.11 Angka Melek Huruf  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	96,38	97,27	97,29	97,33	97,48	97,53*

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Untuk kondisi 2015 angka ini sudah menunjukkan sebesar 97,53 persen dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 3%.

## 8. Angka rata-rata lama sekolah

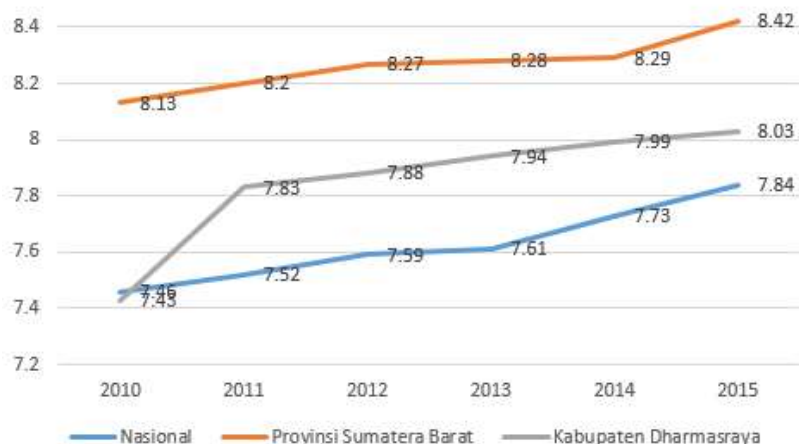
Angka rata-rata lama sekolah merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya

**Tabel 2.12 Angka Rata-Rata Lama Sekolah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	7.46	7.52	7.59	7.61	7.73	7.84
2	Provinsi Sumatera Barat	8.13	8.2	8.27	8.28	8.29	8.42
3	Kabupaten Dharmasraya	7.43	7.83	7.88	7.94	7.99	8.03

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

**Gambar 2.4. Garfik Persentase Angka Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya 2010-2015**



Pada angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Jika di tahun 2010 sebesar 7,43 tahun, di tahun 2015 menjadi 8,03 tahun atau setara dengan kelas delapan SMP/MTs. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya berada di atas capaian nasional namun masih di bawah provinsi

#### 9. Angka Harapan Hidup (AHH)

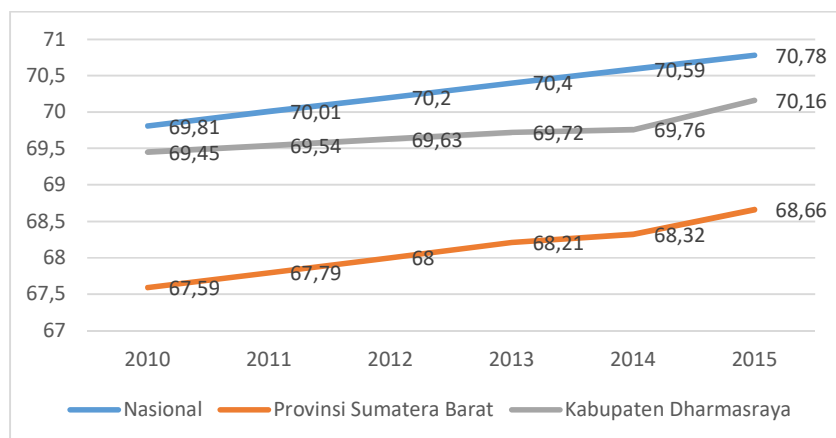
Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM. Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

**Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	69.81	70.01	70.2	70.4	70.59	70.78
2	Provinsi Sumatera Barat	67.59	67.79	68	68.21	68.32	68.66
3	Kabupaten Dharmasraya	69.45	69.54	69.63	69.72	69.76	70.16

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

**Gambar 2.5. Garfik Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya 2010-2015**



Dilihat dari perkembangannya selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015, Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya berada di atas Provinsi Sumatera Barat, namun masih di bawah capaian nasional

#### 10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi anak balita. secara komitmen global (SUN-Scaling Up Nutrition) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 3 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

**Tabel 2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	84	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu	5	101	82	53	53	14
Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	5	101	98	53	53	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, terlihat pada tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi peningkatan kasus balita gizi buruk dari 5 kasus menjadi 101 kasus, hingga tahun 2015 terjadi penurunan kasus seiring dengan program pemerintah yang memprioritaskan penanganan kasus ini, sehingga pada tahun 2015 kasus ini turun pada angka 14 kasus.

### 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

**Tabel 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,21	68,93	72,01	69,54	69,59	65,88
	Angkatan kerja 15 tahun keatas	90.963	90.816	96.355	97.243	105.322	102.851
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	131.340	131.755	133.807	139.828	151.347	156.118

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

### 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

**Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18
1	Provinsi Sumatera Barat	6,95	8,02	6,65	7,02	6,50	6,89
2	Kabupaten Dharmasraya	2,7	6,65	6,21	5,13	2,05	3,51

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Di tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat pengangguran 3,51% pada. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2011 yang berjumlah 6,65 % merupakan penurunan yang cukup signifikan. Capaian tingkat pengangguran ini terlihat berada selalu di bawah capaian nasional maupun provinsi.

### 13. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan harapan Merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan

**Tabel 2.17 Skor Pola Pangan harapan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Skor Pola Pangan Harapan	61,50	82.60	82.60	82.60	75,9

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, Tahun 2017

#### **14. Penguatan Cadangan Pangan**

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat adalah melalui pengembangan lumbung pangan. Lumbung dipandang sebagai model pengembangan cadangan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Upaya ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan (3) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat.

**Tabel 2.18 Penguatan Cadangan Pangan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penguatan Cadangan Pangan	11,44	29,67	18.85	0.68	55,22

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, Tahun 2017

#### **15. Penangan Daerah Rawan Pangan**

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil Analisis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang menghasilkan peta situasi pangan dan gizi di tingkat wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam

penanganan daerah rawan pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan. Untuk itu hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dilengkapi dengan data by name by address masyarakat yang mengalami kerentanan pangan dan gizi sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran

**Tabel 2.19 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penangan Daerah Rawan Pangan	0	50.00	0.00	72.73	72,73

### 16. Kontribusi PDRB

Kontribusi PDRB memperlihatkan peran tiap sektor terhadap struktur perekonomian serta perannya dalam pembentukan perekonomian daerah. Semakin besar nilai kontribusi sektor terhadap PDRB maka semakin besar pula perannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.20 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,73	31,05	30,69	30,84	31,04	31,03
B	Pertambangan dan Penggalian	11,54	12,17	11,83	11,52	10,90	9,87
C	Industri Pengolahan	6,86	6,81	6,67	6,27	6,00	5,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,97	11,00	11,20	11,54	11,95	12,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,16	12,38	12,61	12,67	12,62	13,18
H	Transportasi dan Pergudangan	5,40	5,28	5,32	5,56	5,77	5,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,78	0,79	0,81	0,82	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	5,39	5,50	5,28	5,44	5,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,12	2,09	2,16	2,17	2,24	2,31
L	Real Estat	2,08	2,07	2,05	2,06	2,10	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,69	6,65	6,72	6,65	6,35	5,87
P	Jasa Pendidikan	2,10	2,21	2,22	2,34	2,46	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,45	1,54	1,57	1,59	1,60
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,67	0,63	0,64	0,69	0,68	0,69
TOTAL		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 31,03 persen, sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 13,18 persen, selanjutnya sektor konstruksi sebesar 12,88 persen. Pertanian masih menjadi sektor andalan, namun pada sektor industri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar belum memperlihatkan percepatan. Bagi daerah yang berbasis pertanian, maka sektor industri seharusnya dapat menjadi daya dorong dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lebih besar.

### 2.3. ASPEK DAYA SAING

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian dari perhitungan PDRB yang menggunakan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

**Tabel 2.21 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah)	13.522.152	13.594.253	13.673.615	13.907.337	14.088.412	14.279.469
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (juta rupiah)	2.598.308	2.695.713	2.795.981	2.930.123	3.055.847	3.185.921
Jumlah penduduk (jiwa)	192.152	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2018

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga akan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat adanya peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2010 pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tercatat 13,5 juta rupiah,

naik menjadi 14,27 juta rupiah di tahun 2015. Dilihat dari nilai konsumsi rumah tangga perkapita yang selalu naik.

## 2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

**Tabel 2.22 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NTP Provinsi Sumater Barat	105,48	106,25	105,03	104,21	100,61	97,75
Indeks yang diterima petani	132,98	141,05	144,54	150,29	112,54	117,66
Indeks yang dibayar petani (lb)	126,07	132,75	137,63	144,23	111,87	120,36
NTP Kabupaten Dharmasraya	n/a	n/a	102,06	100,94	n/a	n/a
Indeks yang diterima petani			105,11	103,52		
Indeks yang dibayar petani (lb)			102,99	102,56		

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Dilihat dari perbandingan antara NTP Provinsi Sumater Barat dengan Kabupaten Dharmasraya, capaian NTP Kabupaten Dharmasraya masih berada dibawah Provinsi Sumbar. Dan dilihat dari perkembangannya secara umum untuk Provinsi Sumatera Barat terlihat penurunan NTP dari tahun 2010 hingga tahun 2015, sehingga hal ini tentunya memiliki dampak terhadap kondisi sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya. Dengan melihat masih belum kondusif dan memadainya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian petani dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan petani (sekolah lapang) serta menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani.

## 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum disajikan berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung ditambah dengan bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang masih dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan bangsa dan Politik, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

## A. Urusan Pemerintahan Wajib

### A.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara

#### 1. Pendidikan

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja.

Secara umum Kabupaten Dharmasraya memiliki fasilitas pendidikan sebanyak 150 SD, 5 unit MI atau SD dan MI sebanyak 155 sekolah, sedangkan untuk SMP tercatat sebanyak 34 SMP, 16 MTs atau SMP dan MTs tercatat sebanyak 50 sekolah. Untuk tingkat SD terdapat 2 sekolah SD swasta dalam bentuk SDIT yang terdapat di Kec. Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Sedangkan pendidikan tingkat menengah mulai Tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi, hingga tahun 2015, masih terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atau sederajat, yaitu kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, dan Kecamatan Padang Laweh. Lebih rinci kondisi umum fasilitas pendidikan, jumlah murid dan guru dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.23 Jumlah sekolah, Murid, guru dan rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1	Sungai Rumbai	9	2.897	147	19,71
2	Koto Besar	15	2.961	179	16,54
3	Asam Jujuhan	9	1.466	98	14,96
4	Koto Baru	18	3.897	255	15,28
5	Koto Salak	12	1.875	140	13,39
6	Tiumang	12	1.525	129	11,82
7	Padang Laweh	4	730	54	13,52
8	Sitiung	20	3.373	219	15,40
9	Timpeh	11	1.987	130	15,28
10	Pulau Punjung	26	5.471	387	14,14
11	IX Koto	14	1.336	133	10,05
<b>Jumlah SD</b>		<b>150</b>	<b>27.518</b>	<b>1871</b>	<b>14,71</b>
<b>MI</b>		<b>5</b>	<b>683</b>	<b>57</b>	<b>11,98</b>
<b>Jumlah SD + MI</b>		<b>155</b>	<b>28.201</b>	<b>1928</b>	<b>14,63</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2017

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

**Tabel 2.24 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	<b>Angka partisipasi kasar</b>						
	- <i>APK SD/MI</i>	110,99	103,99	110,38	109,14	110,38	108,61
	- <i>APK SMP/MTs</i>	71,3	79,13	73,52	70,93	80,98	90,93
	- <i>APK SMA/SMK/MA</i>	59,82	69,13	52,5	60,66	82,99	72,98
2	<b>Angka Partisipasi Murni</b>						
	- <i>APM SD/MI</i>	94,62	94,75	97,55	98,12	98,64	100,00
	- <i>APM SMP/MTs</i>	59,55	59,12	60,28	60,31	65,69	78,33
	- <i>APM SMA/SMK/MA</i>	47,47	44,14	40,68	51,74	63,34	57,21

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah di Dharmasraya berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 103,99 di tahun 2011 menjadi 110,23 di tahun 2015. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 79,13 di tahun 2011 menjadi 80,99 di tahun 2014. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan percepatan capaian APK dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2010 hanya sebesar 59,82 menjadi 82,99 di tahun 2014.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, terakhir pada angka 98,64, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 65,69 dan 63,34. Sehingga kedua tingkatan pendidikan

ini masih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan tingkat SD/MI.

Meningkatnya APK maupun APM tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selain didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan, juga didukung oleh program pusat maupun daerah dalam berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dukungan beasiswa dari badan amil zakat bagi siswa kurang mampu sekaligus peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

Adanya selisih yang cukup besar antara capaian APK dengan APM untuk setiap tingkatan sekolah, menunjukkan adanya ketidak tepatan usia anak yang bersekolah dengan usia sekolah yang seharusnya. Selisih tertinggi ada pada tingkat sekolah SMA/SMK/MA, selisih terendah ada pada tingkat sekolah SD//MI. melihat hal ini maka kebijakan yang dilakukan mestinya adalah mengarahkan penerimaan siswa baru sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

**Tabel 2.25 Jumlah sekolah, Murid, guru dan rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1	Sungai Rumbai	2	870	54	16,11
2	Koto Besar	4	877	68	12,90
3	Asam Jujuhan	1	131	11	11,91
4	Koto Baru	4	1.041	97	10,73
5	Koto Salak	3	634	54	11,74
6	Tiumang	1	179	15	11,93
7	Padang Laweh	1	140	12	11,67
8	Sitiung	3	943	72	13,10
9	Timpeh	4	643	67	9,60
10	Pulau Punjung	8	1.924	166	11,59
11	IX Koto	3	300	33	9,09
<b>Jumlah SMP</b>		<b>34</b>	<b>7.682</b>	<b>649</b>	<b>11,84</b>
<b>MTs</b>		<b>16</b>	<b>2.542</b>	<b>340</b>	<b>7,48</b>
<b>Jumlah SMP + MTs</b>		<b>50</b>	<b>10.224</b>	<b>989</b>	<b>10,34</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2017

*a) Angka Partisipasi sekolah*

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) maupun pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan. APS menunjukkan persentase

penduduk yang dikelompokkan pada usia jenjang pendidikan yang diserap oleh sistem pendidikan berdasarkan kelompok umur tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. APS digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah						
	- APS 7-12 Tahun	97,77	99,30	98,74	98,68	99,63	n/a
	- APS 13-15 Tahun	80,3	84,68	86,69	86,40	94,51	n/a
	- APS 16-18 Tahun	56,41	54,69	52,86	59,91	77,68	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,63, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 94,51, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung dan daya saing dunia pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masih terdapat lebih dari 5% penduduk usia sekolah belum tertampung oleh sistem pendidikan atau melanjutkan keluar daerah. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

Untuk APS 16-18 memiliki capaian yang masih rendah, dengan capaian sebesar 77,68 tersebut masih terdapat sekitar 22,32 persen penduduk usia sekolah tersebut belum mengenyam pendidikan pada jenjang formal.

**b) Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS)/ Penduduk Usia Sekolah**

Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

**Tabel 2.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	RKS SD/MI	57,91	56,76	56,39	61,66	61,58
	Jumlah gedung sekolah SD/MI	139	139	139	153	154
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	24.004	24.487	24.649	24.812	24.976
2	RKS SMP/MTs	26,27	28,95	33,10	51,97	54,79
	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	31	31	31	49	55
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11.801	10.707	9.366	9.428	9.490
2	RKS SMA/SMK/MA	18	13,27	16,21	25,10	29,28
	Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA	12	12	17	25	30
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.525	9.044	10.490	9.960	10.245

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Capaian RKS untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MS mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan sekolah sekolah SD/MI sebanyak 15, untuk tingkat SMP/MTs terlihat penambahan sebanyak 11 unit sekolah, sedangkan untuk tingkat SMA.SMK/MS terdapat penambahan sebanyak 18 unit sekolah. Dengan adanya penambahan unit sekolah tersebut berpengaruh pada naiknya capaian RKS untuk semua tingkatan sekolah

*c) Rasio Guru/Murid*

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio guru/murid tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami fluktuasi, namun secara umum tren mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah guru yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa seorang guru SD membina anak sebanyak 15 orang, dan untuk seorang guru SMP membina 14 siswa. Hal ini menggambarkan ketercukupan guru, tetapi perlu pemerataan guru secara proporsional.

**Tabel 2.28 Rasio Guru Terhadap Murid  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Rasio guru/ murid SD/MI (per 10.000)	13.36	15.42	14.80	14.98
	Jumlah guru SD/MI	1.963	1.770	1.869	1.882
	Jumlah Murid (SD/MI)	26.833	27.288	27.671	28.201
1	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	12.12	13.01	10.05	13.59
	Jumlah guru SMP/MTs	626	583	722	773
	Jumlah Murid (SMP/MTs)	6.840	7.587	9.776	10.508

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

*d) Jumlah Siswa Putus Sekolah*

Jumlah kejadian putus sekolah untuk SD tercatat sebanyak 50 kasus, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tercatat sebanyak 41 kasus. Diantara 11 kecamatan, terdapat 3 kecamatan dengan tidak adanya kejadian putus sekolah, yaitu Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk Madrasah Ibtidayah (MI) tidak terlihat adanya putus sekolah di tahun 2013. Sedangkan kejadian putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar untuk tingkat SD maupun SMP/MTs dengan jumlah kejadian 31 siswa, diantaranya 11 untuk tingkat SD dan 21 untuk tingkat SD/MI,

Untuk menekan dan menanggulangi kejadian putus sekolah perlu dilakukan strategi melalui analisis penyebab kejadian yang ada, baik dari sisi kemiskinan, kenakalan remaja maupun faktor lainnya. Setelah ini baru dilakukan tindak lanjut, apakah ini dilakukan melalui pembinaan maupun melalui pemberian beasiswa.

**Tabel 2.29 Jumlah Siswa Putus Sekolah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1	Sungai Rumbai	0	0	0	0	0	0
2	Koto Besar	11	0	11	16	4	20
3	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	0
4	Koto Baru	3	0	3	0	8	8
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	0
6	Tiumang	2	0	2	0	1	1
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	0

	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
8	Sitiung	5	0	5	8	0	8
9	Timpeh	4	0	4	2	0	2
10	Pulau Punjung	19	0	19	2	0	2
11	IX Koto	6	0	6	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>41</b>

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

## 2. Kesehatan

- a) *Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan*  
 Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

**Tabel 2.30 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (AKB)	17,95	5,86	25,11	21,54	15,10	20,15
<i>Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)</i>	59	21	76	81	58	79
<i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i>	3,287	3.581	3.027	3.761	3.841	3.921
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	n/a	n/a	n/a	266	286	113
<i>jumlah kematian ibu melahirkan</i>	n/a	n/a	n/a	10	11	6
<i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i>	n/a	3.581	3.027	3.761	3.841	5.329

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 25,11 di tahun 2012, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter) , penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga kesehatan.

b) *Rasio posyandu per satuan balita*

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui pendidikan gizi seimbang untuk keluarga. Peran masyarakat adalah dalam bentuk pembentukan kader Posyandu yang telah terbentuk hampir di setiap jorong. Pelayanan yang diberikan oleh Posyandu ini terutama bagi anak bawah lima tahun (Balita), serta pelayanan bagi ibu hamil. Sasaran yang dituju dari Posyandu adalah peningkatan gizi balita, penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, serta pelayanan KB.

**Tabel 2.31 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	10,88	10,13	12,30	10,22	9,93	9,34
	<i>Jumlah posyandu</i>	198	230	257	257	257	243
	<i>Jumlah balita</i>	18.204	22.702	20.902	25.147	25.888	26.025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, rasio posyandu terhadap balita cenderung mengalami sedikit penurunan, hal ini dipicu oleh tingginya pertambahan jumlah balita dibandingkan dengan perkembangan jumlah Posyandu yang ada. Jika di tahun 2010 rasionya sebesar 10,88 mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 9,34. Kebijakan yang penting disini adalah dalam bentuk revitalisasi peran posyandu, peningkatan aktivitas kader posyandu serta peran bidan desa dan puskesmas sebagai mitra kader di tingkat jorong. Revitalisasi posyandu ini dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan juga lansia.

c) *Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk*

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan jenis fasilitas tingkat pertama (FKTP) yang langsung melayani masyarakat pada lingkup pelayanan dasar. Program nasional yang terkait dengan ini yaitu berupa pemanfaatan dana BOK yang difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan

lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan SDGs bidang kesehatan. Selain dana BOK, operasional Puskesmas juga didukung langsung oleh dana APBD kabupaten

Untuk percepatan peningkatan mutu, pemerintah daerah juga telah mendorong seluruh Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu upaya peningkatan pelayanan di tingkat puskesmas adalah pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang telah berjalan baik untuk rawat jalan dan/atau rawat inap Puskesmas.

**Tabel 2.32 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk	0,281	0,277	0,318	0,361	0,369	0,363
Jumlah Puskesmas	11	12	12	13	13	13
Jumlah Poliklinik/Klinik	0	0	10	19	23	24
Jumlah Pustu	43	43	43	44	44	44
Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Keterangan : \* = angka prediksi

Hingga tahun 2015, Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki 13 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung dan kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah ada sebanyak 44 unit. Disamping sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, juga terdapat 44 klinik yang dikelola oleh swasta.

*d) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk*

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2015 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Namun dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, maka telah dilakukan berbagai upaya, peningkatan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang inap, penambahan fasilitas alat kesehatan, sisi lain yang dilakukan adalah penataan manajemen, serta peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis dan paramedis. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada yaitu masih

kurangnya ruang inap yang kurang mampu mengiringi penambahan jumlah pasien rawat inap masih menjadi permasalahan utama. Ke depan perlu jalan keluar yang lebih jelas seperti lanjutan pembangunan gedung RSUD yang baru.

**Tabel 2.33 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Keterangan : \* = angka prediksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang terletak di Pulau Punjung merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2010 menjadi 0,004 di tahun 2015.

a) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi diantaranya terdapatnya kasus anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah komplikasi kebidanan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian mulai tahun 2011 semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

**Tabel 2.34 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	608	361	390	559	822	838
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	735	361	390	559	822	838

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

- b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Perlunya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan guna meminimalisir penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 2.35 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	66	85	94	86	100	93
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	2.923	3.523	3.542	3.595	3.660	3.741
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	4.414	4.162	3.778	4.184	3.660	4070

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Keterangan : \* = angka prediksi

Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami kenaikan dari 66 persen di tahun 2010, di tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan cakupan menjadi 93 persen.

c) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT, setiap tahunnya jorong yang telah terlaksana UCI meningkat, dari 76 % di tahun 2010 menjadi 85% di tahun 2015. Sehingga secara umum terjadi peningkatan cakupan layanan sampai tahun 2015.

**Tabel 2.36 Cakupan Desa/Kelurahan UCI  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76	67	63	60	70	85
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	197	174	165	155	183	220
	Jumlah Desa / Kelurahan	260	260	260	260	260	260

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

d) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC BTA dan DBD)

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

**Tabel 2.37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	38	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	114	146	168	140	147	188
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	299	146	168	140	147	188
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	n/a	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai	n/a	23	45	109	35	135

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun						
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	n/a	23	45	109	35	135

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Jenis penyakit yang tergolong penyakit menular adalah DBD, TB dan malaria. Pada akhir tahun 2015 Dharmasraya mengalami KLB kasus DBD dengan telah jatuhnya korban meninggal dunia. Untuk itu dalam rangka menaggulangi dampak yang lebih buruk, maka dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan melakukan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh.

Sedangkan untuk kasus TBC BTA, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan keengganan pasien suspect TBC yang tidak melapor dan datang ke Puskesmas sehingga dilakukan kunjungan rumah ke rumah, sehingga pada tahun 2015, 100% pasien TBC yang terlayani termasuk juga kasus DBD. Untuk menaggulangi penyebaran penyakit ini perlu adanya peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagi masyarakat, terutama di lingkungan yang ada masyarakat kasus TBC BTA.

- e) Jumlah penderita HIV dan AIDS  
Jumlah penderita HIV dan AIDs di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.38 Jumlah Penderita HIV dan AIDS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah pasien HIV dan AIDS	-	3	1	1	1	-

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Penyebaran penyakit HIV dan AIDS dipengaruhi oleh faktor letak daerah dan perilaku sosial masyarakat, terutama pada beberapa titik lokasi hiburan yang dipantau. kasus HIV/AIDS ditemukan melalui pelaksanaan screening pada populasi beresiko penyakit HIV/AIDS. Beberapa titik yang dipantau terdapat di Kecamatan Pulauunjung dan Kecamatan Koto Baru yang dilaksanakan dua kali setahun.

f) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari tahun 2010 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 73,49% menjadi 173,43%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah kunjungan pasien miskin, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Program JKN ini dilaksanakan melalui pemberian kartu BPJS dan kartu Indonesia sehat. Dengan adanya pemberian kartu BPJS dan KIS kepada masyarakat miskin, maka berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien miskin ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah sakit, diharapkan hal ini juga adanya peningkatan layanan masyarakat miskin pada klinik swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Lalu dari tahun ke tahun peserta JKN dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dilakukan validasi sehingga penerima kartu BPJS dan KIS yang dibiayai oleh pemerintah tepat sasaran.

**Tabel 2.39 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	86	73,49	70,50	190,10	140,60	173,43
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	27.503	14.382	12.817	31.215	21.400	24.480
	Jumlah seluruh penduduk miskin	32.032	19.570	18.180	16.420	15.220	14.115

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

g) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Fasilitas kesehatan puskesmas dan pustu sudah baik, dari 11 kecamatan, saat ini sudah terdapat 13 puskesmas, sedangkan untuk Pustu, belum semua nagari memiliki Pustu.

**Tabel 2.40 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan puskesmas	91	109	109	118	118	118
	Jumlah Puskesmas	10	12	12	13	13	13
	Jumlah seluruh Kecamatan	11	11	11	11	11	11
2.	Cakupan pembantu puskesmas	88	83	83	85	85	85
	Jumlah Pustu	46	43	43	44	44	44
	Jumlah Desa / Kelurahan	52	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### 3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang memiliki 11 (sebelas) sub urusan, yaitu : Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang. Urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan pembangunan sebagian besar infrastruktur daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Jika ditinjau dari kondisi daerah serta dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (nasional dan provinsi) maka kebutuhan pembangunan untuk infrastruktur Dharmasraya masih membutuhkan penanganan yang masih besar. Tak heran sebagai daerah otonom yang relatif baru hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Untuk melihat perkembangan pembangunan yang ditinjau dari indikator kinerja untuk urusan pemerintahan bidang PUPR dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

#### - **Proporsi Jalan Mantap**

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang terdiri dari bidang kebina-margaan dan bidang ciptakarya. Pekerjaan yang terkait yaitu pembangunan jalan, jembatan, penanganan sampah, irigasi dan penataan lingkungan perumahan. Berdasarkan data dasar jalan, Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 3 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 60,62 km; jalan Provinsi panjang 83,50 km; jalan kabupaten 1035,72 km, sehingga panjang total jalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 1179,84 km.

**Tabel 2.41 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap	47,59	63,44	74,05	75,89	76,14	66,70
	Panjang jalan kondisi baik	623	860	874	895	898	787
	Panjang Jalan(Km)	1.308,9	1.356,00	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.180
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap ( > 40 KM/Jam )	42,49	52,23	83,01	83,01	86,39	86,71
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	505,7	632	860	860	895	898
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	1.189,9	1.210	1.036	1.036	1.036	1.036

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

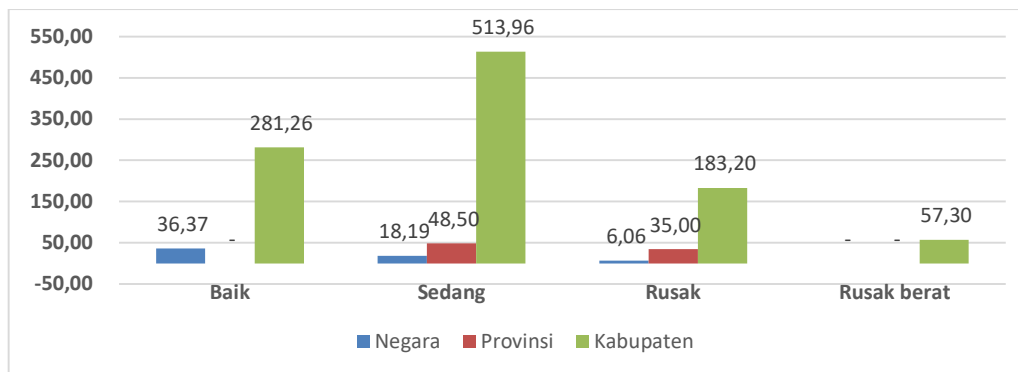
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

**Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014**

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	36,37	0	281,26	<b>317,63</b>
Sedang	18,19	48,50	513,96	<b>580,65</b>
Rusak	6,06	35,00	183,20	<b>224,26</b>
Rusak berat	0	0	57,30	<b>57,30</b>
<b>Total</b>	<b>60,62</b>	<b>83,5</b>	<b>1035,72</b>	<b>1179,84</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

**Gambar 2.6. Panjang Jalan Menurut Kondisi Dan Pemerintah Yang Berwenang**



- Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

**Tabel 2.43 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n/a	n/a	0,21	0,43	0,36	1,43
Jumlah daya tampung TPS (m3)	n/a	n/a	42	90	78	320
Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan rasio TPS perseribu penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kondisi jumlah TPS yang belum ideal. Idealnya 250 penduduk terdapat 1 (satu) TPS dalam bentuk kontainer dengan kapasitas 5 m<sup>3</sup>. Karena rasio tersebut membandingkan dengan jumlah penduduk tanpa membedakan penduduk wilayah perkotaan dan pedesaan, maka masih terdapat banyak kekurangan jumlah kontainer terutama wilayah di perkotaan.

#### **4. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman. Pembangunan tersebut meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak dan terjangkau yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Selain tiga bentuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas pada kawasan pemukiman, kab/kota juga memiliki kewajiban dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan pemukiman, dimana berdasarkan UU 23/2014 kewenangan kabupaten/kota adalah pada kawasan pemukiman yang memiliki luas kawasan kurang dari 10Ha serta termasuk penanganan kawasan pemukiman kumuh

Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi antara berbagai bentuk pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pemukiman, maka diharapkan dapat berdampak pada peningkatan indikator kinerja pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni, berkurangnya kawasan pemukiman kumuh, dan terciptanya lingkungan yang sehat dapat ditingkatkan.

#### **5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang ketertiban dan sub bidang kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketiga hal tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan daerah yang aman, nyaman sekaligus dapat menjadi daya tarik dalam menciptakan iklim investasi dan percepatan perekonomian daerah.

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk yang terdiri dari multietnis dan berbagai suku, hal ini terutama dipengaruhi oleh histori daerah yang memiliki kawasan transmigrasi, adanya migrasi penduduk tinggi serta terletak di jalur lintas sumatera, sehingga dengan potensi tersebut maka perlu menjaga iklim aman dan nyaman menjadi tantangan yang cukup menantang.

Pada sisi kebencanaan, Dharmaraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana

yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Untuk itu hal yang perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketanggungan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau.

## 6. Bidang Sosial

Perkembangan indikator bidang sosial di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terlihat positif yang terlihat adanya percepatan, hal ini terlihat dari peningkatan persentase PMKS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun persentase penanganan terhadap PMKS. Masyarakat penderita masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih banyak di Kabupaten Dharmasraya. Bantuan sosial yang diberikan setiap tahunnya cenderung naik, sehingga jumlah cakupan PMKS juga menurun. Saat ini telah ada panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 3 buah, Namun dari segi cakupan pelayanan yang rendah tahun 2014 maka sejalan dengan kegiatan pembangunan maka diperlukan program-program kemandirian sehingga para PMKS dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat dan hidupnya lebih mandiri. Ini memerlukan program pembinaan dengan kader-kader pembina sosial yang perlu ditingkatkan jumlahnya.

**Tabel 2.44 Indikator Bidang Sosial  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	3	3	3	3	3
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	n/a	30,34	27,05	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	n/a	850	1.827	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	n/a	2.802	6.755	12.835	12.835	12.835
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	n/a	13,34	17,34	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg tertangani	n/a	1.078	1.400	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg ada	n/a	8.078	8.076	12.835	12.835	12.835

Sumber : Dinas SosP3aPPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

## A.2. Bidang Layanan Urusan Wajib Non Dasar

### **1. Bidang Tenaga Kerja**

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan kerketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

**Tabel 2.45 Indikator Bidang Tenaga Kerja  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	persentase tenaga kerja yang tersalurkan	8,86	8,74	9,87	8,64	8,34	6,73

Sumber : Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### **2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan keterwakilan perempuan dan politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan prosesnya di pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan dilakukan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Sedangkan untuk perlindungan anak dan perempuan dilakukan agar tersedianya sistem perlindungan anak dari berbagai kekerasan terhadap anak serta perlakuan lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak perempuan dan kelompok marginal

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terjadi kenaikan kasus pada Tahun 2015 sedangkan yang tertangani semakin sedikit.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, KDRT dapat ditangani seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat KDRT lagi

dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa KDRT ini merupakan puncak gunung es yang sewaktu-waktu dapat meletus. Oleh sebab itu bidang yang menangani harus proaktif melakukan sosialisasi akan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 2.46 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	43,62	46,23	52,2	47,73	47,47
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	82,40	82,40	83,04	77,87	73,51
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.434	2.434	2.453	2.453	2573
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	170	268	265	249	224
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	5.030				
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
5.	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,01	0,01	0
	Jumlah KDRT	8	8	5	7	4
	Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373	49.877	59.490
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	n/a	83	79	52	32
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	n/a	35	74	25	7
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	n/a	54	94	48	56

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan terjadinya penurunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2011-2015 menjadi 67,66%, sedangkan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami fluktuasi. Dilihat berdasarkan data rasio KDRT dari tahun 2011-2015 juga mengalami penurunan begitu juga dengan tingkat penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 menjadi 32 kasus.

### 3. Bidang Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sudah menjadi isu nasional untuk ditetapkan areanya. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Bendungan Batanghari dengan debit 30.000 meter kubik diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Oleh sebab itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi areal LP2B. Saat ini telah terinventarisir 2079, 4 Ha lahan yang terpetakan untuk dijadikan LP2B, 4698,5 Ha yang sudah terdata, sehingga ada 2590,3 Ha lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dari 33.766

Ha lahan potensi yang bisa dikembangkan dari lahan kering dan rawa. Penetapan ini nantinya dikukuhkan melalui perda. Oleh sebab itu perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mensosialisasikannya.

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Pangan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan Energi Protein perkapita	80,68	81.22	81.09	81.09	237,67
3	Ketersediaan Informasi Pasokan harga	100	97.52	100	100	100
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100	97,52	100	100	109,35
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	20	100	100	100	0

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Dalam mengukur konsumsi dan tingkat kualitas pangan tersermin dari skor pola pangan harapan (PPH), angka ini mengukur kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan relatif meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2011. Asupan pangan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh konsumsi pangan padi-padian dan ini tidak dianjurkan, namun ke depan lebih dianjurkan akan mengarah pada penganeka ragam pangan, sehingga konsumsi beras perkapita setiap tahunnya bisa dikurangi dan mengarah pada standar yang diharapkan sesuai rekomendasi widyakarya nasional pangan dan gizi.

#### 4. Bidang Pertanahan

Kepastian akan hak tanah bagi masyarakat merupakan salah satu unsur keamanan, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat beberapa kasus pertanahan membutuhkan penanganan yang baik, namun kasus tersebut makin lama makin menurun. Oleh sebab itu bidang pertanahan harus proaktif dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikasi lahan bagi masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi program nasional, karena masih terdapat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Pertanahan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,07	1,23	0,93	0,91	1,98	0,22
	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	125	2.433	1.892	1.907	4.286	499
	Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n/a	33	33	60	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang diselesaikan	n/a	4	4	3	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang terdaftar	n/a	12	12	5	3	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### 5. Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian, perlu mendapat perhatian utama dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	n/a	n/a	0,95	1,78	1,81	2,07
	Volume sampah yang ditangani (ton)	n/a	n/a	1.860	3.720	3.840	4.416
	Volume produksi sampah (ton)	n/a	n/a	195.435	209.520	211.637	213.776
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		100	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi		1	1	1	1	6
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL		1	1	1	1	6
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			0,21	0,43	0,36	0,43
	Jumlah daya tampung TPS (m3)			42	90	78	96
	Jumlah penduduk			204.480	210.689	216.905	223.112
4.	Penegakan hukum lingkungan		100	100	77,78	60,00	100
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda		4	6	7	3	7
	Jumlah kasus lingk.yang ada		4	6	9	5	7

Jika dilihat dari indikator lingkungan hidup, salah satu sumber pencemaran adalah besarnya volume sampah yang tidak tertangani. Walaupun kondisinya volume sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, namun masih diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi volume sampah akhir dalam bentuk kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga jumlah pada Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) akan semakin berkurang. Dimasa yang akan datang perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup perlu penanganan 3R yang terpadu dikembangkan di setiap kecamatan.

Penegakan hukum lingkungan juga menjadi hal yang sudah menjadi perhatian perangkat daerah, tahun 2011 dengan jumlah 4 kasus lingkungan tertangani seluruhnya, walaupun tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi penurunan penyelesaian kasus, namun di tahun 2015 semua kasus kembali tertangani dengan baik.

#### **6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jenis layanan yang dilaksanakan untuk bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengeluarkan 4 (empat) jenis dokumen kependudukan, diantaranya Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Keempat dokumen ini menggambarkan peristiwa penting bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan adanya terdatanya status kependudukan ini akan memperjelas kondisi dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan.

Mulai tahun 2016, data kependudukan ini juga akan dijadikan data dasar yang berhubungan dengan kependudukan misalnya jumlah penduduk, penduduk berdasarkan kelompok umur, dsb. Dalam pelaksanaannya maka perangkat daerah yang melaksanakan bidang ini dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keagamaan Kabupaten Dharmasraya khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Hal ini guna pemutakhiran data terkait dengan data bidang kependudukan.

**Tabel 2.50 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	n/a	80	91	99	100
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	88,00	89,00	91,00	91,00	90,93
	Jumlah penduduk usia>17 yang berKTP	115.885	119.613	123.230	124.450	125.266
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah	131.688	134.397	135.418	136.758	137.758
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	218,08	6,04	8,62	11,18	13
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	8.433	12.358	18.158	24.245	28.187
	Jumlah penduduk	3.867	204.480	210.689	216.905	223.112
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada	ada	Ada	ada	ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Pelayanan identitas warga negara berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio penduduk yang memiliki KK dan KTP di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun kepemilikan KK sudah mencapai 100 persen di tahun 2015, namun kepemilikan KTP belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama yang baru memasuki umur 17 tahun untuk mengurus kepemilikan KTP, namun demikian terjadi peningkatan rasio kepemilikan KTP dari tahun 2011 sebesar 88 % meningkat hingga tahun 2015 telah mencakup sebanyak 90,93%. Hal ini ditunjang oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

Namun pada penerbitan akta kelahiran masih menunjukkan angka yang rendah. Hal tersebut karena masih rendahnya keinginan masyarakat melakukan pencatatan akta kelahiran. Dimasa yang akan datang sosialisasi pentingnya akta kelahiran termasuk akta kematian sebagai data dasar kependudukan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi negara khususnya keakuratan data kependudukan.

## 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 63 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibina hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di perdesaan.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu hamil, balita dan bayi saat ini berjumlah 257 buah. Posyandu sangat penting artinya bersama sarana kesehatan lainnya untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi serta gizi buruk. Pada tahun 2015 jumlah posyandu aktif sebanyak 77% dan yang tidak aktif sebanyak 23%. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan yang pada sebagian wilayah di Kabupaten Dharmasraya masih dirasa kurang.

**Tabel 2.51 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1	1	1	1
	Jumlah kelompok binaan LPM		52	52	52	52	52
	Jumlah LPM		52	52	52	52	52
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		n/a	0,05	0,05	0,05	0
	Jumlah kelompok binaan PKK		n/a	3	3	3	3
	Jumlah PKK		n/a	63	63	63	63
3.	PKK aktif (%)		n/a	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif		n/a	63	63	63	63
	Jumlah PKK		n/a	63	63	63	63
4.	Posyandu aktif (%)		n/a	59	74	77	77
	Jumlah Posyandu aktif		n/a	152	190	198	198
	Jumlah posyandu		n/a	257	257	257	257

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

## 8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya angka kelahiran, maka diperlukan koordinasi antara penyuluh KB dan tenaga kesehatan di nagari termasuk sosialisasi pentingnya KB.

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional (uu 52 2009)

Peserta KB yang tidak mendapat pelayanan (*unmet need*) masih banyak terdapat. Oleh sebab itu peran kader dan penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) terutama mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkala maupun secara mandiri.

Keluarga sejahtera, keluarga pra sejahtera I jumlahnya semakin menurun namun masih dalam persentase yang tinggi. Oleh sebab itu program-program yang terkait dengan pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.52 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,29	1,12	1,19	1,02	1,10
	Jumlah anak	63.326	53.899	61.511	53.816	61.511
	Jumlah keluarga	48.990	47.989	51.540	52.881	56.071
2.	Rasio akseptor KB	83	129,18	77,01	68,41	65,30
	Jumlah akseptor KB	28.968	48.948	31.690	30.572	31.690
	Jumlah pasangan usia subur	34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
3.	Cakupan peserta KB aktif	15,37	18,90	15,68	14,44	13,30
	Jumlah peserta program KB aktif	5.363	7.163	6.454	6.454	6.454
	Jumlah pasangan usia subur	34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26,63	28,73	27,72	16,04	15,13
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	13.047	13.788	14.287	8.484	8.484
	Jumlah keluarga	48.990	47.989	51.540	52.881	56.071

Sumber : Dinas SOSP3APKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

## 9. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terkait dengan kelancaran arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas yang tinggi seiring dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya menuntut Bidang perhubungan menyediakan rambu-rambu dan peraturan untuk keselamatan para penumpang, pengemudi dan pejalan kaki. Dengan adanya kelengkapan rambu-rambu tersebut, pemeriksaan secara reguler faktor keamanan berlalu lintas terutama kendaraan yang melaju di jalan negara, provinsi dan kabupaten bersama-sama kepolisian diharapkan bisa menekan angka kecelakaan sekaligus mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah (uu 22 2009).

**Tabel 2.53 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus kecelakaan lalu lintas	60	75	100	73	63	
	Meninggal	34	54	39	31	25	
	Luka berat	27	37	103	52	53	
	Luka ringan	51	46	110	79	64	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

## 10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini terkait dengan bidang-bidang lainnya sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, hal ini menjadi muatan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

### 11. Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi (uu 17 2012). pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Terkait dengan arah kebijakan nasional bahwa koperasi dan UKM dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, maka koperasi yang aktif setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahun 2011 semakin meningkat. Kesadaran untuk hidup bersama secara gotong royong menumbuhkan semakin banyaknya koperasi yang aktif kembali. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam pembinaan. Namun dari jumlah koperasi yang ada belum setengahnya yang aktif, sehingga dimasa yang akan datang jika benar-benar koperasi menjadi soko guru perekonomian maka kegiatan untuk mengaktifkan kembali koperasi dengan manajemen yang baik perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.54 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi aktif	30	32	34	45	47
	Jumlah koperasi aktif	52	57	64	87	93
	Jumlah seluruh koperasi	176	179	186	194	200

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Dilihat dari tabel di atas, perkembangan jumlah koperasi dari 176 unit di tahun 2011 menjadi 200 unit koperasi di tahun 2015. Seiring dengan perkembangan ekonomi daerah dan pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah, juga terlihat dari penambahan jumlah koperasi aktif dari 52 unit menjadi 93 unit di tahun 2015. Dengan demikian persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan dari 30 persen di tahun 2011 menjadi 47 persen di tahun 2015

Sajalan dengan cukup berkembangnya perekonomian daerah maka Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdata sampai tahun 2014 adalah sebanyak 2.419 buah. Jumlah ini tetap/stagnan dari tahun 2013. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UMKM yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UMKM dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data.

## 12. Bidang Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat pesat yang dibuktikan dengan pembangunan oleh pihak swasta melebihi pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pada lokasi-lokasi strategis yaitu di kiri-kanan jalan negara. Potensi Dharmasraya dengan kendala lahan yang kecil menyebabkan Dharmasraya sangat diminati oleh para investor terutama dalam bidang pertanian, dan jasa. Penanaman modal dimasa yang akan datang diharapkan muncul dari berbagai komponen masyarakat dalam bentuk ventura maupun sharing dengan pihak-pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat berupa koperasi dan badan usaha milik desa/nagari.

Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (uu 25 2007)

**Tabel 2.55 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/ Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai realisasi investasi	41.539.451.000.	50.764.331.000	288.567.107.000	144.240.000.000
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	30	14	11

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

## 13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan (uu 3

2005). Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2011 sampai 2015. Ke depan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunann dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.56 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah organisasi pemuda	2	2	2	2	2
2.	Jumlah organisasi olahraga	18	24	24	32	32
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	5	6	6	6
4.	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	12	12	12
5.	Jumlah lapangan olahraga	100	100	100	88	78

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

#### 14. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya. sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.57 Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada

2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada
----	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### 15. Bidang Persandian

Bidang persandian merupakan bidang urusan pemerintahan yang lahir berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang persandian bertujuan untuk Pengamanan Informasi pemerintah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan mulai tahun 2017.

### 16. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sjarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan bidaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya

**Tabel 2.58 Indikator Bidang Kebudayaan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	2	3	3	4	4
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	n/a	2	3	3	3	3
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	46	46	46	46	46
	Total Benda, situs & kawasan	46	46	46	46	46	46

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	yang dimiliki daerah						

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

### 17. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengindikasikan Budaya membaca saat ini kurang. Hal ini terasa dengan semakin sedikitnya waktu yang digunakan untuk membaca terutama anak-anak dan remaja dibanding waktu yang digunakan untuk hal lain terutama gadget dan teknologi informasi. Keberadaan pustaka yang menarik bagi anak-anak dan remaja maupun dewasa dan orang tua penting artinya dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat. Saat ini jumlah kunjungan-kunjungan ke perpustakaan daerah sangat rendah. Walaupun terjadi peningkatan dalam kunjungan pada tahun 2015. Oleh sebab itu koleksi buku, faktor pelayanan di perpustakaan, dan kenyamanan selama diperpustakaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.59 Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		1,49	1,42	1,33	11,54	1,25
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun		448	426	614	5.333	16.232
	Jumlah orang dalam populas iyg harus dilayani		300	300	462	462	13.000
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		8.755	8.755	9.704	9.074	10.075

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### 18. Bidang Kearsipan

Pengelolaan bidang kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Kantor Perpusataan dan Arsip Daerah. perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 2 perangkat daerah. Dalam Hal ini bukan berarti perangkat daerah lainnya belum sepenuhnya mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan kata lain penyimpanan dilakukan di perangkat daerah masing-masing, oleh

sebab itu bidang kearsipan strategi agar seluruh perangkat daerah dapat mengelola arsip secara baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 2.60 Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan/Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Pengelolaan arsip secara baku	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	89,19
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	2	2	2	33
	Jumlah perangkat daerah	37	37	37	37	37	37
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	0	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 5,41% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya menjadi 89,19% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan adanya sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini hanya 4 (empat) perangkat daerah yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

## **B. Layanan Urusan Pilihan**

### **1. Bidang Pariwisata**

Kepariwisataan masih belum berkembang secara baik di Kabupaten Dharmasraya. Namun di sisi lain Dharmasraya memiliki Potensi-potensi wisata, apabila dikembangkan dapat menjadi daya dukung dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, terutama wisata sejarah, wisata budaya dan wisata alam. Diantara kegiatan kepariwisataan yang dapat dikembangkan yaitu membuka akses ke objek wisata potensial serta mengadakan event budaya yang didukung oleh masyarakat yang multietnis. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama di kiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

### **2. Bidang Pertanian**

Perkembangan bidang pertanian dapat dilihat dari nilai dan kontribusi produk yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto bidang pertanian menampilkan jumlah produksi pertanian bari berbagai sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa

pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dicermati bahwa nilai produksi setiap sub sektor selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dikarenakan faktor ekstenfikasi atau intensifikasi pertanian karena pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan.

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang berkendala misalnya kawasan lindung sangat sedikit terdapat di Dharmasraya. Sumber daya lahan telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari tabel kontribusi terlihat bahwa sumbangan setiap sub sektor hampir sama setiap tahun, namun jika dibanding dengan sektor lainnya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan jumlah produksi pada masing-masing sub sektor sekaligus konsentasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang

- sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2010 sampai tahun 2015. Langkah menetapkan lahan pangan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmasraya sebagai lumbung padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.61 Produksi dan Konsumsi Beras  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Keterangan		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produksi</b>							
-	Produksi GKP(ton)	58.065	50.367	59.892	54.943	61.839	70.169
-	Konversi GKP-GKG %	86,02	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%
-	Produksi GKG	49.948	42.721	50.800	46.602	52.452	59.517

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Konversi GKG-beras	62,74 %	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- Produksi beras	31.337	26.803	31.872	29.238	32.908	37.341
<b>Konsumsi lokal</b>						
- Jumlah penduduk	192.10 0	198.273	198.273	210.686	216.905	223.112
- Tingkat konsumsi beras/ tahun(kg)	110	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (ton)	21.056	21.810	21.810	23.175	23.860	24.543
<b>Surplus/defisit beras</b>	10.281	4.993	4.993	4.993	9.049	12.798

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

- sub sektor perkebunan

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

**Tabel 2.62 Produksi komoditi Perkebunan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015 (ton)**

Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Karet	28.237,9 8	39.974,5 8	34.160,26	34.876,83	34.739,35	32.784,5
Sawit	371.413, 19	400.822, 76	360.079,2 7	313.955,5 7	349.285,3 1	74.020
Coklat	603,66	716,85	894,76	1.124,52	1.148,30	1.208,04

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2017

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

- sub sektor peternakan

Dari delapan komoditi sub sektor peternakan, hampir semua komoditi mengalami perkembangan populasi positif, dan hanya itik yang tidak terjadi pengurangan. Perkembangan sapi potong didorong oleh berkembangnya integrasi sapi-sawit serta adanya berbagai skim kredit dari perbankan dan juga didukung kebijakan pemerintah

untuk terus mendorong perkembangan sapi. Untuk populasi ayam petelur maupun buras juga terjadi peningkatan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peternakan ayam, khususnya ayam pedaging.

**Tabel 2.63 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Komoditi	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata tumbuh
1	Sapi potong	Ekor	36.293	26,945	31,449	34,593	39,512	40,785	7.42%
2	Kerbau	Ekor	12	4,402	4,881	3,476	5,716	5,973	7.14%
3	Kambing	Ekor	11.804	12,496	14,845	15,405	16,204	15,574	4.93%
4	Domba	Ekor		187	195	215	277	312	13.37%
5	Ayam Buras	Ekor	67.637	97,357	104,194	126,197	134,774	139,485	8,65 %
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	n/a	10,352	26,793	28,334	25,500	44,000	65%
7	Ayam Ras Pedaging	Ekor	477.640	3,478,800	2,720,082	3,531,798	4,737,000	4,301,600	4.73%
8	Itik	Ekor	n/a	32,033	20,100	17,785	18,410	18,948	-8.17%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### 3. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang sekitar 12 s/d 13 % terhadap total PDRB pada tahun 2010 sampai 2015 atau kontribusinya mengalami kenaikan kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya (lihat tabel berikut). Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevilalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.64 Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	12,38	12,61	12,68	12,63	13,09
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	552.251	638.893	724.191	814.887	905.204	1.017.072
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.294	6.429.082	7.169.488	7.769.922

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

#### 4. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2011 sampai 2015 meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan yang lebih tinggi dari jumlah PDRB keseluruhan, sehingga kontribusi sektor industri terlihat menurun. Perkembangan industri hilir berbahan baku sumber daya alam yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya perlu didorong sehingga terjadi peningkatan nilai tambah yang besar dari kegiatan hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.65 Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan Industri.	12	11	53	n/a	2
	Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)	30	30	306	n/a	14
	Jumlah Industri s/d Tahun n	245	275	581	581	595
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	19	13	17	48	42
	Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	2	3	10	10
	Jumlah kelompok pengrajin	16	16	18	21	24

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, dan BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2017

Diantara produk spesifik yang dihasilkan dan dibina adalah Industri kecil dan menengah (IKM) yang memproduksi Batik Tanah liok, keripik tempe dan rendang paku. IKM makanan, dan

#### 5. Bidang Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Saat ini program tersebut sudah selesai dilakukan dan lokasi-lokasi transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya ke Pemerintah Kabupaten.

#### 6. Bidang Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup pesat, terlihat berdasarkan data pada tahun 2012 sebanyak 5.355 meningkat tajam hingga tahun 2014 menjadi 21.55 ton meski dibandingkan tahun berikutnya turun menjadi 19.909 ton. Pada indikator lainnya terlihat bahwa potensi perikanan darat sangat tinggi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah produksi perikanan terus meningkat. Walaupun belum memenuhi target namun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan). Seperti bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.66 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan	24	45	60	73	
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.533	5.355	11.348	21.565	19.909
	Target produksi ikan Daerah (Ton)	6.263	11.901	18.959	29.520	
2	Konsumsi ikan	96	95	100	97	99
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	19	20	20	23	23
	Target konsumsi Daerah (Kg)	20	21	21	23	24
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	18,14	6,02	3,95	2,54	1
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	338	343	467	561	340
	Jumlah produksi ikan di daerah	1.861	5.698	11.815	22.126	24.307

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

### **C. Fungsi Penunjang Urusan**

#### **1. Bidang Perencanaan Pembangunan**

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Dimana perencanaan pembangunan secara nasional maupun di daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan berdasarkan jangka waktunya, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), untuk daerah disebut dengan RPJP Daerah, dokumen ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, perodesasi dari RPJP adalah tahun 2005-2025
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); di daerah disebut dengan RPJM Daerah/ RPJMD, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Periode RPJMD ini sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.dan
- c. rencana pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan .untuk daerah dokumen ini disebut dengan Rencna Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD disusun setiap tahunnya. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi

Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Tabel 2.67 Indikator Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	belum	belum	belum	belum	belum	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

## 2. Bidang Keuangan

### 1) Opini BPK Terhadap laporan keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Laporan hasil pemeriksaan LKPD ini memiliki 4 (empat jenis), yaitu :

- a. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan

- b. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun

demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Tidak wajar (adversed opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

**Tabel 2.68 Opini BPK  
Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Opini BPK	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Badan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2017

Opini BPK terhadap laporan keuangan untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, jika di tahun 2010 opini BPK masih berupa Tanpa mengemukakan pendapat (TMP) atau disclaimer, sedangkan dari tahun 2011 sampai 2014 dinyatakan WDP, sedangkan untuk tahun 2015 sudah dinyatakan sebagai WTP. Artinya pengelolaan keuangan hingga pada proses pelaporan sudah memenuhi empat kriteria sebuah laporan keuangan.

2) Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk tahun anggaran berikutnya SILPA ini akan disebut sebagai SiLPA Tahun sebelumnya yang akan digunakan/dialokasikan untuk ini akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya pada

APBD pergeseran atau APBD perubahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atau disebut dengan LKPD yang telah diaudit (*audited*).

Faktor penyebab SiLPA terjadi sejak proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran. Dari sisi penganggaran, SiLPA terjadi karena senggangan anggaran (*budgetary slack*) baik di sisi pendapatan maupun belanja. Dalam penyusunan target pendapatan, senggangan anggaran terjadi karena penetapan target PAD relatif moderat yang dimaksudkan untuk mengamankan kepastian sumber pendanaan belanja daerah atau agar mendapatkan penilaian kinerja yang baik karena realisasi PAD lebih besar dari targetnya. Sedangkan senggangan belanja terjadi karena penetapan pagu belanja daerah yang optimis untuk mengantisipasi adanya pemotongan anggaran atau untuk mengakomodir adanya penerimaan lain yang salah satunya adalah SiLPA tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, SiLPA dari sisi pendapatan terjadi karena: a) realisasi PAD selalu melebihi target dari APBD-P b) realisasi Dana Perimbangan fluktuatif utamanya DBH pada akhir tahun; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang cenderung melebihi yang direncanakan serta adanya tambahan alokasi transfer yang bersifat spesifik dari Pemerintah pusat atau Provinsi yang tidak direncanakan sebelumnya pada pertengahan tahun anggaran. Pada sisi belanja, SiLPA dapat terjadi karena penyerapan belanja yang tidak maksimal disebabkan oleh: a) kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan; b) sumber daya manusia (jumlah dan kualitas relatif terbatas, frekuensi penggantian/rotasi pejabat cukup tinggi, beban volume pekerjaan terlalu besar, dan pilkada); c) tambahan alokasi DAK ditengah tahun anggaran berjalan dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan anggaran ditengah tahun anggaran berjalan; serta d) proses pelaksanaan lelang (gagal lelang, jangka waktu yang pendek, keterbatasan bahan baku, dan faktor musim). Sedangkan menumpuknya realisasi belanja daerah pada akhir tahun utamanya disebabkan karena pembayaran pekerjaan belanja modal yang pelunasannya dilakukan setelah pekerjaan selesai.

**Tabel 2.69 Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Persentase SILPA terhadap APBD	4.83	15.00	5.68	4.90	5.06	3.55
	Total SILPA (juta Rp)	21,910	71,740	30,961	28,493	34,455	28,425
	Total APBD (juta Rp)	453,188	478,352	544,859	581,131	681,316	800,456

Sumber : Badan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai SILPA cenderung menurun, meskipun terjadi kenaikan yang cukup besar di tahun 2011 sebesar 71 milyar rupiah lebih, namun untuk tahun berikutnya cenderung menunjukkan penurunan, baik dari segi jumlah maupun persentase terhadap APBD

3) Persentase Belanja Langsung dan Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap APBD

Belanja menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

- a. Belanja langsung (*Direct expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b. Sedangkan belanja tidak langsung (*Indirect expenditure*), merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

**Tabel 2.70 Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Belanja Langsung (BL) terhadap Total APBD	45.45	44.61	46.11	47.86	47.04	50.85
	Jumlah Belanja Langsung (juta Rp)	205,978	213,402	251,246	278,116	320,467	406,996
	Total APBD (juta Rp)	453,188	478,352	544,859	581,131	681,316	800,456
2	Persentase Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total APBD	55	55	54	52	53	49
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (juta Rp)	247,210	264,949	293,612	303,015	360,849	393,459
	Total APBD (juta Rp)	453,188	478,352	544,859	581,131	681,316	800,456

Sumber : Badan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Dilihat dari perkembangannya dari tahun 2010 hingga tahun 2015, dilihat dari jumlah alokasi belanja, baik BL maupun BTL menunjukkan kenaikan nilai, namun dilihat dari persentasenya, persentase kenaikan belanja langsung menunjukkan kecenderungan belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan BTL sehingga di tahun 2015 alokasi maupun persentase BL lebih besar dibandingkan dengan BTL.

4) Bagi hasil kabupaten/kota ke desa

**Tabel 2.71 Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota ke Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	-	3.59	3.03	-		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa (juta Rp)	-	17,196	16,516	-	-	-

Sumber : Badan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

5) Penetapan APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , pada pasal 116 ayat (2) menyatakan Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD ini diantaranya menjadi penilaian dalam berbagai kebijakan, diantaranya penilaian penilaian BPK RI terhadap LKPD maupun perhitungan alokasi untuk Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat.

**Tabel 2.72 Penetapan APBD Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penetapan APBD	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu
	Tanggal penetapan	5 Januari 2010	Desember 2010	30 Januari 2012	15 Januari 2013	19 Februari 2014	29 Januari 2015

Sumber : Badan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Berdasarkan tanggal penetapan APBD dari tahun 2010 hingga tahun 2015 jadwal penetapan APBD tepat waktu hanya terdapat pada tahun 2011, sedangkan yang lainnya belum tepat waktu karena penetapannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

### 3. Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Pembahasan terkait dengan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan meliputi persentase pejabat berdasarkan eselon yang mengikuti PIM II, PIM III, dan PIM IV dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73 Persentase pejabat yang Mengikuti PIM II, PIM III, dan PIM IV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015
1	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II	35.71	26.92
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon II	10	7
	Jumlah total jabatan eselon II	28	26
2	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III	36.43	38.58
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon III	47	49
	Jumlah total jabatan eselon III	129	127
3	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV	32.09	37.94
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon IV	112	118
	Jumlah total jabatan eselon IV	349	311
No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015
1	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II	35.71	26.92
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon II	10	7
	Jumlah total jabatan eselon II	28	26
2	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III	36.43	38.58
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon III	47	49
	Jumlah total jabatan eselon III	129	127
3	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV	32.09	37.94
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural eselon IV	112	118
	Jumlah total jabatan eselon IV	349	311

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

### 4. Bidang Pengawasan

Kewenangan pada bidang pengawasan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada pemerintah daerah melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Di sisi lain, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan di daerah, maka salah satu acuannya adalah dalam penilaian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), penilaian ini digunakan untuk mengukur kapabilitas auditor internal sektor publik atau disebut dengan tingkat kapabilitas APIP. Penilaian ini terdiri dari 5 level, yaitu ; level 1 (*initial*), level 2 (*infrastruktire*), level 3 (*integrated*), level 4 (*managed*) dan level 5 (*optimizing*).

**Tabel 2.74 Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2	2

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Dari tabel di atas, maka terlihat level penilaian BPKP terhadap APIP berada pada level 2 (*infrastruktire*)

## 5. Sekretariat Daerah

### 1) Evaluasi atas implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP Evaluasi merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai akhir dari penilaian evaluasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai AA untuk nilai tertinggi, hingga D untuk nilai evaluasi terendah. Adapun komponen yang dinilai dari evaluasi ini berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel di bawah :

**Tabel 2.75 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP**

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber : Permenpan No.12/2015

Hasil penilaian evaluasi atas implementasi AKIP Tahun 2016, Dharmasraya memperoleh nilai 60,46 atau nilai B, untuk itu ke depan

perlu penyempurnaan dalam berbagai bentuk administrasi pemerintahan maupun pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga ini akan berdampak pada kinerja secara keseluruhan. Dengan adanya pembagian kewenangan pemerintah kabupaten yang sudah dibagi habis ke semua perangkat daerah, selanjutnya perangkat daerah harus memiliki keterukuran terhadap kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja atau yang lebih khusus anggaran berbasis program prioritas dapat diwujudkan, dan penganggaran maupun pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2) Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah/ Nilai LPPD

Dalam rangka mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memanfaatkan hal yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. Oleh sebab itu perlu adanya penyelenggaraan evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EPPD). Tujuan utama dilaksanakan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah ( EKPPD) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terhadap seluruh provinsi, dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tujuan penilaian ini adalah untuk memotivasi daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik. Dasar Evaluasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 2.76 Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peringkat	Nomor	280	273	172	175	231
		Skor	2,0551	2,2170	2,3123	2,4841	2,4868
2	Status	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2017



# Bab III

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



# BAB III

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah yaitu **efektif, efisien, transparan dan akuntabel**.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan, sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu (realisasi APBD), sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, diantaranya ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Terkait dengan isu strategis bidang pengelolaan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana isu strategis ini terkait dengan aturan turunan terkait yang akan muncul yang akan mengatur mengenai kebijakan keuangan maupun penganggaran di masa mendatang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan diatur melalui undang-undang
- (2) supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK,
- (3) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (4) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah
- (5) pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (6) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (8) Dana desa dan alokasi dana desa yang akan mengalami kenaikan secara signifikan hingga tahun 2019.

### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Bagian ini menjelaskan mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja serta pembiayaan daerah selama periode 2010 sampai dengan tahun 2015. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan nilai APBD, realisasi APBD terhadap perubahan APBD, serta proporsi APBD.

##### **a. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Secara keseluruhan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 432,48 milyar di tahun 2010 menjadi 794,42 milyar di tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar 361,93 Milyar.

**Tabel 3.1.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

Kode Rek	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>432.488.449.352</b>	<b>505.671.150.963</b>	<b>518.496.319.806</b>	<b>595.137.456.697</b>	<b>687.279.316.499</b>	<b>794.425.975.047</b>	<b>16,74</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>25.541.706.459</b>	<b>34.511.853.042</b>	<b>39.200.742.610</b>	<b>32.902.332.260</b>	<b>52.811.257.415</b>	<b>56.694.339.206</b>	<b>24,39</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	4.051.589.756	5.809.882.466	6.351.542.897	6.846.731.838	10.419.529.313	10.643.026.951	32,54
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	10.248.647.179	10.961.396.172	11.438.254.287	12.229.401.811	24.150.243.783	7.148.667.913	-6,05
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.068.043.895	5.115.188.436	4.777.943.948	5.618.214.642	5.144.409.428	4.793.094.913	11,25
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.173.425.629	12.625.385.968	16.633.001.478	8.207.983.969	13.097.074.891	34.109.549.429	63,46
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>333.450.451.531</b>	<b>363.128.458.014</b>	<b>417.947.507.976</b>	<b>482.875.326.556</b>	<b>543.756.231.129</b>	<b>604.520.411.648</b>	<b>16,26</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.789.530.331	27.826.375.150	30.096.431.976	27.939.498.556	27.747.425.470	23.905.825.648	-3,95
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	266.175.621.200	297.587.682.864	351.295.616.000	400.374.128.000	445.128.175.659	477.807.496.000	15,90
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	37.485.300.000	37.714.400.000	36.555.460.000	54.561.700.000	70.880.630.000	102.807.090.000	34,85
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73.496.291.362</b>	<b>108.030.839.907</b>	<b>61.348.069.220</b>	<b>79.359.797.881</b>	<b>90.711.827.955</b>	<b>133.211.224.193</b>	<b>16,25</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	884.890.220	1.883.418.650	3.449.929.943	2.088.016.102	45,32
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.162.451.460	27.330.301.147	26.158.425.000	26.810.898.000	29.600.639.012	39.477.535.091	28,85
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.245.639.902	78.722.818.760	34.304.754.000	43.740.254.000	53.281.259.000	86.570.673.000	10,25
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	88.200.000	1.977.720.000	-	6.925.227.231	4.380.000.000	5.075.000.000	1.130,79

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

## 1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Besaran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat dijadikan ukuran kemandirian fiskal, jika semakin tahun semakin besar peranan PAD maka tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan maupun sumber lain akan semakin berkurang.

Dilihat dari perkembangan nilai PAD dari tahun 2010 hingga tahun 2015, nilai PAD cenderung mengalami kenaikan, meski pada tahun 2013 terlihat adanya penurunan dibanding tahun 2012. Jika pada tahun 2012 nilai PAD tercatat sebesar 39,2 milyar rupiah naik menjadi 56,69 milyar di tahun 2015 atau naik sekitar 17,49 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 24,39%.

- **hasil pajak daerah**, secara definisi, berdasarkan UU 28/2009 bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.

Dilihat dari perkembangan terakhir, di tahun 2015 dari 13 jenis pajak yang dilaksanakan, hanya 2 jenis pajak yang mencapai tingkat realisaasi tinggi di atas 90%, yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi cukup besar yaitu 72,8% terhadap total pajak daerah , sedangkan 9 jenis pajak lainnya masih realisasinya berada di bawah 50%. Pada jenis pajak lain, seperti PBB-P2 dari 3,62 milyar yang ditargetkan hanya terealisasi sebesar 1,54 milyar atau sebesar 42,63%, maka untuk meningkatkan jumlah serta capaian PBB-P2 maka pada tahun 2016 pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB-P2, diharapkan dengan adanya pendataan ulang tersebut maka akan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan besaran PBB-P2 ke depannya. Bukan hanya PBB-P2, diharapkan jenis pajak lain juga didata agar capaian realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

- **hasil retribusi daerah**, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dilihat dari perkembangannya, nilai penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 nilainya terus mengalami kenaikan dari 10,24 milyar menjadi 24,15 milyar, namun di tahun 2015 turun drastis, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan status Puskesmas dan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengelolaan keuangannya, dari sisi penerimaan jika sebelumnya dihitung sebagai jenis retribusi pelayanan kesehatan pada retribusi jasa umum berpindah rekening menjadi pendapatan BLUD pada lain-lain PAD yang sah.

Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target yang telah ditetapkan bisa dikatakan bagus, terutama pada objek jasa umum dan retribusi perizinan tertentu masing-masing 94,9 % dan 105,64% (melampaui target) sedangkan pada jasa usaha nilai capaiannya cukup baik sebesar 77,82%. Meskipun demikian masih terdapat jenis retribusi yang mengalami realisasi rendah yaitu retribusi parkir dan retribusi rumah potong hewan yang realisasinya juga di bawah 50%.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, sumber pendapatan berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyertaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR. Jumlah bagian laba yang diperoleh daerah cukup fluktuatif bervariasi antara 4,77 milyar hingga 5,62 milyar. Selain mengharapkan laba, penyertaan modal yang dilakukan daerah dapat mendorong berkembangnya sektor riil melalui pinjaman produktif masyarakat baik melalui perorangan serta UMKM yang ada di Dharmasraya
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, jenis pendapatan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Perkembangan nilai lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan jenis PAD yang lain cukup dominan dan selalu lebih 3 (tiga) sumber PAD lainnya. Nilainya pun cenderung mengalami kenaikan, dari 8,17 milyar di tahun 2010 naik menjadi 34, 11 milyar di tahun 2015.

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dilhat dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, meskipun nilai dana perimbangan terus meningkat, namun proporsinya cenderung menurun, jika di tahun 2010 sebesar 77,10%, terakhir di tahun 2015 naik menjadi 76,10%. Artinya tingkat ketergantungan Dharmasraya terhadap dana pusat semakin berkurang. Besaran alokasi dana perimbangan mulai tahun 2015 ditetapkan melalui peraturan presiden setelah UU APBN ditetapkan.

- **DBH pajak/bukan pajak**, DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Pendapatan daerah dari DBH mulai tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami penurunan, turunnya penerimaan daerah dari DBH salah satunya dipicu oleh turunnya harga minyak dunia yang menyebabkan menyebabkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) Migas yang akan dibagikan turun cukup signifikan, begitu pula beberapa komponen lain DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah DBH PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak bumi dan bangunan, dan DBH migas. Penurunan terbesar terjadi pada DBH migas dari Rp 42 triliun rupiah menjadi Rp 17 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan pada APBN perubahan tahun 2015 Anggaran DBH turun menjadi Rp 112,6 triliun dari sebelumnya Rp 127,7 triliun.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Begitu juga dengan proporsi DAU antara provinsi dengan kab/kota masing-masing 10% dan 90%.

Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan

penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.07/2016, kapasitas fiska Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah kategori sedang yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,81. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU mulai tahun 2016, bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan data penduduk dari BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil.

Sesuai dengan peningkatan iklim ekonomi nasional maupun realisasi APBN, maka penerimaan DAU yang diterima oleh Dharmasraya dari tahun ke tahun juga terus meningkat, rata-rata meningkat sekitar 15,90% tiap tahunnya, di tahun 2010 nilainya sebesar 266,17 milyar rupiah meningkat menjadi 477,8 milyar rupiah di tahun 2015. Namun persentase kenaikan di tahun 2015 maupun tahun 2016 kenaikan DAU tidak sebesar tahun sebelumnya karena pemerintah mulai memperbesar alokasi untuk dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga proporsi DAU secara keseluruhan juga terpengaruh.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Program/kegiatan pada bidang DAK diusulkan oleh Bappeda melalui aplikasi e-Musrenbang yang dikooordinasikan oleh Bappenas dan Bappeda Provinsi yang selanjutnya dibahas secara teknis pada forum Musrenbang provinsi selanjutnya forum Musrenbangnas.

Dilihat dari alokasi DAK yang diterima Dharmasraya selalu meningkat sesuai dengan usulan yang disetujui pusat. Tahun 2010 nilainya masih berada pada angka 37,48 milyar rupiah meningkat pesat menjadi 102,8 milyar rupiah di tahun 2015.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2010 sampai 2015 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

- **Pendapatan hibah**, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya. Nilainya pendapatan hibah dari tahun 2012 hingga tahun 2014 selalu meningkat, namun di tahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Faktor penyebabnya adalah turunnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan sawit yang mendominasi industri dan perkebunan besar di Dharmasraya.
- **Bagi hasil pajak dari provinsi**, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu : pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok . perkembangan penerimaan bagi hasil dari provinsi selalu meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari 29,6 milyar menjadi 39,47 milyar, atau naik hampir 10 milyar rupiah, hal ini didorong oleh perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, baik kendaraan baru maupun kendaraan mutasi dari luar daerah.
- **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. alokasi dana penyesuaian tersebut yang telah ada yaitu penyaluran tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, bantuan keuangan kepada desa/nagari dalam bentuk dana desa. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana

alokasi khusus (DAK). Kebijakan ini secara nasional akan diberlakukan sesuai dengan roadmap dana desa 2015-2019 sesuai dengan kebijakan pusat dalam meningkatkan dana desa secara signifikan akan berdampak pada peningkatan dana penyesuaian yang akan diterima. Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.

- **Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya**, merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengalikasinya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari poerkembangannya maka besaran dana ini cukup fluktuatif, . alokasi terbesar tercatat di tahun 2013 sebesar Rp 6,92 milyar dan kondisi 2015 tercatat sebesar Rp 5,07 milyar.

Selama periode Tahun Anggaran 2010–2015, realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan terjadi peningkatan, yaitu di tahun 2010 mencapai 94,76, dan di 2011 menjadi 95,72, dan mulai tahun 2012 angka ini cukup tinggi berkisar antara 97 s/d 98%, namun hal ini belum diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal terlihat dari masih rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah atau masih berada di bawah 10%, yaitu dari 5,91% di tahun 2010 meningkat hingga 7,14% di tahun 2015, namun pada dana perimbangan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 77,10 persen di tahun 2010, sempat naik menjadi 81,14 persen di tahun 2013 namun angka ini kembali turun menjadi 76,10 persen di tahun 2015. Perubahan proporsi ini lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari. proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah :

**Tabel 3.2 Proporsi Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan (Persen)**

Kode Rek	Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.	Pendapatan asli daerah	5,91	6,82	7,56	5,53	7,68	7,14
4.2.	Dana perimbangan	77,10	71,81	80,61	81,14	79,12	76,10
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	16,99	21,36	11,83	13,33	13,20	16,77
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Melihat masih kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih berada di bawah 10%, meskipun terlihat proporsinya cenderung meningkat hingga tahun 2015, oleh sebab itu dibutuhkan berbagai strategi dan usaha ke depan agar PAD dapat meningkat secara proporsional melalui :

(1) Intensifikasi pendapatan daerah

Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber pendapatan daerah
  - b. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak
  - b. Melaksanakan inventarisasi pemutahiran data objek dan subjek pajak dan retribusi.
  - a. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Supremasi Hukum), terutama terkait dengan pendapatan daerah
  - b. Pelaksanaan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan adanya pembayaran tepat waktu
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
  - d. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PAD.
- (2) Extensifikasi, strategi ini dilakukan melalui penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

**b. Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Jumlah belanja daerah yang teralisasi hingga tahun 2015 nilainya selalu meningkat, dibandingkan dengan tahun 2010 hanya sebesar Rp 453,18 milyar, di tahun 2015 sudah naik menjadi 800,45 milyar dengan tingkat realisasi keuangan berkisar 93 hingga 94 persen dari belanja yang dianggarkan. Dilihat dari struktur belanja daerah, persentase belanja tidak langsung (BTL) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 masih melebihi 50%, atau berada di kisaran 52 hingga 54% dari total belanja yang ding dilakukan. Atau dengan kata lain belanja program kegiatan lebih kecil dari belanja pendukung yang dilaksanakan oleh daerah pemerintah daerah. Tapi di tahun 2015 proporsi belanja langsung melebihi dari belanja tidak langsung, masing-masing terealisasi sebesar 406,99 miliar untuk belanja langsung dan 393 untuk BTL. adanya kecenderungan meningkatnya belanja langsung

dibandingkan dengan BTL memberikan semakin baiknya kinerja daerah dalam pengalokasian anggaran sehingga ini mengindikasikan APBD semakin efektif atau mampu dalam mencapai tujuan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang dilakukan mulai tahun 2015 adalah pelaksanaan anggaran berbasis akrual.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

Kode Rek.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>453.188.540.605</b>	<b>478.352.253.109</b>	<b>544.859.577.070</b>	<b>581.131.015.967</b>	<b>681.316.609.306</b>	<b>800.456.674.229</b>	<b>15,33</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>247.210.332.939</b>	<b>264.949.605.042</b>	<b>293.612.592.158</b>	<b>303.015.014.882</b>	<b>360.849.544.710</b>	<b>393.459.759.449</b>	<b>11,83</b>
5.1.1.	Belanja pegawai	211.747.733.756	221.719.545.209	253.510.960.388	273.158.637.933	301.815.811.433	330.596.248.085	11,23
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	2.097.503.462	703.743.183	-	-	
5.1.4.	Belanja hibah	19.509.940.000	22.064.665.900	20.948.211.000	4.128.945.126	28.121.032.781	13.899.139.000	(5,75)
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	2.815.433.183	3.521.459.808	420.000.000	3.764.305.000	1.559.300.000	-	(11,15)
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	12.863.226.000	17.196.152.000	16.516.963.308	20.644.815.000	29.345.949.496	48.415.994.946	55,28
5.1.8.	Belanja tidak terduga	274.000.000	447.782.125	118.954.000	614.568.640	7.451.000	548.377.418	20,03
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>205.978.207.666</b>	<b>213.402.648.067</b>	<b>251.246.984.912</b>	<b>278.116.001.085</b>	<b>320.467.064.596</b>	<b>406.996.914.780</b>	<b>19,52</b>
5.2.1.	Belanja pegawai	22.655.637.850	25.249.272.866	27.427.063.416	31.360.230.631	27.101.036.900	2.537.167.000	(17,76)
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	71.126.957.561	75.183.862.443	78.317.826.078	89.631.458.145	109.747.275.954	139.913.157.469	19,34
5.2.3.	Belanja modal	112.195.612.255	112.969.512.758	145.502.095.418	157.124.312.309	183.618.751.742	264.546.590.311	27,16

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

Tabel 3.4. Persentase proporsi belanja daerah berdasarkan jenis belanja

Kode Rek	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>54,55</b>	<b>55,39</b>	<b>53,89</b>	<b>52,14</b>	<b>52,96</b>	<b>49,15</b>
5.1.1.	Belanja pegawai	46,72	46,35	46,53	47,00	44,30	41,30
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	0,38	0,12	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	4,31	4,61	3,84	0,71	4,13	1,74
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	0,62	0,74	0,08	0,65	0,23	-
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	2,84	3,59	3,03	3,55	4,31	6,05
5.1.8.	Belanja tidak terduga	0,06	0,09	0,02	0,11	0,00	0,07
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>45,45</b>	<b>44,61</b>	<b>46,11</b>	<b>47,86</b>	<b>47,04</b>	<b>50,85</b>
5.2.1.	Belanja pegawai	5,00	5,28	5,03	5,40	3,98	0,32
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	15,69	15,72	14,37	15,42	16,11	17,48
5.2.3.	Belanja modal	24,76	23,62	26,70	27,04	26,95	33,05

### c. Pembiayaan daerah dan Silpa tahun berjalan

- **Pembiayaan daerah**, Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dikelola oleh daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung menurun. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman sebesar 22,15 milyar rupiah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan tahun 2011, namun di sisi lain di tahun yang sama terdapatnya nilai silpa yang cukup besar yaitu Rp 71,74 milyar rupiah, sehingga dengan adanya silpa yang besar tersebut terlihat adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya di tahun 2012 dan tahun 2013 daerah melakukan pembayaran pokok hutang sebesar 11,075 milyar rupiah per tahun.
- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Berkenaan**, meskipun di tahun 2011 tercatat Silpa sebesar 71,74 milyar rupiah, namun secara umum nilai Silpa dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan penurunan, dengan adanya penurunan nilai Silpa ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas belanja daerah.

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>42.610.246.896</b>	<b>44.421.303.329</b>	<b>57.325.034.679</b>	<b>14.486.777.418</b>	<b>28.493.218.148</b>	<b>34.455.925.341</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>42.610.246.896</b>	<b>44.421.303.329</b>	<b>71.736.034.683</b>	<b>30.961.777.414</b>	<b>28.493.218.148</b>	<b>34.455.925.341</b>
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	42.610.246.896	22.271.303.329	71.736.034.683	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	22.150.000.000	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.411.000.004</b>	<b>16.474.999.996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	3.336.000.000	5.400.000.000	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	11.075.000.004	11.074.999.996	-	-
<b>Silpa Tahun Berkekaan</b>	<b>21.910.155.643</b>	<b>71.740.201.183</b>	<b>30.961.777.414</b>	<b>28.493.218.148</b>	<b>34.455.925.341</b>	<b>28.425.226.159</b>

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Ketiga unsur dari neraca tersebut dapat disajikan dalam suatu persamaan seperti dibawah :

$$Aset = Kewajiban + ekuitas$$

Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah baik berupa pendapatan ataupun dalam bentuk penghematan belanja. Sedangkan kewajiban/hutang merupakan yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. kewajiban adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Unsur ketiga dari neraca yaitu ekuitas, ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah, dengan kata lain ekuitas meruoakan nilai selisih antara aset dengan kewajiban.

Berikut dapat ditampilkan perkembangan aset, kewajiban dan ekutas daerah yang tercantum dalam neraca aset daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Neraca Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015 (rupiah)**

Kode Rek.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata pertumbuhan(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>861.513.153.505</b>	<b>1.023.868.708.780</b>	<b>1.133.474.055.787</b>	<b>1.323.627.965.536</b>	<b>1.463.957.910.212</b>	<b>1.867.848.423.389</b>	<b>23,36</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>29.392.234.234</b>	<b>77.981.168.926</b>	<b>38.428.383.711</b>	<b>44.455.930.649</b>	<b>72.425.857.365</b>	<b>85.282.734.140</b>	<b>38,03</b>
1.1.1	Kas	21.966.918.332	71.817.797.203	31.054.692.502	29.191.250.057	35.483.827.861	28.600.793.386	6,04
1.1.3	Piutang	-	1.583.252.317	1.183.630.304	3.367.520.609	17.790.566.707	23.174.765.758	340,94
1.1.4	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-	8.872.125.390	
1.1.5	Persediaan	7.425.315.902	4.465.119.406	6.077.560.908	11.767.076.650	19.042.595.345	24.635.049.605	46,35
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>15.836.000.000</b>	<b>21.236.000.000</b>	<b>21.236.000.000</b>	<b>21.236.000.000</b>	<b>18,61</b>
1.2.2	Investasi Permanen	11.000.000.000	12.500.000.000	15.836.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	18,61
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>821.120.919.271</b>	<b>933.183.219.854</b>	<b>1.070.881.341.357</b>	<b>1.203.312.859.967</b>	<b>1.353.065.031.062</b>	<b>1.740.092.188.043</b>	<b>22,38</b>
1.3.1	Tanah	95.657.991.000	98.836.794.010	99.575.994.010	107.456.894.477	104.167.863.528	605.374.946.762	106,57
1.3.2	Peralatan dan Mesin	103.502.067.496	122.590.111.040	131.768.879.029	155.855.770.473	152.795.095.773	57.212.301.138	(8,94)
1.3.3	Gedung dan Bangunan	188.167.407.483	205.631.739.033	225.848.808.074	288.912.420.630	418.808.695.579	438.897.394.752	26,65
1.3.4	Jalan, Jaringan dan instalasi	358.336.702.104	389.012.646.238	510.327.234.131	522.068.098.026	615.429.279.334	544.860.267.012	10,41
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	4.237.092.706	9.713.118.606	10.305.312.276	10.894.669.716	8.092.950.997	14.946.795.569	50,55
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	71.219.658.482	107.398.810.927	93.055.113.837	118.125.006.645	53.771.145.851	78.800.482.810	2,13
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>204.320.000</b>	<b>8.328.330.719</b>	<b>54.623.174.920</b>	<b>17.231.021.785</b>	<b>21.237.501.206</b>	<b>2.573,56</b>
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	287.907.729	#DI/0!
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	-	204.320.000	204.320.000	204.320.000	663.645.000	1.928.470.576	210,96
1.5.5	Aset Lain-lain	-	-	8.124.010.719	54.418.854.920	16.567.376.785	19.021.122.901	44,71
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>45.059.776</b>	<b>32.689.073.358</b>	<b>22.131.773.073</b>	<b>13.561.168.032</b>	<b>22.156.020.315</b>	<b>40.997.130.881</b>	<b>18.176,78</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>45.059.776</b>	<b>20.884.969.191</b>	<b>22.131.773.073</b>	<b>13.561.168.032</b>	<b>15.067.857.858</b>	<b>29.051.701.688</b>	<b>12.874,74</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	45.059.776	32.918.747	2.538.617.378	5.860.118.458	15.022.872.004	7.301.405.683	3.220,76
2.1.2	Utang Bunga	-	2.083.330.556	729.104.167	-	-	-	
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	29.799.554	-	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	18.768.719.888	18.864.051.528	7.693.719.888	-	-	

Kode Rek.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata pertumbuhan(%)
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	19.462.232	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	7.329.686	15.186.300	2.827.311.745	
2.1.xx	utang belanja						18.903.522.028	
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	11.804.104.167	-	-	7.088.162.457	11.945.429.193	0,24
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	11.804.104.167	-	-	7.088.162.457	11.945.429.193	0,24
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	861.468.093.729	991.179.635.422	1.111.342.282.714	1.310.066.797.504	1.441.801.889.897	1.826.851.292.508	<b>22,41</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	861.513.153.505	1.023.868.708.780	1.133.474.055.787	1.323.627.965.536	1.463.957.910.212	1.867.848.423.389	<b>23,36</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat, perkembangan aset pemerintah Kabupaten Dharmasraya meningkat, hal ini terlihat dari peningkatan nilai aset dari 861 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 1.86 trilyun rupiah di tahun 2015, atau nilainya meningkat rata-rata sebesar 23,36% per tahunnya. Bagian aset terbesar adalah ada pada aset tetap, baik dalam bentuk tanah, bangunan, Jalan, Jaringan dan instalasi maupun bentuk aset tetap penunjang operasional kegiatan pemerintah seperti peralatan dan mesin. Sebagian dari aset ini merupakan hibah dari kabupaten induk, maupun bentuk hibah dari pemerintah pusat, provinsi maupun pihak ketiga, sedangkan sumber peningkatan nilai aset ini juga berasal dari belanja yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Dharmasraya sendiri dalam bentuk belanja, khususnya belanja modal serta belanja lainnya yang mempengaruhi nilai aset. dalam hal pengelolaan aset, dengan berbagai upaya dalam optimalisasi pendataan dan penganan nilai aset juga memberikan pengaruh dalam nilai aset yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui konsolidasi dengan pengelola aset yang berada di perangkat daerah. Sehingga pada beberapa kasus, teridentifikasi aset berdasarkan kondisinya diantaranya aset yang dalam kondisi rusak atau tidak dimanfaatkan lagi dan selanjutnya aset ini berubah dari aset tetap menjadi aset lainnya.

Sedangkan pada investasi jangka panjang, merupakan nilai aset yang dimiliki dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang berbentuk badan usaha, seperti bank nagari dan BPR yang ada di Dharmasraya. Sedangkan aset lancar merupakan aset yang memiliki liabilitas kurang dari 12 bulan atau dalam bentuk kas atau setara kas.

Pada kewajiban/hutang, juga terjadi peningkatan nilai, di tahun 2010 nilainya hanya sebesar 45 juta rupiah naik di tahun 2011 menjadi 32,68 milyar rupiah, di tahun 2015 nilainya sudah mencapai 29,05 milyar, meskipun nilainya setiap tahun tidak tetap atau mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jenis kewajiban pada masing-masing rincian pengeluaran yang harus dibayar pada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Selanjutnya pada ekuitas, nilai ekuitas berasal dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, sejalan dengan peningkatan nilai aset yang melebihi pertambahan kewajiban mengakibatkan kenaikan pada nilai ekuitas. Perkembangan nilai ekuitas dari tahun 2010 ke tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sekitar 22,41.

### **3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010 sampai tahun 2015 secara umum terlihat pada pelaksanaan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik didorong oleh adanya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun kebijakan yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang

sah. Maupun pengelolaan pembiayaan daerah. Penganggaran yang baik, akan menghasilkan tekstur keuangan yang ideal dan optimal untuk dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang ada di lapangan guna pencapaian target pembangunan. Oleh sebab itu azas pokok yang perlu dicapai dalam penganggaran ini adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin efisien penganggaran daerah maka akan semakin efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

### 3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 s/d 2015 sebagaimana tergambar dari pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka PAD memiliki sumber utama yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain pajak dan retribusi daerah juga terdapat lain-lain PAD yang sah. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah juga telah didukung oleh regulasi daerah dalam bentuk pertauran daerah diantaranya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah serta beberapa peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang retribusi daerah. Selain didasari oleh peraturan yang ada, juga telah dilakukan berbagai upaya dan strategi lainnya seperti peningkatan kemampuan SDM pengelola pendapatan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

#### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat/APBN. Meskipun perkembangan dana perimbangan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun hal ini tidak sepenuhnya ditentukan kebijakan pusat dalam pengalokasiannya ke daerah, tapi juga ditentukan oleh upaya daerah dalam berbagai bentuk, dalam rangka optimalisasi penerimaan dana pusat juga membutuhkan berbagai upaya agar dana ini selalu dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya adalah :

- Optimalisasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi mengenai berbagai data teknis dan potensi wilayah yang ada serta kebutuhan informasi lainnya ke pemerintah pusat, serta pemberlakuan reward and punishment terhadap penggunaan DBH tahun sebelumnya
- Untuk besaran dana Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah ditentukan oleh pusat berdasarkan perkembangan APBN sesuai dengan

rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, capaian nilai IPM dan indikator lain yang ditentukan untuk setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah akan menerima jumlah dan ayang berbeda sesuai dengan perkembangan indikator-indikator tersebut

- Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK), besaran dana DAK ini ditentukan oleh penyediaan data teknis serta usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Dimana setiap tahunnya kriteria ini mengalami perubahan sesuai dengan prioritas pembangunan tahunan nasional. Penyampaian usulan dan data teknis ini dilakukan melalui Musrenbang provinsi, dan Musrenbang Nasional serta aplikasi e-musrenbang yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten, Bappeda Provinsi, dan Bappenas melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga disini selain Bappeda, peran aktif perangkat daerah terkait juga sangat menentukan besaran alokasi dana yang akan diterima.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selama periode 2010 hingga 2015, jenis pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan hibah yang diterima daerah berasal dari hibah yang diterima dari pihak perusahaan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dimana perusahaan besar tersebut sebagian besar bergerak pada perkebunan sawit, CPO dan pengolahan karet, berdasarkan realisasi tahun 2010 hingga tahun 2015, pendapatan hibah terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,45 milyar rupiah. Besarnya pendapatan hibah ini dipengaruhi oleh komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan pendapatan hibah ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang ada

Selain hibah, bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan. Seiring dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, maka hal ini juga berdampak pada penambahan kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, hal ini juga memberikan pengaruh pada penerimaan daerah dalam bagi hasil pajak yang diterima dari tahun ke tahun. baik dari kendaraan baru maupun kendaraan yang dibea balik nama-kan.

### 3.2.2. Kebijakan belanja daerah

Dilihat dari strukturnya, belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja, besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya :

- Mengutamakan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perangkat daerah serta belanja bagi hasil ke pemerintah nagari
- 

**Tabel 3.7. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur**

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (RP)	Persentase
2010	234.403.371.606	453.188.540.605	51,72
2011	246.968.818.075	478.352.253.109	51,63
2012	280.938.023.804	559.270.577.074	50,23
2013	304.518.868.564	597.606.015.963	50,96
2014	328.916.848.333	681.316.609.306	48,28
2015	333.133.415.085	800.456.674.229	41,62

Berdasarkan tabel di atas, meskipun terjadi peningkatan dalam belanja aparatur, namun persentasenya relatif menurun, hal ini disebabkan oleh perubahan belanja belanja daerah melebihi perubahan belanja aparatur

- Pelaksanaan belanja berbasis kinerja (performance based), meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja/ pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada RPJMD periode tahun 2010-2015.
- Pemenuhan alokasi alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pemenuhan alokasi 20 % untuk pendidikan, 10% untuk pendidikan serta pendampingan dana DAK yang diterima daerah setiap tahunnya sebesar 10% dari total DAK yang diterima.
- Mulai tahun 2015, maka salah satu kewajiban daerah sudah diarahkan untuk pencapaian alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan (tidak termasuk dana DAK), dimana alokasi dana desa ini disalurkan ke nagari melalui bantuan keuangan kepada pemerintah nagari.

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015 penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, kecuali di tahun 2011 penerimaan melakukan pinjaman daerah sebesar 22,15 milyar rupiah. Sedangkan di tahun 2012 dan tahun 2013, dengan adanya pinjaman daerah di tahun 2011 tersebut, maka pembayaran dilakukan secara berturut-turut sebesar 11,075 milyar.

**Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	432.102.068.105,83	505.671.150.962,70	518.496.319.805,68	595.137.456.696,83	687.279.316.499,12	794.425.975.047,00
	<b>Dikurangi realisasi:</b>						
2	Belanja Daerah	440.411.330.448,83	478.352.253.109,00	528.342.613.762,00	560.486.200.967,00	652.470.659.806,00	752.811.152.229,10
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	42.610.246.896,00	-	14.411.000.004,00	16.474.999.996,00	-	-
	<b>Defisit riil</b>	<b>34.300.984.553,00</b>	<b>27.318.897.853,70</b>	<b>4.564.706.047,68</b>	<b>51.126.255.725,83</b>	<b>34.808.656.693,12</b>	<b>41.614.822.817,90</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

**Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dharmasraya  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.7. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Dharmasraya

No.	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	21.437.758.553		71.740.201.182		30.961.777.414		28.493.218.148		34.455.925.341,33		26.192.157.703,23	
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.204.471.971,33	44,13	(17.786.835.772,77)	(67,9)
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.075.000.000,00	19,4
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	10.195.324.770,00	29,59	26.733.569.175,00	102,1
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	9.056.128.600,00	26,28	12.170.424.301,00	46,47

### **3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN (2016 S/D 2021)**

Berdasarkan kajian pengelolaan keuangan masa lalu (2010 s/d 2015) baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun terkait dengan kebijakan provinsi dan nasional, maka proyeksi kerangka pendanaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Proyeksi kerangka pendanaan (APBD)  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (rupiah)**

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>875.675.582.523</b>	<b>949.023.480.859</b>	<b>962.862.866.327</b>	<b>1.004.996.082.652</b>	<b>1.008.961.514.247</b>	<b>1.013.175.770.597</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>56.933.112.486</b>	<b>98.937.393.388</b>	<b>80.085.859.652</b>	<b>90.085.859.652</b>	<b>90.085.859.652</b>	<b>90.085.859.652</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	11.559.896.340	14.933.091.579	20.945.543.535	27.125.755.718	27.125.755.718	27.125.755.718
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	4.769.475.393	4.186.557.034	3.869.348.325	5.158.665.000	5.158.665.000	5.158.665.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.216.462.837	3.834.414.130	3.860.967.792	4.641.438.934	4.641.438.934	4.641.438.934
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.387.277.916	75.983.330.645	51.410.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>740.796.803.359</b>	<b>696.906.890.931</b>	<b>721.410.440.413</b>	<b>778.168.930.000</b>	<b>780.781.948.665</b>	<b>783.630.267.956</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.848.086.374	13.255.794.542	26.825.860.482	22.168.133.000	22.168.133.000	22.390.368.533
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	507.913.222.000	501.682.277.000	501.889.284.000	522.603.733.000	525.216.751.665	527.842.835.423
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	210.035.494.985	181.968.819.389	192.695.295.931	233.397.064.000	233.397.064.000	233.397.064.000
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.945.666.678</b>	<b>153.179.196.540</b>	<b>161.366.566.262</b>	<b>136.741.293.000</b>	<b>138.093.705.930</b>	<b>139.459.642.989</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.985.265.456	18.084.129.959	30.515.600.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.193.537.622	37.301.045.581	38.096.135.262	37.695.000.000	38.071.950.000	38.452.669.500
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357.315.000	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000	98.521.755.930	99.506.973.489
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.409.548.600	950.000.000	32.005.800.000			
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>881.881.597.921</b>	<b>935.591.361.565</b>	<b>964.654.491.196</b>	<b>1.019.750.378.094</b>	<b>1.023.389.887.876</b>	<b>1.026.676.078.058</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>437.899.543.451</b>	<b>424.581.618.937</b>	<b>480.174.173.841</b>	<b>526.631.854.415</b>	<b>529.554.858.826</b>	<b>532.122.394.121</b>

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	354.263.312.919	316.349.165.221	361.068.202.766	393.800.097.340	395.938.181.966	397.917.872.876
5.1.2.	BELANJA BUNGA	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	BELANJA HIBAH	4.449.045.681	5.621.217.579	10.894.200.000	10.347.800.000	10.347.800.000	10.347.800.000
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	184.000.000	250.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	-	846.609.246	1.367.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	78.594.649.851	101.202.853.891	105.094.771.075	116.983.957.075	117.568.876.860	118.156.721.245
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	592.535.000	377.773.000	1.500.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>443.982.054.470</b>	<b>511.009.742.628</b>	<b>484.480.317.355</b>	<b>501.906.869.531</b>	<b>504.406.655.421</b>	<b>506.263.930.026</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	863.191.206	481.418.000	781.620.000	50.236.608.200	50.236.608.200	50.236.608.200
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.774.170.270	240.093.762.321	255.739.788.119	208.046.791.823	209.143.761.801	210.046.191.224
5.2.3.	BELANJA MODAL	266.344.692.994	270.434.562.307	227.958.909.236	243.623.469.508	245.026.285.420	245.981.130.602
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>-6.206.015.398</b>	<b>13.432.119.294</b>	<b>-1.791.624.869</b>	<b>-23.542.641.294</b>	<b>-25.000.000.000</b>	<b>-25.210.553.550</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>26.192.157.703</b>	<b>18.215.305.576</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>23.542.641.294</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.210.553.550</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>26.192.157.703</b>	<b>21.931.305.576</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>23.542.641.294</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.210.553.550</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.192.157.703	21.931.305.576	31.647.424.869	23.542.641.294	25.000.000.000	25.210.553.550
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	<b>3.716.000.000</b>	-	-	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	3.716.000.000	-	-	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Silpa	1.945.163.270					
<b>6.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>21.931.305.575</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>29.855.800.000</b>	-	-	-
				3,09%	0,86%	1,03%	1,14%

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>875.675.582.523</b>	<b>949.023.480.859</b>	<b>933.120.523.165</b>	<b>951.234.152.412</b>	<b>970.216.869.301</b>	<b>1.007.868.291.809</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>56.933.112.486</b>	<b>98.937.393.388</b>	<b>84.694.947.165</b>	<b>90.085.859.652</b>	<b>87.373.651.672</b>	<b>89.686.756.255</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	11.559.896.340	14.933.091.579	21.238.831.048	24.966.772.393	22.979.170.931	24.128.129.477
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	4.769.475.393	4.186.557.034	4.265.148.325	7.147.648.325	7.505.030.741	7.880.282.278
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.216.462.837	3.834.414.130	3.860.967.792	4.641.438.934	5.500.000.000	5.775.000.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.387.277.916	75.983.330.645	55.330.000.000	53.330.000.000	51.389.450.000	51.903.344.500
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>740.796.803.359</b>	<b>696.906.890.931</b>	<b>714.429.482.000</b>	<b>761.204.261.760</b>	<b>776.476.985.079</b>	<b>808.198.450.678</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.848.086.374	13.255.794.542	18.537.327.000	16.874.635.000	18.562.098.500	30.231.959.240
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	507.913.222.000	501.682.277.000	502.298.085.000	502.298.085.000	509.832.556.275	517.480.044.619

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	210.035.494.985	181.968.819.389	193.594.070.000	242.031.541.760	248.082.330.304	260.486.446.819
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.945.666.678</b>	<b>153.179.196.540</b>	<b>133.996.094.000</b>	<b>99.944.031.000</b>	<b>106.366.232.550</b>	<b>109.983.084.876</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.985.265.456	18.084.129.959	2.200.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.193.537.622	37.301.045.581	39.041.263.000	37.695.000.000	39.579.750.000	41.558.737.500
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357.315.000	96.844.021.000	60.749.031.000	60.749.031.000	63.786.482.550	64.424.347.376
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.409.548.600	950.000.000	32.005.800.000	-	-	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>881.881.597.921</b>	<b>935.591.361.565</b>	<b>963.767.948.034</b>	<b>948.734.152.412</b>	<b>969.216.869.301</b>	<b>1.006.868.291.809</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>437.899.543.451</b>	<b>424.581.618.937</b>	<b>485.111.598.920</b>	<b>516.138.077.921</b>	<b>517.756.366.142</b>	<b>530.924.025.295</b>
5.1.1.	Belanja pegawai	354.263.312.919	316.349.165.221	366.655.727.845	367.441.290.567	387.153.366.142	396.832.200.295
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	4.449.045.681	5.621.217.579	10.794.200.000	6.550.000.000	6.550.000.000	6.550.000.000
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	-	184.000.000	184.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
5.1.6.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	846.609.246	1.200.000.000	2.027.707.790	-	-
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	78.594.649.851	101.202.853.891	104.777.671.075	104.777.671.075	119.553.000.000	122.541.825.000
5.1.8.	Belanja tidak terduga	592.535.000	377.773.000	1.500.000.000	5.900.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>443.982.054.470</b>	<b>511.009.742.628</b>	<b>478.656.349.114</b>	<b>432.596.074.491</b>	<b>451.460.503.159</b>	<b>475.944.266.513</b>
5.2.1.	Belanja pegawai	863.191.206	481.418.000	697.928.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	176.774.170.270	240.093.762.321	222.711.399.166	215.148.623.066	220.922.799.322	231.316.310.263
5.2.3.	Belanja modal	266.344.692.994	270.434.562.307	255.247.021.948	216.647.451.424	229.637.703.837	243.627.956.250
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>-6.206.015.398</b>	<b>13.432.119.294</b>	<b>-30.647.424.869</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
							0
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>26.192.157.703</b>	<b>18.215.305.576</b>	<b>30.647.424.869</b>	<b>-2.500.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>26.192.157.703</b>	<b>21.931.305.576</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.192.157.703	21.931.305.576	31.647.424.869	-	-	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>3.716.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	3.716.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Silpa	1.945.163.270					
<b>6.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>21.931.305.575</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# *Bab IV*

## **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**



# BAB IV

## ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis terkait dengan permasalahan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari Isu global, nasional dan regional akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Isu-isu strategis ditelaah dari permasalahan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini yang akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dan akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD ini, karena menjadi dasar utama dalam menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama jabatan bupati dan wakil bupati. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perumusan dan Identifikasi permasalahan pembangunan lebih utama mengangkat analisa permasalahan pembangunan yang dianalisa berdasarkan capaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya.

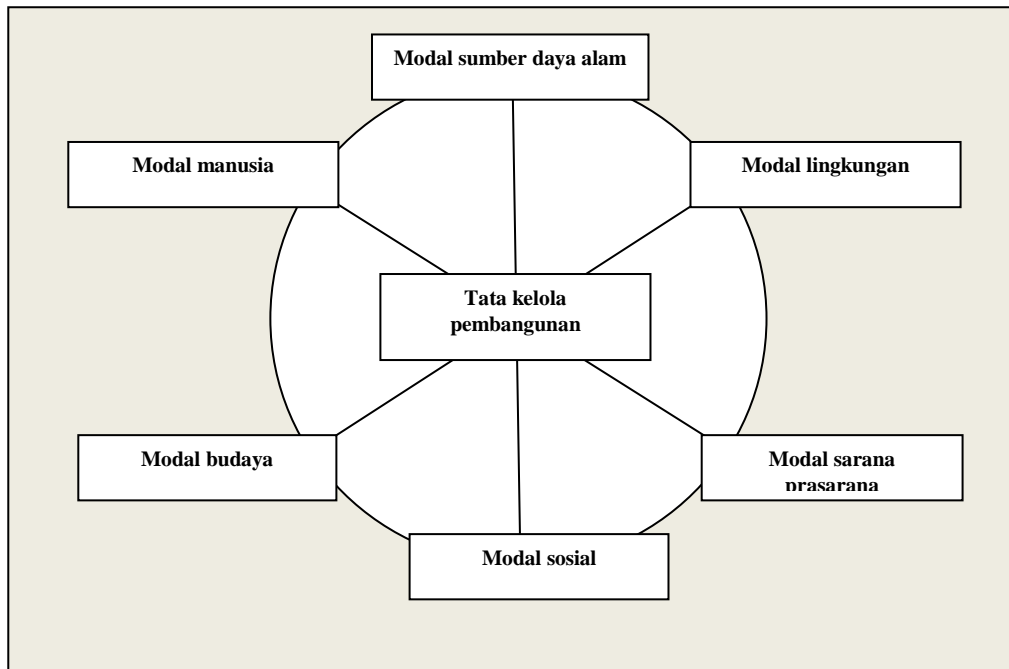
Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantaraan berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.
- d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamadan bersifat tangible berupa peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya, manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.
- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang

lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

**Gambar 4.1: Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)**



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan dengan demikian bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada Bab 2 dan kondisi yang ada saat ini antara lain :

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya**

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	<b>Indikator makro</b>			
	<b>IPM</b>			
	masih relatif rendahnya IPM daerah dibanding provinsi dan nasional	<b>kab</b> 69,84 (2015) <b>prov</b> 69,98 (2015) <b>nasional</b> 69,55 (2015)	relatif masih rendahnya IPM Kab. Dharmasraya dibandingkan IPM Provinsi Sumbar, Namun berada di atas IPM Nasional. masih relatif rendahnya capaian indikator pada bidang pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Sumatera Barat	perlu langkah percepatan pembangunan dalam sektor pendidikan
	<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>			
	melambatnya pertumbuhan PDRB	6,50 (2013) 6,24 (2014) 5,80 (2015) 5,34 (2016)	hal ini disebabkan dominan oleh adanya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian yang memegang peran cukup besar sekitar 10,58% dari nilai PDRB ADHK, selanjutnya juga adanya pertumbuhan yang melambat disektor industri pengolahan (3,5%) dan sektor pengadaan listrik dan gas (1,93%) perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak perlambatan perkembangan ekonomi secara nasional/regional	perlu mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor dominan untuk mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor industri, khususnya skala usaha IKM mikro yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pelatihan dan fasilitasi kredit IKM/UKM

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	PDRB perkapita Dharmasraya berada di bawah nasional	34,8 juta (2015), prov 34,1 (2015)nasional 35,1 juta (2015)	PDRB perkapita nasional Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata sumbar, namun berada di bawah PDB perkapita nasional	mendorong sektor-sektor dominan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
	ketimpangan pendapatan meningkat (Rasio GINI meningkat)	0,324 (2014) 0,356 (2015), prov 0,342 (2015) nasional 0,41 (2015)	meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk dharmasraya di tahun 2015 dibanding 2014, meski tergolong keimpangan rendah (dibawah 0,4), dan masih berada di bawah angka nasional maupun provinsi	membutuhkan skala prioritas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terutama dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin, malalui penanggulangan kemiskinan berdasarkan karakter kemiskinan penduduk
	naiknya persentase penduduk miskin	6,98 (2014), 7,17 (2015), prov 7,31(2015) nas 10,7 (2015)	adanya kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya, namun berada di bawah angka provinsi dan nasional	perlu strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan rencana aksi yang berpatokan kepada karakter kemiskinan yag dialami oleh masing-masing KK/jiwa

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
<b>URUSAN WAJIB</b>					
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
Bidang pendidikan					
		rendahnya APM maupun APK di tingkat SMP/MTs dibanding tingkat SD/MI	APK SD/MI 108,61 APK SMP/MTs 90,93 (2015)	relatif rendahnya capaian APK maupun APM di tingkat SMP/MTs jauh di bawah SD/MI	untuk meningkatkan APK dan APM SMP/MTs ini perlu didorong dengan peningkatan sarpras di tingkat SMP/MTs serta perlu adanya peningkatan mutu pendidikan
			APM SD/MI 100 APM SMP/MTs 78,33 (2015)	- adanya indikasi sebagian tamatan SD/MI melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ke luar daerah atau mengalami putus sekolah.	
		belum meratanya rasio guru/murid	Kec. Sungai rumbai 19,71, Kec. IX Koto 10,05	terdapat 6 kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan guru berada di bawah angka rata-rata kabupaten	menambah penyaluran tenaga pengajar/guru bagi sekolah yang masih belum memenuhi standar ketersediaan guru. Terlebih di kecamatan tiumang dan kec. IX Koto
		masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	<u>ARLS</u> : kab 8,29 prov 8,59 <u>HLS</u> : kab 12,39 prov 13,79	ARLS dan HLS merupakan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk menghitung IPM, kedua indikator ini berada di bawah rata-rata sumbar dan masih jauh dari target yang harus dicapai untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun	mendorong peningkatan ARLS dan HLS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan serta mutu pendidikan

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	<b>Bidang kesehatan</b>			
	tingginya angka kematian bayi (AKB)	AKB : Kab 20,15 Prov : 27	tingginya jumlah kematian bayi yang terjadi mulai tahun 2012 hingga tahun 2015, dan angka ini tergolong besar di sumbar	meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan rutin, serta peningkatan keterampilan tenaga medis terkait (khususnya bidan)
	turunnya rasio ketersediaan Posyandu tahun 2015 dibanding tahun 2012	2012 : 10,13 2015 : 9,34	tingginya angka kelahiran tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah Posyandu	penambahan jumlah Posyandu dan/ atau peningkatan pelayanan
	belum semua Puskesmas terakreditasi dan akreditasi RSUD	<u>Jumlah faskes :</u> puskesmas 14 unit, terakreditasi 0  RSUD 1 unit belum Terakreditasi	perlu dilakukan untuk untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui sebuah sistem perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan, serta penerapan manajemen risiko	melakukan penilaian dan fasilitasi terhadap penilaian Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
	masih ditemukannya balita gizi buruk	2011 : 101 org, 2015 : 14 org	masih ditemuinya balita gizi buruk meski angkanya relatif menurun.	pemberian makanan tambahan bagi balita khususnya yang berasal dari KK miskin
	adanya prevelensi stunting	189 jiwa	masih ditemukannya kasus prevelansi stunting	perlunya usaha penanggulangan kejadian prevelansi stunting dan peningkatan gizi balita

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
				terutama berasal dari keluarga miskin	
		belum adanya pemutakhiran data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan		penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin belum tepat sasaran	Perlunya verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI)
		masih ditemukannya kasus baru TB	188 kasus	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap PHBS	perlunya menjaga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui menjaga kebersihan lingkungan dan PHBS lainnya
		terjadinya KLB DBD	<u>Kasus :</u> 2013 : 109 jiwa 2014 : 35 jiwa <u>Meninggal :</u> 2013 : 1 meninggal 2014: 1 meninggal 2015 : 6 meninggal	KLB ini terjadi di tahun 2013, 2014 dan 2015	
		adanya kasus HIV/AIDS		Dharmasraya terletak di daerah perbatasan antara 3 provinsi dan lalu lintas nasional serta terdapatnya tempat hiburan malam	perlunya monitoring dan penyuluhan terhadap remaja dan pelaku hiburan malam untuk menjaga penularan danantisipasi penyakit HIV/AIDS
<b>Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>					
a	- pekerjaan umum				

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	menurunnya jalan kondisi mantap	76,14% (2014), 66,70% (2015)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volumen kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
	masih kurangnya Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap	86,71% (2015)	Adanya pembukaan jalan baru atau penambahan ruas baru jalan kabupaten dengan kondisi masih pengerasan	Perlunya peningkatan kualitas jalan
	masih rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan air minum/air bersih	2015 : 60,62%	Masih kurangnya pelayanan sistem penyediaan air minum karena sistem perpipaan masih dilayani oleh UPT SPAM di bawah Dinas PUPR serta sebagian dilayani oleh SPAM Perdesaan (PAMSIMAS)	Penguatan kelembagaan UPT SPAM dan perluasan jaringan perpipaan
	masih kurangnya pelaksanaan sanitasi layak	2015 : 71,03%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi ; sampah, air limbah, dan pemeliharaan drainase	Pembangunan drainase, sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaan limbah
	belum semua areal persawahan dialiri irigasi teknis dan adanya kerusakan jaringan irigasi	Luas sawah 6497 ha Belum dialiri irigasi 623 ha	Masih adanya sawah yang belum teraliri irigasi karena kondisi geografis dan kerusakan jaringan irigasi	Penambahan serta pemeliharaan jaringan irigasi sekunder dan tersier
b	- penataan ruang			

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	Dokumen Tata Ruang Yang Sudah legal hanya RTRW sementara untuk pembangunan dibutuhkan rencana tata ruang yang memiliki skala besar	1 perda RTRW 1 ranperda RDTR Pulau punjung	Belum ditetapkan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kesesuaian pemanfaatan ruang yang masih belum terakomodir mengingat rencana tata ruang masih skala kecil	Percepatan penetapan ranperda RDTR menjadi perda RDTR dan penyusunan RDTR pada kawasan cepat tumbuh serta peninjauan kembali terhadap RTRW pada tahun 2017
<b>Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>				
	masih terdapatnya rumah tidak layak huni	n/a	Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni	Pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program perumahan baik swadaya maupun bantuan sosial
	Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog)	n/a	Belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri yang disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah	Penyediaan rumah subsidi dan rusunawa serta keikutsertaan pemerintah daerah dalam program pembiayaan perumahan
	Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman	n/a	Belum tersedianya PSU pada beberapa kawasan permukiman dan perumahan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah, limbah domestik, drainase, dan jalan lingkungan	Pemenuhan secara bertahap sesuai daerah prioritas penanganan
	Masih adanya pemukiman kumuh		Masih terdapatnya kantong-kantong pemukiman/kawasan kumuh akibat keterbatasan PSU	Penanganan secara simultan melalui penyediaan PSU pada kantong-kantong kawasan kumuh maupun melalui

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
				keikutsertaan dalam program nasional KOTAKU
<b>Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>				
		Adanya kasus penyakit masyarakat		
		Kurangnya sarana dan prasanara pemadam kebakaran		
<b>Bidang sosial.</b>				
		belum seluruhnya PMKS yang tertangani	penyandang PMKS, diantaranya : 8.609 KK miskin, lansia 2.132 orang, penyandang disabilitas 606 orang, suku anak dalam 74 jiwa	penanganan hanya berkisar 13 s/d 74% dari PMKS yang ada sertameningkatnya kejadian bencana alam dan sosial meningkat
		data KK miskin yang masih belum seutuhnya akurat dan belum memperlihatkan karakteristik kemiskinan		masih kurangnya pemanfaatan data kemiskinan dalam perumusan kebijakan pembangunan
				merumuskan kebijakan pembangunan khusus pada pengurangan angka kemiskinan berdasarkan

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
				penyebab/karakternya dan updating data kemiskinan secara berkala
	belum memadainya prasarana dan sarana pada pelayanan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	2 panti asuhan	daya tampung panti asuhan yang melebihi dari kapasitas seharusnya	penambahan gedung dan sarana pendukung
	belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana	kejadian bencana 2015 : banjir 3 kali, kebakaran 5 kali, angin puting beliung 1 kali	Pengurangan dampak bencana dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pangan, penanganan gangguan kesehatan serta bantuan lainnya, baik berupa dana bantuan sosial maupun dari bentuk kegiatan di perangkat daerah terkait	pembentukan kampung/nagari siaga bencana, dan bantuan sosial
<b>urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</b>				
	Bidang tenaga kerja			
	angka partisipasi angkatan kerja cenderung menurun	69,21 (2010), 65,88 (2015)	pertumbuhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berada di atas pertumbuhan penduduk angkatan kerja, sehingga banyak lapangan kerja yang belum terisi	hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pemuda/pencari kerja sesuai dengan bakat dan lapangan kerja yang tersedia

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	tingkat pengangguran yang fluktuatif	berada pada kisaran 2,5 s/d 6,2%	naik turunnya jumlah pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya harga komoditi sub sektor perkebunan yang memegang peran cukup dominan dalam perekonomian daerah	menyediakan lapangan pekerjaan pada sektor yang memiliki prospek lebih baik dan konsisten terhadap perubahan gejolak ekonomi
<b>Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>				
	masih rendahnya indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)	<b>IPG</b> : 87,34(2012), 88,11(2013), 88,8 (2014) 88,29(2015). <b>IDG</b> 47,47 (2015)	hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman dan komitmen perspektif gender	melaksanakan program dan fokus pada kebijakan kesetaraan gender
	masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga	rata-rata 6 kasus /tahun (yang dilaporkan). Kejadian tahunan : 12 (2012, 70(2013), 32(2014) 16(2015)	masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat kepada perempuan	optimalisasi pengaduan KDRT dan perlindungan anak

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		masih terjadinya perkawinan usia muda dan seks pra nikah di kalangan remaja		adanya perkawinan usia muda berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga, sedangkan adanya perilaku seks pranikah cenderung menggambarkan kurangnya perhatian keluarga dan sikap masyarakat yang kurang kondusif terhadap hal ini	perlunya pencerahan dan sosialisasi akan bahaya seks pra nikah dan dampak menikah usia muda terhadap masa depan remaja dimasa akan datang
		menurunnya persentase perempuan di lembaga pemerintahan	2011 82,1, 2015 73,51	dari tahun 2011 hingga tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah sedikit mengalami kenaikan, namun jumlah pekerja perempuan di sektor swasta lebih menjanjikan dan menyerap lapangan pekerjaan lebih besar lagi dibanding ketersediaan instansi pemerintah	hal ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki prospek lapangan pekerjaan di sektor swasta dan mampu bersaing di sektor swasta
		menurunnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		banyaknya kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan belum dapat disejajarkan dengan penyelesaian kasus yang ada bahkan jumlahnya menurun	optimalisasi fungsi pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
<b>Bidang pangan</b>					
		masih terdapatnya daerah rentan dan rawan pangan	2015 xxx nagari rentan pangan, xxx nagari rawan pangan	rawan pangan disebabkan oleh adanya rumah tangga miskin	pemberian bantuan makanan pangan dan makanan tambahan kepada keluarga kurang mampu

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		belum adanya cadangan pangan daerah	xxx lumbung pangan	pembentukan cadangan pangan merupakan tuntutan dari PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi	pembentukan regulasi yang mengatur kemandirian pangan dan membentuk cadangan pangan
		masih tingginya konsumsi beras dan kurangnya keanekaragaman pangan	110 kg/orang/tahun (provinsi 2014)	masih tingginya konsumsi beras	melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergii seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari tingkat keluarga yang dilakukan melalui peningkatan peran PKK
Bidang pertanahan					
		Masih terdapatnya tanah pemerintah/pemerintah daerah yang belum bersertifikat			
		Belum seluruh tanah masyarakat memiliki sertifikat			
Bidang lingkungan hidup					
		tingginya tingkat pencemaran air sungai Batanghari		disebabkan oleh maraknya illegal mining di sepanjang aliran sungai Batanghari	koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan pencemaran sungai dan penanganan dampak pencemaran jangka panjang (kerusakan biotik sungai)

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. untuk kualitas air bersih /air minum yang berasal dari sumur belum memenuhi baku mutu air kelas I untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi		Pengelolaan limbah cair domestik yang masih belum terkelola dengan baik, sehingga terjadinya rembesan ke sumber air tanah. Masih banyak rumah tangga yang belum menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair domestik rumah tangga dan membuang ke saluran/ perairan terbuka.	Perlu optimalisasi pengelolaan limbah cair domestik dan operasional IPLT yang ada tersedia di Kab. Dharmasraya. Menyediakan pengelolaan limbah cair domestik skala rumah tangga sehingga tidak lagi dibuang ke saluran/perairan terbuka.
	Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis akibat adanya alih fungsi lahan dan Illegal logging		Hasil analisa citra satelit tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan luas lahan kritis dan sangat kritis di Kab.Dharmasraya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.	Pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsi lahan, perlu sosialisasi terkait penghijauan, dan pelaksanaan kegiatan konservasi, serta pemulihan lahan kritis.

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	<b>Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>			
	belum semua penduduk memiliki KTP (eKTP), Kartu Keluarga, serta surat keterangan kependudukan lainnya (pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap)	2015 90,93% pdd 17+, 17% akta kelahiran	di tahun 2015 baru 90,98% penduduk di atas usia 17 tahun memiliki KTP. Artinya belum semua penduduk di atas 17 tahun memiliki KTP. untuk kepemilikan akta kelahiran baru dimiliki oleh 13% penduduk. penyebabnya diantaranya kurangnya minat dan jangkauan akses pelayanan pencatatan sipil yang saat ini dapat dilakukan di kantor camat	perlu sosialisasi pelayanan keliling, dan penertiban dokumen kependudukan secara keseluruhan
	belum semua penduduk memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta pencatatan sipil lainnya		pencatatan administrasi kependudukan baru dilaksanan sejak tahun 2011, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan	meningkatkan peran pemerintahan jorong/nagari untuk ikut melaporkan dan mandata terkait peristiwa perubahan status kependudukan warganya
	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa</b>			

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		masih kurangnya kemampuan aparatur nagari/desa dalam pengelolaan pemerintahan nagari		masih relatif barunya pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dalam hal ini pemerintah nagari dituntut untuk melaksanakan berbagai dituntut dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya, yaitu pelaksanaan 4 (empat) sub bidang urusan yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah kabupaten, yaitu diantaranya Penataan Desa, Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Disamping itu desa/nagari juga dituntut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana desa maupun dana APB Nagari secara keseluruhan	meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas apartur pemerintah nagari
	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
		masih terdapatnya pasangan usia subur yang tidak terjangkau layanan KB		masih sedikitnya peserta Metode KB jangka panjang (MKJP) yang menggunakan IUD dan MOP maupun jenis alat kb lainnya	pemenuhan alat, obat kontrasepsi (alokon), sosialisasi di tingkat jorong tentang KIE dan konseling keluarga

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB	PKB ASN 11 org, PLKB honorer 9 orang	jumlah PKB dan PLKB yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada, dimana seharusnya 1 orang untuk 2 nagari	penambahan jumlah PKB dan PLKB serta pelatihan tenaga penyuluh KB
		tingginya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan		kedua permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas keluarga sebagaimana diamanatkan oleh UU 52 Tahun 2009.	optimalisasi fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta sosialisasi ke kalangan pasangan usia subur untuk peningkatan kualitas keluarga
		meningkatnya jumlah kelahiran			
		terdapatnya kasus pernikahan dini/ usia muda			
<b>Bidang perhubungan</b>					
		masih banyaknya jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan	Jumlah kasus : 63 - meninggal 25 jiwa - Luka berat 53 jiwa - Luka ringan 64 jiwa	Dharmasraya berada di jalur lintas sumatera dan memiliki traffik yang padat	Penambahan rambu lalu lintas serta pengaturan lalu lintas
		Masih terdapatnya kendaraan yang melebihi tonase dan tidak sesuai dengan kelas jalan	n/a	kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan kelebihan tonase yang menyebabkan kerawanan lalu lintas	Perlunya penertiban terhadap tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		Belum terpenuhinya standar sarana dan prasana perhubungan sesuai dengan akreditasi pada kementerian perhubungan sehingga masih rendahnya kendaraan yang wajib KIR melaksanakan uji berkala		Meningkatnya kerawanan keselamatan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak layak jalan masih beroperasi (terkait dengan Permenhub Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor)	Peningkatan kapasitas UPT PKB yang diiringi dengan sosialisasi tentang pentingnya uji berkala terhadap kendaraan wajib KIR
<b>Bidang komunikasi dan informatika</b>					
		belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik pemerintah daerah		belum semua OPD memiliki jaringan internet dan website yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat	pemasangan jaringan internet terintegrasi oleh Kominfo
		masih terdapatnya OPD yang belum memiliki jaringan internet dan belum memiliki website		terdapat OPD yang masih menggunakan gedung belum tetap (kontrak) serta lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet	
<b>Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>					
		banyaknya koperasi tidak aktif		Belum adanya regulasi yang jelas tentang pembubaran koperasi tidak aktif	pembubaran koperasi yang sudah tidak beroperasi sesuai peraturan yang berlaku, atau mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	terdapatnya koperasi yang memiliki manajemen kurang baik		adanya pengurus koperasi yang belum terlatih	pelatihan pengurus koperasi dan pembinaan secara rutin
<b>Bidang penanaman modal</b>				
	Rendahnya perkembangan nilai investasi		Sedikitnya minat investor masuk	Pemberian insentif bagi investor baru
	Masih terdapatnya pelayanan perizinan yang melebihi 15 hari kerja	16 ijin dari 71 ijin		Percepatan dengan perangkat terkait
	belum optimalnya pelaksanaan perizinan serta kurangnya koordinasi OPD terkait perizinan			Penataan alur perizinan secara terintegrasi dan jelas
	Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi			Perbaikan perencanaan hingga pelaksanaan teknis bidang penanaman modal
<b>Bidang kepemudaan dan olah raga</b>				
	kurangnya pembinaan terhadap atlet usia dini		Dharmasraya memiliki potensi atlit muda yang dapat dikembangkan dan sudah berprestasi di berbagai cabang olah raga	Pembinaan atlit berprestasi derta cabang olahraga yang berpotensi untuk dikembangkan, serta pemanfaatan sarana dan prasana yang sudah ada
	kurangnya pembinaan terhadap cabang olah raga dan atlet berprestasi		Pemetaan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk dikembangkan	

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan		serta Pembinaan serta revitalisasi kelembagaan yang melaksanakan olahraga	secara optimal
<b>Bidang statistik</b>					
		kurangnya ketersediaan data indikator kinerja pemerintahan daerah		disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia di OPD dan data yang kurang akurat serta sumber yang perlu disepakati	optimalisasi/peningkatan fungsi forum data kabupaten dan pemberlakuan "one data"
<b>Bidang persandian</b>					
		belum optimalnya pengamanan jaringan dan informasi publik		belum adanya aturan pelaksanaan persandian di daerah	
<b>Bidang kebudayaan</b>					
		belum optimalnya inventarisasi terhadap cagar budaya daerah			
		belum adanya penelitian dan pengembangan terhadap budaya daerah			
<b>Bidang perpustakaan</b>					
		kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah, serta belum adanya gedung layanan perpustakaan yang kondusif			perlu inovasi dan optimalisasi perpustakaan daerah serta pembangunan gedung layanan perpustakaan

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	<b>Bidang kearsipan</b>			
		masih terdapatnya OPD yang belum melakukan penataan arsip secara baku		sosialisasi dan pelatihan penataan arsip
	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
	<b>Bidang kelautan dan perikanan</b>			
		kurangnya dukungan pemasaran terhadap produksi perikanan		Melakukan penataan kelembagaan bidang perikanan (koperasi maupun gapoktan/poktan)
		kurangnya pasokan pakan ikan yang berkualitas		
	<b>Bidang pariwisata</b>			
		belum ditetapkannya Rencana induk pariwisata daerah (RIPARDA)	RIPARDA merupakan dokumen strategis dalam pengembangan kepariwisataan daerah	percepatan penetapan RIPARDA
		belum tergalinya potensi wisata secara optimal	terdapatnya potensi wisata alam dan wisata lainnya yang belum dikembangkan	menggali potensi wisata daerah
	<b>Bidang pertanian</b>			
		harga komoditi yang fluktuatif dan kurang stabil	hal ini terjadi dominan pada komoditi karet dan sawit sebagai komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat	

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut	
		adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian		terdapatnya lahan pertanian masyarakat yang berubah fungsi, diantaranya menjadi kawasan perumahan, dan pertambangan	
		tingginya tingkat pencemaran air irigasi batanghari			
		Adanya alih fungsi lahan pertanian			
	Bidang kehutanan			pindah ke provinsi	
	Bidang energi dan sumber daya mineral			pindah ke provinsi	
<b>Bidang perdagangan</b>					
		masih terdapatnya prasarana dan sarana perdagangan maupun pasar dalam kondisi belum baik		adanya los/kios serta pasar tradisional yang memiliki penataan baik dan kondisi belum optimal	penataan sarpras pasar
		belum adanya pasar kabupaten	0		pembangunan pasar kabupaten
		belum terdatanya pedagang pasar		kurangnya pendataan pedagang pasar (termasuk PKL) sehingga adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran	

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
		Belum adanya unit/sarana yang menangani alat tera ukur di kabupaten		
<b>Bidang perindustrian</b>				
		menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB daerah	pada daerah berkembang, idealnya sektor industri berkembang yang terlihat dengan naiknya sektor industri terhadap perekonomian daerah	mendorong perkembangan industri khususnya IKM yang dapat meningkatkan nilai tambah lebih besar dalam perekonomian daerah
		masih rendahnya cakupan binaan terhadap IKM di daerah	masih kurangnya binaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap IKM, baik dari segi fasilitasi permodalan maupun pelatihan kewirausahaan	memberikan pelatihan dan binaan kepada IKM-IKM yang berpotensi untuk berkembang dan sesuai dengan karakter IKM serta mendorong untuk naik kelas
<b>Bidang transmigrasi</b>				
		Terdapat perbedaan titik lokasi untuk kawasan transmigrasi antara Dokumen RTRW dengan SKPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dengan adanya perbedaan titik lokasi transmigrasi Padang hilalang SP 2 di kec. IX Kota,	Perbaikan/penyesuaian sejalan dengan penataan ruang daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
<b>Fungsi penunjang Urusan</b>				
Bidang perencanaan				
	Masih kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran		masih terdapatnya ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan serta keterkaitan dengan dokumen APBD	meningkatkan kualitas perencanaan daerah
	masih perlunya peningkatan kualitas belanja daerah		masih terdapatnya belanja yang belum dianggarkan secara efektif dan efisien	
	belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi			
	sulitnya mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan/ lima tahunan			
	kurangnya daya tampung hasil Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran			
<b>Bidang keuangan</b>				
	kurangnya realisasi pendapatan daerah terhadap target yang dicapai	berkisar 63 s/d 86%	masih kurangnya pencapaian pendapatan daerah, terutama pada pendapatan pajak	

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
		masih kurangnya serapan belanja daerah		
		belum adanya pemetaan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan daerah	proyeksi pendapatan daerah masih berdasarkan perkembangan realisasi sebelumnya dan masih belum mempertimbangkan potensi daerah	pemetaan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah serta pendataan objek dan potensi pajak, retibusi dan pendapatan daerah lainnya
		belum optimalnya pencatatan aset dan pemanfaatan aset		
<b>Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>				
		kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada jabatan fungsional serta struktural	masih sedikitnya jabatan struktura/fungsional yang mengikuti diklat sebelum penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	melaksanaa diklat sesuai dengan tupoksi dan jabatan yang ada
		masih perlunya peningkatan akurasi data kepegawaian		
<b>Bidang penelitian dan pengembangan</b>				
		belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan daerah	bidang kelitbangan merupakan salah satu urusan baru yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014	menyusun Rencana induk kelitbangan, rencana kerja tahunan kelitbangan, membentuk Dewan Riset Daerah (DRD), dan pemanfaatan dan pengembangan hasil penetian

No.	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	Data	Analisa	Strategi/ tindak lanjut
	<b>Bidang Pengawasan</b>			
		masih banyaknya temuan penyimpangan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan maupun pelanggaran administratif		
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah</b>			
		masih belum sesuaiya penganggaran dengan prinsip kewenangan pada perangkat daerah, bahwa satu perangkat daerah hanya boleh maksimal 3 (tiga) urusan, serta <b>1 (satu) urusan tidak boleh dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah</b>		
	<b>kebencanaan</b>			
		Masih belum adanya nagari tangguh bencana	0	Belum adanya penetapan terhadap nagari rawan bencana dan perlunya sosialisasi terhadap urgensi terhadap nagari tanggap bencana
				Identifikasi dan pemetaan kawasan bencana serta sosialisasi terhadap pentingnya keberadaan nagari siaga

## 4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan isu pembangunan yang telah dirumuskan pada sub bab 4.1 maka perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertajam pernyataan kondisi permasalahan yang ada saat ini sehingga diperoleh fokus isu yang benar-benar terdapat dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini dan 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut meliputi :

### 1. **Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani**

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil bagi seluruh penduduk menjadi dasar pembangunan yang penting bagi daerah. Produksi bahan pangan daerah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangankarbohidrat maupun protein. Intensifikasi dan ekstensifikasi padi sawah perlu terus dilakukan dengan dukungan pembangunan dan peningkatan irigasi. Selain itu program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan juga menjadi bagian diversifikasi ekonomi petani.

### 2. **Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi kerakyatan**

Pasar-pasar tradisional sebagai tempat perdagangan yang terdapat di kawasan perkotaan maupun pedesaan yang masih banyak dalam kondisi kurang memenuhi standar fisik perlu ditingkatkan secara fisik dengan melakukan rehabilitasi pasar. Pasar khusus agribisnis hasil perkebunan, perternakan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek rantai distribusinya dan dicari upaya pembelian bersama dalam partai besar sehingga harga yang diterima pedagang bisa lebih murah.

### 3. **Pemerataan Infrastruktur daerah**

Kabupaten Dharmasraya masih memiliki daerah pinggiran yang relatif tertinggal dan sarana kesehatan dan pendidikan yang kurang terjangkau. Oleh karena itu program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal.

### 4. **Pengendalian pemanfaatan ruang**

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor kalau pembangunan dilakukan tidak terkendali. Oleh karena peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

## **5. Pengembangan identitas daerah**

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang ada dan menjadikannya sebagai identitas daerah yang membanggakan bagi generasi sekarang dan akan datang.

## **6. Peningkatan kualitas SDM**

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu program di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan perlu dipacu peningkatannya.

## **7. Pembangunan berbasis nagari**

Nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berupa profil nagari berbasis teknologi informasi yang *selalu up to date* dan terpercaya. Institusi pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.

## **8. Transparansi dan Informasi pembangunan**

Pembangunan perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan. Oleh karena program pelayanan satu pintu perlu dioptimalkan, demikian juga transparansi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi perlu dibangun dengan membuat unit pengumpulan dan pengoahan data tersendiri agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).

## **9. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan menjadi penting untuk Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada wilayah terluar Provinsi Sumatera Barat dengan jarak pencapaian menuju Kota Padang memakan waktu lebih kurang 5 jam. Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan (public safety center) sepanjang jalan lintas Sumatera. Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan

keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi juga preventif perlu dilakukan oleh berbagai instansi bukan hanya Dinas Kesehatan tetapi melibatkan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan sanitasi lingkungan dan instansi lain yang terkait dengan pemberdayaan dan penyehatan masyarakat. Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya preventif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.

**Tabel 4.2. Persandingan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya	Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi
<p>Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani perlu menjadi fokus pembangunan.</p> <p>Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil; program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan</p>	<p>Pemanfaatan potensi untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan tercantum dalam prioritas nasional dan isu strategis provinsi perlu terus dioptimalkan.</p>
<p>Peningkatan kegiatan perdagangan dengan rehabilitasi pasar; peningkatan jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan membangun sektor pertanian perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan dan industri</p>	<p>Isu strategis provinsi Sumbar yaitu bagaimana menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah dari agribisnis agroindustri serta</p> <p>Usaha mikro kecil sebagai penggerak perekonomian masih memerlukan perhatian antara lain promosi usaha, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, jaringan bisnis.</p>
<p>Pemerataan infrastruktur daerah program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal dalam hal transportasi, sanitasi dan air bersih.</p>	<p>Perlu ditingkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dengan mempertimbangkan pengembangan wilayah dan integrasi moda. Pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu termasuk air minum dan sanitasi untuk mencapai target universal Access secara nasional (100 % Akses air minum, dan sanitasi). Demikian juga penanganan kawasan kumuh sesuai target nasional 0 % kawasan kumuh pada Tahun 2019.</p>
<p>Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor. Peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang</p>	<p>Salahsatu isu strategis pembangunan daerah Sumbar adalah kerawanan terhadap bencana. Dalam RPJM Provinsi terdapat rumusan isu pembangunan untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.</p>
<p>Pengembangan identitas daerah Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut.</p>	<p>Dalam RPJM Nasional ditekankan isu pembentukan karakter nasional. Pembangunan identitas adalah salahsatu cara untuk membangun karakter.</p>
<p>Peningkatan kualitas SDM. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat masih rendah maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja.</p>	<p>Dalam RPJM Nasional salah satu isu penting adalah bagaimana Ppembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Isu pembangunan RPJM Provinsi adalah perlu</p>

Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya	Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi
	terus ditingkatkannya pemerataan dan kualitas pendidikan masih sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang belum mendapat pelayanan pendidikan dan tercapai wajib belajar 9 tahun dan rintisan belajar 12 tahun. Isu lainnya, kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan.
Pembangunan berbasis nagari karena nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berbasis teknologi informasi yang selalu up to date dan terpercaya. Membangun institusi pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.	Selaras dengan isu pelaksanaan pembangunan nasional dan provinsi yang belum merata dan seimbang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis nagari akan mempercepat pembangunan dari bawah dan pinggiran seperti diamanatkan dalam RPJM Nasional
<p>Transparansi dan Informasi pembangunan.</p> <p>Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan</p> <p>Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).</p>	Membangun tatakelola dan reformasi birokrasi menjadi isu pembangunan nasional. Dalam RPJM provinsi Sumbar terdapat rumusan isu: Kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik
<p>Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan.</p> <p>Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan sepanjang jalan lintas Sumatera (<i>public safety center</i>); Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi juga preventif Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya preventif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.</p>	Bagian dari isu nasional menjadikan manusia Indonesia unggul melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam isu strategis provinsi terdapat isu perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.





# *Bab V*

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**



# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### 5.1 VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016- 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

#### **Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya**

##### **Mandiri :**

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

##### **Berbudaya :**

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

## **5.2 MISI**

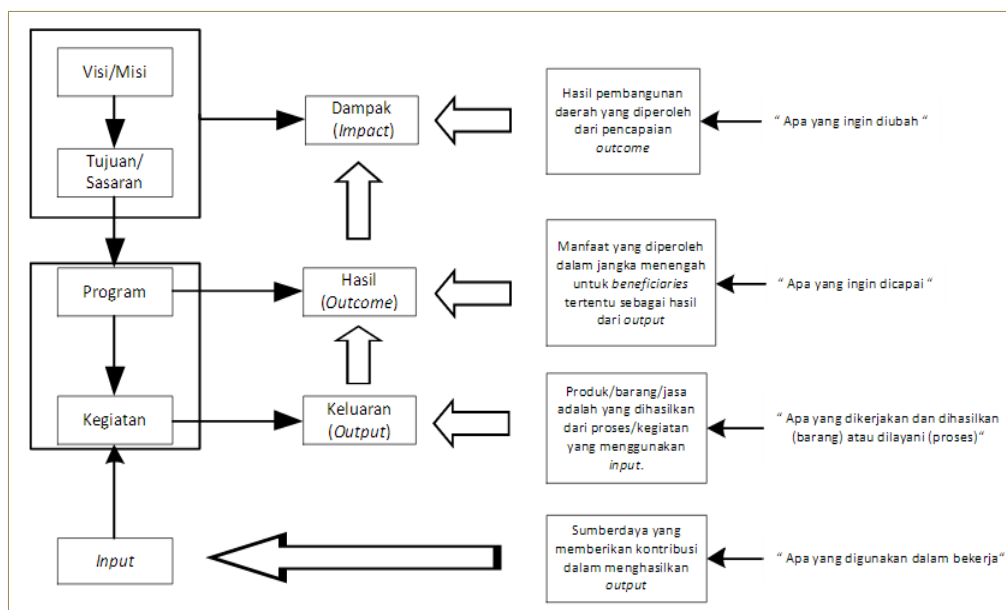
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

## **5.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis atau prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

**Gambar 5.1**  
**Skematik Keterkaitan Antara Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan**  
**Dan Sasaran, Program**



**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021**

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi 1 :Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.</b>									
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	70,30	70,57	70,78	71,01	71,23	71,46
2	masyarakat cerdas dan berkarakter	meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8,23	8,31	8,40	8,48	8,57	8,65
			Harapan lama sekolah	12,39	12,56	12,73	12,9	13,07	13,24
3	meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja	mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompentensi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,24	2,87	2,56	2,26	1,95	1,65
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,98	66,64	67,03	67,44	76,86	68,29
4	Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,6	88,91	89,22	89,53	89,84	90,15
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	48,014	48,558	49,102	49,646	50,19	50,734
5	meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat	mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat Miskin	7.16	6,76	6,46	6,17	5,89	5,62
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.</b>									
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat	meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap ( > 40 KM/Jam)	44,44	47,99	51,82	55,65	59,49	63,33
2	Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Rasio rumah layak huni	n/a	16,93	16,61	16,29	15,97	16,66
			Akses Air Minum Layak	14,53	16,26	19,26	22,71	26,29	30,08
			Akses Sanitasi Layak	39,99	39,79	40,01	40,62	41,6	42,91

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.</b>									
1	peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	IPM	70,25	70,42	70,66	70,71	70,88	71,2
			Pertumbuhan PDRB	5,34	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00
			PDRB perkapita (juta Rp)	36,78	39,17	41,65	44,10	46,83	49,67
			Indeks Gini	0,30	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
2	Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan	meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Tanaman Pangan : produksi padi (ton)	66.555	69.883	71.000	71.500	72.000	72.500
			Perkebunan : Karet (ton)	36.135	37.763	39.391	41.019	42.647	44.275
			Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat)	74.020	75.000	77.500	78.000	79.000	80.000
			Peternakan : produksi daging (ton)	6.020,90	6.250	6.375	6.400	6.500	6.750
			Perikanan : produksi perikanan (ton)	19.202,0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan Pangan	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58
4	meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	20	25	30	35	40	45
		Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat	pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)	6,19%	11,19%	16,19%	21,19%	26,19%	21,19%
		meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen	Pasar dalam kondisi baik (persen)	21,62%	22,90%	23,70%	24,20%	25,40%	28,1
<b>Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.</b>									
	Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,85	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50
<b>Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.</b>									

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Hasil evaluasi AKIP	C(45,67)	B(60,46)	B	B	BB	BB
			Nilai LPPD (nilai, status, rangking)		3,1226 (sangat tinggi) Urutan 120	3,1500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2000 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2750 (sangat tinggi) naik peringkat
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan	persentase pencapaian target dan sasaran RPJMD terhadap RPJPD	70	80	85	90	95	100
			persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	75	80	85	90	95	100
		Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal)	84,64	73,43	76,56	80,83	80,28	80,44
<b>Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.</b>									
1	pembangunan berbasis nagari	Meningkatkan status pembangunan nagari	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	55,77	26,92	23,08	19,23	15,38	11,54
<b>Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun</b>									
1	Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya	terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	25	100	162	170	180	190
			Jumlah pelestarian cagar budaya		80	152	170	180	190

## 5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan *sustainable development*)



# Bab VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



# BAB VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dilihat dari muatan bahasan bab ini, terdapat 3 muatan yaitu strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. dimana masing masing muatan tersebut ditinjau dari literatur aturan perencanaan pembangunan, pengertiannya istilah tersebut yaitu ; **strategi** adalah Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. pengertian dari **arah kebijakan** yaitu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan **program pembangunan daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Ketiga muatan tersebut dirumuskan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam proses perumusan penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 berpedoman terhadap strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Selain mempedomani kedua dokumen perencanaan tersebut, perumusan strategi dan arah kebijakan juga mempedomani aturan terkait diantaranya standar pelayanan minimal, aturan perundang-undangan terkait serta hasil pengamatan terhadap hasil tinjauan lapangan.

**Tabel 6.1**  
**Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021**

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>1</b>	<b><i>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.</i></b>			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatnya status kesehatan masyarakat	<p>memenuhkan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana/prasarana serta peningkatan kualitas serta kuantitas tenaga kesehatan</p> <p>peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di RSUD</p>	<p>peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular</p> <p>peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap</p> <p>penerapan Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan penyehatan lingkungan</p> <p>Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Total coverage)</p> <p>Peningkatan kelengkapan sarana kesehatan</p> <p>peningkatan kualitas Pelayanan kefarmasian</p> <p>pembangunan rumah sakit type D</p> <p>terakreditasinya seluruh Puskesmas dan RSUD</p> <p>peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) dan penanggulangannya</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar</p>
	masyarakat cerdas dan berkarakter	meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	<p>penyediaan ruang kelas dan sarana belajar dalam kondisi baik</p> <p>peningkatan fungsi labor dan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar</p> <p>peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui diklat dan pelatihan</p> <p>Pelibatan keluarga dalam proses pembelajaran</p> <p>penuntasan wajib belajar 9 tahun</p>
	meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja	mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi	pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja serta optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)	<p>penyelenggaraan hubungan industrial (perusahaan dan karyawan) untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja</p> <p>penyediaan pusat informasi pasar tenaga kerja</p> <p>optimalisasi Balai Latihan kerja (BLK) untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja</p>

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penyelarasan dan kemitraan antara bidang yang dilatih dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan perusahaan dan pemerintahan nagari
	Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	meningkatkan kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan pengarusutamaan gender	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi meningkatkan kesetaraan perempuan dalam pendidikan, dan kesehatan
	meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat	mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan penanganan PMKS melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PMKS Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	peningkatan ekonomi keluarga miskin berdasarkan karakter kemiskinan pada program-program pemerintah rehabilitasi sosial dasar bagi : penyandang disabilitas terlantar dan tuna sosial di panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk rentan dan pekerja informal Pemberian bantuan sosial untuk penanganan masalah sosial melalui mekanisme Usaha Kelompok Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan kesejahteraan sosial lainnya
<b>2</b>	<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.</b>			
	Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat	meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalan	pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana transportasi kabupaten	pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
	Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	pemenuhan terhadap kebutuhan rumah  peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR fasilitasi pembangunan rumah susun bagi MBR Fasilitasi pembangunan perumahan formal Menyusun regulasi terkait perumahan (NSPK bidang perumahan) identifikasi dan inventarisasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU (jalan lingkungan, drainase, sampah, air minum, listrik, telekomunikasi) perumahan dan kawasan permukiman

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pengembangan SPAM kabupaten</li> <li>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah</li> <li>Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah</li> <li>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.</b>			
	peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor dominan, merata, serta secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor dominan/ potensial</li> <li>pengembangan ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing tinggi</li> <li>mengurangi kesenjangan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin</li> </ul>
	Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan	meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perikanan untuk mewujudkan petani sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>penetapan dan pengembangan produk unggulan serta kawasan sentra produksi</li> <li>pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar</li> <li>pembangunan sistem irigasi untuk mendukung pertanian/perikanan</li> <li>pembangunan sistem distribusi pemasaran hasil pertanian/perikanan</li> <li>peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian/perikanan yang berkelanjutan</li> <li>peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perikanan</li> <li>Penyaluran bibit/benih unggul untuk petani</li> <li>mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata</li> </ul>
	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan Pangan	peningkatan kualitas pangan dan mitigasi kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li> <li>penanganan kerawanan pangan pada nagari mandiri pangan</li> <li>pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</li> <li>pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kabupaten</li> </ul>
	meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan usaha</li> <li>Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran</li> <li>fasilitasi terhadap kemudahan akses pembiayaan dan skema pembiayaan</li> </ul>

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat		Peningkatan promosi dan pemasaran produk Mengembangkan usaha hilirisasi produk (industri pengolahan) Pembangunan sentra industri kecil dan menengah alat dan mesin pertanian (Alsintan) fasilitasi dan pengembangan sentra IKM berbasis agro yang ramah lingkungan dan ramah lingkungan pembenahan dan pembubaran koperasi tidak aktif
		meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen	Meningkatkan sarana dan prasana bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan perlindungan konsumen peningkatan pangsa pasar komoditi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya pemantauan harga dan stok barang serta melakukan operasi pasar
<b>4</b>	<b>Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.</b>			
	Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan upaya konservasi terhadap sumber daya air dan kawasan berfungsi lindung	Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (ADIWIYATA) inventarisasi keanekaragaman hayati (KEHATI)
			Peningkatan fungsi lingkungan dengan melaksanakan pemulihan terhadap lahan kritis dan lahan akses terbuka	Meningkatkan tutupan hutan (forest cover) serta pelestarian terhadap keberadaan keanekaragaman hayati Pemulihan lingkungan yang rusak/terkontaminasi dari limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) pemeliharaan ruang terbuka hijau rehabilitasi hutan dan lahan
			Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH	melakukan pemantauan kualitas lingkungan untuk menurunkan beban pencemaran
			pengelolaan B3 dan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) penanganan sampah B3
<b>5</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.</b>			
	Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintahan daerah	penataan tata kelola pemerintah dan birokrasi pemerintahan daerah	peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas aparatur

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>peningkatan pemahaman tata kelola pemerintahan daerah bagi aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan LKJIP</p> <p>memantapkan fungsi APIP dalam memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>pengendalian dan perhitungan pencapaian pelaksanaan SPM</p>
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	penyelenggaraan Fungsi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas	<p>Peninjauan dan perubahan RTRW Kabupaten Dharmasraya</p> <p>peningkatan kapasitas aparatur perencana</p> <p>peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah</p> <p>meningkatkan ketersediaan dan kualitas data pembangunan</p> <p>optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan sesuai target pembangunan</p>
		Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah	<p>Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran</p> <p>pelaksanaan penetapan APBD tepat waktu</p> <p>penerapan akuntansi berbasis akrual</p>
<b>6</b>	<b>Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.</b>			
	pembangunan berbasis nagari	Meningkatkan status pembangunan nagari	menciptakan nagari yang maju, mandiri dan pembangunan secara berkelanjutan	<p>Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah nagari dan kelembagaan pemerintahan nagari</p> <p>fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perdesaan di nagari</p> <p>perencanaan dan penataan kawasan perdesaan</p> <p>Penataan dan penguatan BUMNag</p> <p>pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna nagari oleh masyarakat</p>
<b>7</b>	<b>Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun</b>			
	Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya	terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	pelaksanaan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya sebagai identitas daerah	<p>melakukan MOU dan kerjasama dengan lembaga kebudayaan (BPCB, BPNB, BALAR Balai pelestarian bahasa, dan perguruan tinggi) dalam pelaksanaan identifikasi, ekskavasi, inventarisasi, revitalisasi warisan/cagar budaya</p> <p>pelaksanaan penelitian budaya dan pembentukan tim ahli</p> <p>melestarikan warisan peninggalan seni dan budaya</p> <p>pelestarian nilai budaya daerah</p>

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab	
					Tahun 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target		Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.																			
	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	70,16	70,30		70,57		70,78		71,01		71,23		71,46		71			
	Sasaran 1 : Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	70,16	70,3		71		71		71		71		71		71			
1 2 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	%	100	100	11.485.794.550	100	11.044.235.245	100	12.157.675.657	100	9.500.960.004	100	9.500.000.000	100	9.500.000.000	100	63.188.665.456	Dinas Kesehatan	
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	peningkatan tipe RSUD sungai dareh	nilai	c		8.648.742.121	c	38.105.205.369	c	13.878.064.653	c	15.000.000.000	B	10.000.000.000	B	10.000.000.000	B	95.632.012.143	RSUD Sungai Dareh	
		Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD Sungai Rumbai	persen							80	10.000.000.000	20	5.000.000.000							
1 2 XX	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas	tahun	2,8	100	1.371.783.617	100	9.126.925.424	100	10.944.993.414	100	9.306.165.925	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	50.749.868.380	Dinas Kesehatan	
	Tujuan 2 : Masyarakat cerdas dan berkarakter	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,03	8,23		8		8		8		9		9		9			
	Sasaran 1 : Meningkatkan tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,03	8,23		8		8		8		9		9		9			
1 1 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	persen	108,61	112,43	14.575.512.045	110	43.146.512.798	110	46.440.670.010	110	31.219.807.251	110	31.219.807.251	109	42.000.000.000	109	208.602.309.354	Dinas Pendidikan	
		APK SMP/MTs	persen	90,93	82,17		79		81		82		83		90,93		90,93		Dinas Pendidikan	
		APM SD/MI	persen	100	98,23		98		99		99		99		100		100		Dinas Pendidikan	
		APM SMP/MTs	persen	78,33	76,19		78		80		80		81		78		78		Dinas Pendidikan	
		Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	80,12	11,79		12		12		12		12		12		12		Dinas Pendidikan	
		Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	79,49	3,15		3		3		3		3		3		3		Dinas Pendidikan	
	Tujuan 3 : meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	65,88	65,98		66,64		67,03		67,44		68		77		77			
	Sasaran 1 : mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompentensi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	3,51	3,24		2,87		2,56		2,26		1,95		1,65		1,65			
2 1 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	persentase tenaga kerja yang tersalurkan	persen	6,73	8,33	58.583.050	9,16	146.334.990	9,23	111.634.000	9,55	333.227.000	10,28	350.000.000	11,11	350.000.000	11,11	1.349.779.040	Dinas Nakertrans	
	Tujuan 4 : Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	47,47	48,014		49		49		50		50		51		51			
	Sasaran 1 : meningkatknya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	88,29	88,6		89		89		90		90		90		90			
2 2 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan				380.000.000	#####	337.746.958		380.000.000	70	250.000.000	80	380.000.000	95	380.000.000	95	2.107.746.958	Dinas SOSP3APPKB	
	Tujuan 5 : meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat	Persentase masyarakat miskin	persen	7,17	7,16		7		6		6		6		6		6			
	sasaran 1 : mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	persen	74,53058044	88,0811884		88		89		90		93		95		95			
1 6 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	Jiwa	9539	9.539	649.203.700	9.539	499.283.580	9.539	282.952.500	9.539	310.000.500	9.539	350.000.000	9.539	350.000.000	9.539	2.441.440.280	Dinas SOSP3APPKB	
1 6 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial	Orang	0	70	102.688.900	70	177.648.950	70	211.532.500	70	364.316.500	70	400.000.000	70	400.000.000		1.656.186.850	Dinas SOSP3APPKB	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	periode RPJMD								
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.																	
	Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/Jam)	persen	86,71	44,44	48	52	56	59	63								
	Sasaran 1 : meningkatnnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/Jam)	persen	86,71	44,44	48	52	56	59	63								
1 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/Jam)	persen	35556	0	128.041.576.304	-	121.296.250.967	-	56.008.629.117	-	39.486.056.138	-	55.000.000.000	-	68.170.290.870	468.002.803.395	Dinas PUPR
1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase jalan lengkap kabupaten	%	96,55119144		7.989.228.819	-	8.338.703.969	-	4.805.519.800	-	4.065.733.333	-	4.065.733.333	-	4.065.733.333	33.330.652.588	Dinas PUPR
	Tujuan 2 : Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat	Rasio rumah layak huni	persen	0	n/a	17	17	16	16	17	17							
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni	Rasio rumah layak huni	persen	0	n/a	17	17	16	16	17	17							
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	persen	-	-	99.830.000	17	185.715.400	17	1.573.237.650	16	1.508.455.500	16	1.800.000.000	17	1.900.000.000	7.067.238.550	Dinas Perkimtan
1 4 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	persen	0	68,42	-	67,26	4.976.570.500	66,10	2.024.404.000	64,95	2.000.000.000	63,79	2.000.000.000	63,79	2.000.000.000	11.000.974.500	Dinas Perkimtan
	Sasaran 2 : Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Akses Air Minum Layak	persen	0	14,53	16	19	23	26	30	30							
1 3 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	0	0			700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000	Dinas PUPR	
1 3 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Pelayanan Air Minum	38	38	0	4.019.875.913	0	8.357.372.532	0	15.207.255.600	0	6.000.000.000	0	10.200.000.000	0	10.400.000.000	54.184.504.045	Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	54	54	25		25		25		25		25		25			
	Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.																	
	Tujuan 1 : peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	IPM	persen	69,84	70,25	70	71	71	71	71	71							
	Sasaran 1 : meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	PDRB perkapita (juta Rp)	persen	34,59557966	36,77741702	39	42	44	47	50	50							
	Tujuan 2 : Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan	#REF!	bobot	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							
	Sasaran 1 : meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Tanaman Pangan : produksi padi (ton)	ton	70169	59282	58.265	58.848	59.436	60.031	60.631	60.631							
		Perkebunan : Karet (ton)																
		Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebud rakyat)																
3 3 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM dan Kesejahteraanpelaku utama dan pelaku usaha Tani			587.357.600	630.855.500	541.245.500	648.059.700	-	650.000.000	-	650.000.000		3.707.518.300	Dinas Pertanian			
3 3 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi beras dan pangan teregister dan terpacking yang dipasarkan			533.514.600	612.325.788	533.514.600	12	521.834.000	12	550.000.000	12	550.000.000		3.301.188.988	Dinas Pertanian		
3 3 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Teradopsinya teknologi pertanian Perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan lahan				282.001.850									282.001.850	Dinas Pertanian		
3 3 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)			12.708.950.912	10.314.614.578	11.439.568.400	28.042	10.000.000.000	28.042	10.000.000.000	28.042	10.000.000.000		64.463.133.890	Dinas Pertanian		
3 3 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	meningkatnya produksi dan Populasi Ternak			808.119.350	1.008.098.950	1.111.220.550	20	1.200.000.000	19	1.200.000.000	19	1.200.000.000		6.527.438.850	Dinas Pertanian		
3 1 20	Program pengembangan budidaya perikanan	peningkatan produksi ikan dan benih ikan yang dibangun	Ton	19199	20309	1.150.430.550	100	1.379.472.607	100	1.359.320.500	20.809	1.568.531.000	20.809	1.500.000.000	20.809	1.500.000.000	8.457.754.657	Dinas Pangan dan Perikanan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	periode RPJMD									
	Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	kalori	237,67	78,58	79	79	79	79	79									
	Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan dan cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan.	persen	0	30	30	50	60	70	80	80								
2 3 xx	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan/cadangan pangan daerah dan kemandirian pangan pada Desa/Nagari			584.884.535	584.867.616	888.163.700	629	1.000.000.000	679	500.000.000	729	700.000.000	4.257.915.851	Dinas Pangan dan perikanan				
	Tujuan 4 : meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat																		
	Sasaran 1 : Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	persen	49	20	25	30	35	40	45	45								
2 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Penguatan Kelembagaan)	Persentase koperasi aktif			171.313.650	30.628.650	81.662.000	128	44.045.000	133	55.000.000	138	60.000.000	442.649.300	Dinas Kumperdag				
	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi sehat				144.627.631	172.741.000	9	155.643.500	10	165.000.000	11	175.000.000	813.012.131	Dinas Kumperdag				
	Sasaran 2 : Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat	Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	persen	0,0169	6,19%	11,19%	16,19%	21,19%	26,19%	21,19%	21,19%								
3 7 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase kenaikan nilai produksi industri kreatif			301.239.134	638.947.228	21.741.463.000	9	21.398.167.000	9	1.475.000.000	9	1.995.000.000	47.549.816.362	Dinas Kumperdag				
	Sasaran 3 : meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen	Pasar dalam kondisi baik (persen)	persen	0,192	21,62 %	22,90%	23,70%	24,20%	25,40%	28,10	28,10								
xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar rakyat kondisi dalam baik		0,192	21,62 %	1.211.772.650	22,90%	4.891.919.950	23,70%	3.419.349.000	24,20%	4.000.000.000	25,40%	4.000.000.000	28,10	4.000.000.000	28,10	21.523.041.600	Dinas Kumperdag
	Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.																		
	Tujuan 1 : menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	59,97	62,85	67	67	68	68	69	69								
	Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase timbul sampah yang tertangani	persen	0,00019	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%								
2 6 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Jumlah kelompok peduli sampah			363.253.430	191.667.868	2.125.127.000	22 Klp	386.364.100	27 Klp	400.000.000	33 Klp	400.000.000	3.866.412.398	Dinas Lingkungan Hidup				
		- Porsentase timbul sampah yang tertangani						0	0	0	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup				
2 6 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup			560.117.843	415.456.120	461.271.650	0	366.989.700	0	450.000.000	0	500.000.000	2.753.835.313	Dinas Lingkungan Hidup				
		2. Jumlah jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang mengurus Izin Lingkungan						20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan				Dinas Lingkungan Hidup				
		3. Persentase Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan						1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup				
	Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.																		
	Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Hasil evaluasi AKIP	bobot	C	C (45,67)	B (60,46)	B	B	BB	BB	BB								
		Nilai LPD	skor, status, peringkat	2,8124 (tinggi) urutan 231	3,1226 (sangat tinggi) urutan 120	3,1500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2000 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat								
	Sasaran 1 : Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Hasil evaluasi AKIP	bobot	C	C (45,67)	B (60,46)	B	B	BB	BB	BB								
		Nilai LPD	skor, status, peringkat	2,8124 (tinggi) urutan 231	3,1226 (sangat tinggi) urutan 120	3,1500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2000 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat								
4 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				241.698.808	341.491.650	349.209.000	353.702.000	375.000.000	375.000.000	2.036.101.458	Setda							
	Tujuan 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	persentase pencapaian target dan sasaran RKPd terhadap RPJMD	persen	75	80	85	90	95	100	100	100								
	Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan	persentase pencapaian target dan sasaran tahunan	persen	75	80	85	90	95	100	100	100								
4 1 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase pencapaian target dan sasaran RKPd terhadap RPJMD	persen	75	80	85	90	95	100	100	100								
	Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal)	persen	76,09524747	84,64	73	77	80	87	88	88								
4 3 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini WTP atas Laporan Keuangan			3.885.322.845	3.987.647.043	3.768.844.250	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	23.641.814.138	Badan Keuangan Daerah							

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	periode RPJMD									
	Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.																		
	Tujuan 1 : pembangunan berbasis nagari	Indeks desa membangun (IDM)	menyusul	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A								
	Sasaran 1 : Meningkatkan status pembangunan nagari	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	9,615384615	55,77	#	#	#	#	#	11,54								
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	9,615384615	55,77	844.062.400	#	1.283.267.536	#	844.062.400	#	907.167.750	#	1.647.459.000	#	1.647.459.000	11,54	7.173.478.086	Dinas PMD
	Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun																		
	Tujuan 1 ; Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmastraya	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	unit	22	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A								
	Sasaran 1 : terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmastraya	#REF!	unit	22	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!								
2 16 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event				126.325.000		129.067.000		143.310.000		200.000.000		200.000.000		798.702.000	Dinas Budparpora		
2 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan pengelola kekayaan budaya				32.302.350		235.142.000		242.420.000		250.000.000		300.000.000		1.059.864.350	Dinas Budparpora		
2 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)				160.294.873		343.887.500		325.640.000		350.000.000		350.000.000		1.529.822.373	Dinas Budparpora		



# Bab VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdiri dari penyajian kerangka pendanaan yang akan dialokasikan untuk program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas daerah maupun seluruh program-program yang ada di seluruh perangkat daerah. Program pembangunan daerah merupakan program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab VI. Sedangkan program perangkat daerah merupakan seluruh program yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangannya masing-masing.

Dalam penyajiannya, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya penataan ulang perangkat daerah tersebut, maka perlu penyesuaian perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai bidang kewenangannya masing-masing.

Dengan adanya perubahan struktur perangkat daerah tersebut, maka dalam perubahan RPJMD ini juga terdapat penyesuaian perangkat daerah sebagai pelaksana program pembangunan daerah dan/atau program perangkat daerah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-2021. Selain penyesuaian perangkat daerah pelaksana. Dalam perubahan RPJMD ini terdapat penyempurnaan terhadap indikator kinerja, target maupun pagu pendanaan untuk periode tahun rencana, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021

Adapun kerangka pendanaan yang disesuaikan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021**

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>881.881.597.921</b>	<b>935.591.361.565</b>	<b>963.767.948.034</b>	<b>948.734.152.412</b>	<b>969.216.869.301</b>	<b>1.006.868.291.809</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>437.899.543.451</b>	<b>424.581.618.937</b>	<b>485.111.598.920</b>	<b>516.138.077.921</b>	<b>517.756.366.142</b>	<b>530.924.025.295</b>
5.1.1.	Belanja pegawai	354.263.312.919	316.349.165.221	366.655.727.845	367.441.290.567	387.153.366.142	396.832.200.295
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	4.449.045.681	5.621.217.579	10.794.200.000	6.550.000.000	6.550.000.000	6.550.000.000
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	-	184.000.000	184.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
5.1.6.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	846.609.246	1.200.000.000	2.027.707.790	-	-
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	78.594.649.851	101.202.853.891	104.777.671.075	104.777.671.075	119.553.000.000	122.541.825.000
5.1.8.	Belanja tidak terduga	592.535.000	377.773.000	1.500.000.000	5.900.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>443.982.054.470</b>	<b>511.009.742.628</b>	<b>478.656.349.114</b>	<b>432.596.074.491</b>	<b>451.460.503.159</b>	<b>475.944.266.513</b>
5.2.1.	Belanja pegawai	863.191.206	481.418.000	697.928.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	176.774.170.270	240.093.762.321	222.711.399.166	215.148.623.066	220.922.799.322	231.316.310.263
5.2.3.	Belanja modal	266.344.692.994	270.434.562.307	255.247.021.948	216.647.451.424	229.637.703.837	243.627.956.250

Untuk lebih jelasnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
A	<b>URUSAN WAJIB</b>																		
1	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>																		
1 1	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>																		
1 1 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	2.336.216.218	100	2.180.837.242	100	1.930.291.500	100	3.147.410.000	100	3.200.000.000	100	3.250.000.000	100	16.044.754.960	Dinas Pendidikan
1 1 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	679.436.250	100	432.927.800	100	191.585.600	100	151.985.600	100	200.000.000	100	225.000.000	100	1.880.935.250	Dinas Pendidikan
1 1 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	29.959.000	100	49.973.200		-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	229.932.200	Dinas Pendidikan
1 1 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	32,15	persen	53,09	655.081.244		1.190.992.487		709.558.650		544.472.150	62	700.000.000	67	750.000.000	67	4.550.104.531	Dinas Pendidikan
1 1 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	108,61	persen	112,43	14.575.512.045	110	43.146.512.798	110	46.440.670.010	110	31.219.807.251	110	31.219.807.251	109	42.000.000.000	109	208.602.309.354	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	90,93	persen	82,17		79		81		82		83		90,93		90,93	-	Dinas Pendidikan
		APM SD/MI	100	persen	98,23		98		99		99		99		100		100	-	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTs	78,33	persen	76,19		78		80		80		81		78		78	-	Dinas Pendidikan
		Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,12	persen	11,79		12		12		12		12		12		12	-	Dinas Pendidikan
		Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	79,49	persen	3,15		3		3		3		3		3		3	-	Dinas Pendidikan
1 1 17	Program Pendidikan Menengah					8.200.777.542												8.200.777.542	Dinas Pendidikan
1 1 18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM / LKP Terakreditasi	0	Lembaga	3	453.547.026	5	546.900.250	5	356.979.350	7	173.331.000	8	454.500.000	9	542.000.000	9	2.527.257.626	Dinas Pendidikan
		Jumlah Tutor yang Bersertifikasi	0	Orang	5		5		5		5		7		7		7		Dinas Pendidikan
1 1 19	Program Pendidikan Luar Biasa					57.150.220												57.150.220	Dinas Pendidikan
1 1 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah SD Memiliki NUKS	31	Orang	5	1.106.953.643	5	937.513.212	5	6.797.196.500	5	5.371.862.500	5	4.772.400.000	5	4.642.300.000	5	23.628.225.855	Dinas Pendidikan
		Jumlah Kepala Sekolah SMP Memiliki NUKS	28	Orang	5		5		5		5		5		5		5	-	Dinas Pendidikan
1 1 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat Capaian SPM	60	%	65	9.181.199.860	75	19.399.990.999	80	13.590.968.000	90	9.359.800.000	95	11.888.740.600	97	7.898.740.600	97	71.319.440.059	Dinas Pendidikan
1 2	<b>BIDANG KESEHATAN</b>					70.373.033.286		111.069.974.279		87.703.596.775		82.023.708.529		91.765.845.400		99.932.874.480		542.869.032.749	Dinas Kesehatan
x 2 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.502.202.769	100	1.759.624.762	100	4.018.629.301	100	4.282.855.000	100	4.382.855.000	100	4.400.000.000	100	20.346.166.832	Dinas Kesehatan
x 2 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	861.356.034	100	889.408.680	100	908.897.900	100	654.209.600	100	854.209.600	100	954.209.600	100	5.122.291.414	Dinas Kesehatan
x 2 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	69.463.000	100	72.270.196	100	223.122.900	100	350.940.000	100	450.940.000	100	470.940.000	100	1.637.676.096	Dinas Kesehatan
x 2 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	104.494.750	100	179.269.750	100	61.691.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	480.455.500	Dinas Kesehatan
x 2 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100	-	100	-	100	223.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	823.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan	100	%	100	5.334.029.675	100	5.382.316.873	100	3.575.140.686	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	24.791.487.234	Dinas Kesehatan
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas	2,8		2,8	10.958.909.233	3	384.207.050	2,85	68.748.414	3	82.860.000	3	85.000.000	4	90.000.000	4	11.669.724.697	Dinas Kesehatan
1 2 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya	50	%	60	86.452.750	65	137.912.500	65	69.925.000	70	-	70	-	75	-	75	294.290.250	Dinas Kesehatan
1 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	25	%	25	491.335.293	26	387.646.184	26	194.627.600	27	200.000.000	27	200.000.000	28	200.000.000	28	1.673.609.077	Dinas Kesehatan
		Persentase nagari siaga aktif	63	%	58		58		59		59		60		60		60		Dinas Kesehatan
		Persentase posyandu strata mandiri	57	%	58		59		60		61		62		63		63		Dinas Kesehatan
1 2 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Gizi Buruk	<5%	%	<5%	200.828.350	<5%	238.409.550	<5%	53.938.700	<5%	33.265.000	<5%	50.000.000	<5%	50.000.000	<5%	626.441.600	Dinas Kesehatan
		Persentase Gizi Kurang	<15%	%	<15%		<15%		<15%		<15%		<15%		<15%		<15%		Dinas Kesehatan
		Persentase Stunting	73	%	30		25		20		17		15		15		15		Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/nagari yang melaksanakan STBM	8	Nagari	0	198.992.650	10	435.600.263	12	164.478.000	14	50.000.000	16	150.000.000	18	150.000.000	18	1.149.070.913	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap minum berkualitas	81,82	%	82		83		84		85		86		88		88		
		Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban sehat	84,2	%	85		86		87		88		89		91		91		
		Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	66,83	%	68		69		71		73		75		78		78		
		Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	56,44	%	60		63		65		68		71		73		73		
1 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase jorong yang mencapai UCI	69	%	86	415.500.000	88	546.120.350	90	362.075.200	92	281.064.000	94	300.000.000	96	300.000.000	96	2.204.759.550	Dinas Kesehatan
		Persentase keberhasilan pengobatan TB (success rate)	90,1	%	90		95		95		95		95		95		95		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu	13	Puskesmas	13		13		14		14		15		15		15		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	13	Puskesmas	13		13		14		14		15		15		15		
		Cakupan jorong yang mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	100	%	100		100		100		100		100		100		100		
1 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	60	%	70	34.910.491	70	2.263.742.856	85	1.735.994.250	100	1.700.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	6.334.647.597	Dinas Kesehatan
1 2 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan	60	%	60	-	60	32.313.750	65	48.284.000	65	-	70	-	70	-	70	80.597.750	Dinas Kesehatan
1 2 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	100	%	100	11.485.794.550	100	11.044.235.245	100	12.157.675.657	100	9.500.960.004	100	9.500.000.000	100	9.500.000.000	100	63.188.665.456	Dinas Kesehatan
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD Sungai Rumbai	0	persen							80	10.000.000.000	20	5.000.000.000		1.000.000.000	2	16.000.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	AKABA ( / 1000 KH )	24	/1000 KH	30	3.657.834.550	28	5.303.029.101	25	5.390.197.500	24	5.385.385.000	23	5.500.000.000	22	5.500.000.000	22	30.736.446.151	Dinas Kesehatan
1 2 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Kelompok kesehatan lansia yang dilayani	70	%	70	69.198.000	71	82.887.800	72	36.094.500	73	17.240.000	74	252.840.800	75	277.724.880	75	735.985.980	Dinas Kesehatan
1 2 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKI ( / 100.000 KH )	153	/100.000 KH	330	365.151.350	325	308.095.510	310	65.210.100	305	28.644.000	300	70.000.000	280	70.000.000	280	907.100.960	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan	92,8	%	92		93		93		95		95		95		95		
		Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan Antenatal Care / K1	101,5	%	99		99		99		99		99		99		99		
		Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan antenatal /K4	82,8	%	83		83		85		87		88		88		88		
		Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF)	94,9	%	92		93		95		95		95		95		95		
		Persentase Ibu Hamil, Bersalin , nifas yang dapat penanganan komplikasi	94	%	94		95		95		95		95		95		95		
		Persentase Faskes yang memberikan Pelayanan KB sesuai standar	100	%	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)	78	%	78		78		80		80		80		80		80		
1 2 XX	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas	2,8		2,8	1.371.783.617	2,85	9.126.925.424	3	10.944.993.414	3	9.306.165.925	3	10.000.000.000	4	10.000.000.000	4	50.749.868.380	Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1 2 XX	Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Persentase kesehatan anak sekolah baru	95	%	95	144.271.500	96	157.567.401	97	19.620.000	98	20.000.000	99	20.000.000	100	20.000.000	100	381.458.901	Dinas Kesehatan
		Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan PKPR	4	Puskesmas	4		5		6		7		8		9		9		
		Jumlah nagari yang melaksanakan kesehatan remaja		Nagari	-		10		10		10		11		11		11		
XX	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Cakupan Jaminan Persalinan		%	100	70.683.395	100	383.394.483	100	2.924.936.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	12.079.013.878	Dinas Kesehatan
XX	Program Kesehatan Prioritas Nasional (Program Bantuan Operasional Kesehatan)	Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK	100	%	100	2.898.108.872	100	4.961.116.974	100	-	100	-	100	-	100	-	100	7.859.225.846	Dinas Kesehatan
XX	Program Kesehatan Jiwa	Kasus jiwa yang terjarang dan terbina (2,66% dari jml penddk)	10,1	%	20	86.618.750	30	47.615.250	35	27.836.000	-	-	-	-	-	-	-	162.070.000	Dinas Kesehatan
	<b>RSUD</b>																		
x 2 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.618.728.171	100	1.505.208.283	100	481.786.000	100	917.400.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	6.323.122.454	RSUD Sungai Dareh
x 2 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	144.453.900	100	244.656.800	100	458.900.000	100	742.720.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.090.730.700	RSUD Sungai Dareh
x 2 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100							100			100				
x 2 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100		100	306.602.394	100	305.115.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	310.000.000	100	1.681.717.394	RSUD Sungai Dareh
x 2 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100							100			100				
1 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					10.380.000		20.740.000		69.415.000								100.535.000	RSUD Sungai Dareh
1 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi RSUD	-	nilai	-	117.671.185		213.958.200	utama	570.000.000				paripurna	70.000.000	paripurna	971.629.385	RSUD Sungai Dareh	
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase		nilai	c	8.648.742.121	c	38.105.205.369	c	13.878.064.653	c	10.000.000.000	B	10.500.000.000	B	20.000.000.000	B	101.132.012.143	RSUD Sungai Dareh
		berfungsinya RSUD baru		persen							30		60		100			100	
1 2 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana rumah sakit	100	persen	100	464.918.500	100		100	117.200.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	942.118.500	RSUD Sungai Dareh
1 2 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang terakses BPJS	50	persen	60	180.000.000	70	180.000.000	90	348.000.000								708.000.000	RSUD Sungai Dareh
xx	Program peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD)	tingkat kemandirian keuangan BLUD RSUD (persen)	50	persen	60	18.780.219.830	65	26.369.893.281	70	28.200.000.000	75	31.335.000.000	80	35.350.000.000	85	37.850.000.000	85	177.885.113.111	RSUD Sungai Dareh
1 3	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>190.852.499.697</b>		<b>197.577.774.773</b>		<b>124.271.900.379</b>		<b>124.921.707.121</b>		<b>135.765.733.333</b>		<b>119.306.315.073</b>		<b>892.695.930.375</b>	
1 3	<b>- PEKERJAAN UMUM</b>					<b>190.852.499.697</b>		<b>197.577.774.773</b>		<b>121.972.954.729</b>		<b>123.871.707.121</b>		<b>133.465.733.333</b>		<b>116.706.315.073</b>		<b>884.446.984.725</b>	
x 3 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.348.882.489	100	1.553.526.310	100	1.723.063.100	100	4.704.928.600	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	13.330.400.499	Dinas PUPR
x 3 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	3.093.664.100	100	7.215.846.627	100	10.901.143.000	100	50.124.880.000	100	40.000.000.000	100	9.170.290.870	100	120.505.824.597	Dinas PUPR
x 3 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	7.730.000	100	6.117.000	#N/A	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	183.847.000	Dinas PUPR
x 3 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100														
1 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 KM/Jam)	86,67	persen	44,44	128.041.576.304	48	121.296.250.967	52	56.008.629.117	56	39.486.056.138	59	55.000.000.000	63	68.170.290.870	63	468.002.803.395	Dinas PUPR
		persentase jalan lengkap kabupaten		persen					12		13		14		15		15		
1 3 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya Luas daerah bebas genangan	37,5	%	7	8.644.461.220	4	6.483.460.739	4	4.123.543.000	4	2.142.200.000	4	2.250.000.000	4	2.500.000.000	4	26.143.664.959	Dinas PUPR

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjangnya jalan yang diperbaiki	96,55	%	16,67	7.989.228.819	16,67	8.338.703.969	16,67	4.805.519.800	16,67	4.065.733.333	16,67	4.065.733.333	16,67	4.065.733.333	17	33.330.652.588	Dinas PUPR
		Persentase Jumlah Jembatan yang diperbaiki	35,87	%	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		17		
1 3 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	persentase sarana dan prasana kebinamargaan yang tersedia	100	%	100	2.068.973.132	100	5.827.250.906	100	3.557.535.000	100	4.251.196.550	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	100	20.504.955.588	Dinas PUPR
1 3 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	45	%	47,69	22.706.705.920	51,77	22.989.775.942	54,66	11.499.222.200	57,31	3.080.000.000	59,44	3.000.000.000	61,58	3.000.000.000	61,58	66.275.704.062	Dinas PUPR
1 3 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.		%	0						50	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	2.100.000.000	Dinas PUPR
1 3 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas cadangan air yang terkonversi		ha									300.000.000		750.000.000		1.050.000.000	Dinas PUPR	
1 3 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Pelayanan Air Minum	38	%	45	4.019.875.913	65	8.357.372.532	85	15.207.255.600	100	6.000.000.000	100	10.200.000.000	100	10.400.000.000	100	54.184.504.045	Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	54	%	56		60		80		100		100		100		100		
xx	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		%		878.883.650		894.843.498			20		20		20		20	1.773.727.148	Dinas PUPR
xx	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	persentase tagihan PJU terbayarkan dan terpelihara	100	%	100		100	5.613.567.883	100	6.636.606.412	100	4.910.112.500	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	31.160.286.795	Dinas PUPR
1 3 30	Program pengembangan infrastruktur perdesaan	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	50	%	50	12.052.518.150	55	9.001.058.400	60	7.490.437.500	65	4.356.600.000	70	6.500.000.000	75	6.500.000.000	75	45.900.614.050	Dinas PUPR
1 3	- PENATAAN RUANG									2.298.945.650		1.050.000.000		2.300.000.000		2.600.000.000		8.248.945.650	
1 3 15	Program Perencanaan Tata Ruang											500.000.000		1.250.000.000		1.550.000.000		3.300.000.000	Dinas PUPR
1 3 16	Program Pemanfaatan Ruang											50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dinas PUPR
	Program pengembangan penataan ruang	RTH yang Terbangun		lokasi			8	6.406.159.040	5	2.298.945.650	1	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	11.205.104.690	Dinas PUPR
xx	Program Perencanaan Tata Ruang Terperinci		#N/A	#N/A	#N/A														Dinas PUPR
1 4	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					2.985.853.000		7.993.123.500		7.575.263.050		4.762.261.000		5.007.905.600		5.107.905.600		33.432.311.750	
x 4 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen			100	508.696.550	100	732.457.500	100	691.236.500	100	807.856.000	100	807.856.000	100	3.548.102.550	Dinas Perkimtan
x 4 xx 2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen			100	139.835.700	100	267.997.400	100	510.665.000	100	335.379.600	100	335.379.600	100	1.589.257.300	Dinas Perkimtan
x 4 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen			100	-	100	10.000.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	47.500.000	Dinas Perkimtan
x 4 xx 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		#N/A	#N/A			100		100		100		100		100			-	Dinas Perkimtan
x 4 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen			100	9.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	52.170.000	100	52.170.000	100	143.840.000	Dinas Perkimtan
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	-	persen		99.830.000	17	185.715.400	17	1.573.237.650	16	1.508.455.500	16	1.800.000.000	17	1.900.000.000	17	7.067.238.550	Dinas Perkimtan
1 4 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh		persen	0		68,42		67,26	4.976.570.500	66,10	2.024.404.000	64,95	2.000.000.000	63,79	2.000.000.000	64	11.000.974.500	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kualitas lingkungan hunian yang sehat dan aman dilengkapi PSU		persen	0		3,85		3,85		3,85		3,85		3,85		4		
xx	Program pembangunan infrastruktur perdesaan (Perumahan)							7.149.375.850										7.149.375.850	Dinas Perkimtan
1 5	<b>BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT;</b>					6.066.972.536		5.619.788.146		5.670.193.000		5.152.437.000		6.710.000.000		6.760.000.000		35.979.390.682	
x 5 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	309.017.686	100	271.562.583	100	394.772.000	100	3.580.281.400	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	14.555.633.669	Dinas Pol PP
x 5 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	222.902.600	100	1.372.157.813	100	562.618.000	100	400.017.600	100	450.000.000	100	500.000.000	100	3.507.696.013	Dinas Pol PP
x 5 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	-	100	-	100	237.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	987.000.000	Dinas Pol PP
x 5 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	-	100	-	100	65.506.000	100	94.006.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	319.512.000	Dinas Pol PP
1 5 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Wilayah yang meningkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	52	Nagari	52	931.020.500	52	2.084.881.250	52	2.335.705.500	52	505.685.000	52	600.000.000	52	600.000.000	52	7.057.292.250	Dinas Pol PP

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 5 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Kecamatan	1	31.812.000	1	31.300.000	1	28.103.500	1	99.109.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	350.324.500	Dinas Pol PP
xx	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tertangulangnya bahaya kebakaran di Kab. Dharmasraya		persen	100	2.886.023.000	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	2.886.023.000	Dinas Pol PP	
xx	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Kasus pekat yang tertangani				1.686.196.750		1.859.886.500		2.046.488.000	18	223.338.000	12	250.000.000		250.000.000	-	6.315.909.250	Dinas Pol PP
1 6	<b>BIDANG SOSIAL</b>					<b>1.413.720.023</b>		<b>1.952.145.658</b>		<b>1.885.384.350</b>		<b>2.050.966.800</b>		<b>2.332.000.000</b>		<b>2.369.500.000</b>		<b>12.003.716.831</b>	
x 6 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	446.341.750	100	753.061.294	100	857.856.800	100	938.933.800	100	1.042.000.000	100	1.079.500.000	100	5.117.693.644	Dinas SOSP3APPKB
x 6 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	98.250.473	100	272.619.484	100	260.766.800	100	292.510.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.624.146.757	Dinas SOSP3APPKB
x 6 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	Dinas SOSP3APPKB
x 6 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	-	100	4.350.000	100	18.053.000	100	28.050.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	110.453.000	Dinas SOSP3APPKB
1 6 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	9539	Jiwa	9.539	649.203.700	9.539	499.283.580	9.539	282.952.500	9.539	310.000.500	9.539	350.000.000	9.539	350.000.000	9.539	2.441.440.280	Dinas SOSP3APPKB
1 6 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial	0	Orang	70	102.688.900	70	177.648.950	70	211.532.500	70	364.316.500	70	400.000.000	70	400.000.000	70	1.656.186.850	Dinas SOSP3APPKB
1 6 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	2	Panti	3	-	2	25.259.200	2	20.497.500	2	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	105.756.700	Dinas SOSP3APPKB
1 6 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah orsos yang diberdayakan	0	Lembaga Sosial	5	117.235.200	5	116.307.200	5	20.000.000	5	40.321.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	393.863.400	Dinas SOSP3APPKB
xx	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan	300	Anak	350	-	450	103.615.950	600	135.465.250	650	76.835.000	675	80.000.000	675	80.000.000	675	475.916.200	Dinas SOSP3APPKB
xx	Program pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat melalui program keluarga harapan					-		-		78.260.000		-		-		-	-	78.260.000	Dinas SOSP3APPKB
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>24.390.763.613</b>		<b>24.553.915.622</b>		<b>29.598.699.019</b>		<b>30.428.686.600</b>		<b>33.928.621.575</b>		<b>38.257.925.591</b>		<b>181.158.612.020</b>	
2 1	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>160.087.000</b>		<b>564.486.115</b>		<b>1.449.139.225</b>		<b>1.483.771.850</b>		<b>1.540.000.000</b>		<b>1.540.000.000</b>		<b>6.737.484.190</b>	
2 1 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase partisipasi angkatan kerja	65,88	persen	65,98	17.902.850	67	369.679.625	67	253.045.225	67	164.703.850	68	200.000.000	77	200.000.000	77	1.205.331.550	Dinas Nakertrans
2 1 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	persentase tenaga kerja yang tersalurkan	100	persen	100	58.583.050	100	146.334.990	100	111.634.000	100	333.227.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.349.779.040	Dinas Nakertrans
2 1 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase lembaga ketenaga kerjaan yang terlindungi	6,73	persen	8,33	83.601.100	9	48.471.500	9	34.460.000	10	85.841.000	10	90.000.000	11	90.000.000	11	432.373.600	Dinas Nakertrans
2 1 xx	Program pengembangan dan perluasan tenaga kerja	persentase pengangguran terbuka	3,51	persen	3,24	-	3	-	3	1.050.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	3.750.000.000	Dinas Nakertrans
2 2	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK</b>					<b>475.960.000</b>		<b>633.206.583</b>		<b>581.630.000</b>		<b>374.000.000</b>		<b>525.000.000</b>		<b>530.000.000</b>		<b>3.119.796.583</b>	
2 2 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	0	Jenis Program	3	95.960.000	3	110.276.300	3	95.960.000	3	61.110.000	3	65.000.000	3	70.000.000	3	498.306.300	Dinas SOSP3APPKB
2 2 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah OPD yang telah disosialisasikan	0	OPD	-	-	6	112.651.350	6	105.670.000	6	62.890.000	8	70.000.000	10	75.000.000	10	426.211.350	Dinas SOSP3APPKB
2 2 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengadilan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	0	Kasus	19	72.531.975	17	-	13	-	10	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	222.531.975	Dinas SOSP3APPKB
2 2 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	50	persen	50	380.000.000	60	337.746.958	65	380.000.000	70	250.000.000	80	380.000.000	95	380.000.000	95	2.107.746.958	Dinas SOSP3APPKB

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 3	<b>BIDANG PANGAN</b>					1.513.012.310	1.329.086.611	1.682.543.700	1.863.588.000	1.400.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	9.388.230.621					
x 3 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	685.663.229	573.991.407	598.680.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100	3.658.334.636	Dinas Pangan dan perikanan			
x 3 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	242.464.546	170.227.588	195.700.000	263.588.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100	1.471.980.134	Dinas Pangan dan perikanan			
2 3 xx	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan/cadangan pangan daerah dan kemandirian pangan pada Desa/Nagari		persen		584.884.535	584.867.616	888.163.700	629	1.000.000.000	679	500.000.000	729	700.000.000	729	4.257.915.851	Dinas Pangan dan perikanan		
2 4	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>					-	37.268.550	185.000.000	213.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	865.268.550						
2 4 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset pmda untuk pembangunan daerah		120 sertifikat		-	37.268.550	95.000.000	25	130.000.000	25	125.000.000	25	125.000.000	220	512.268.550	Dinas Perkimtan		
2 4 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Peningkatan ketersediaan tanah untuk pembangunan				-		90.000.000	2	83.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	10	353.000.000	Dinas Perkimtan		
2 6	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					2.126.470.336	1.964.000.595	3.805.149.750	2.891.651.000	2.853.228.700	3.008.228.700	16.648.729.081							
x 6 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	589.000.734	736.707.349	675.011.050	848.228.700	848.228.700	848.228.700	848.228.700	100	4.545.405.233	Dinas Lingkungan Hidup				
x 6 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	94.446.117	90.154.500	88.200.200	118.086.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	690.886.817	Dinas Lingkungan Hidup				
x 6 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	37.251.035	48.897.726	33.627.000	29.100.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	208.875.761	Dinas Lingkungan Hidup				
2 6 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Jumlah kelompok peduli sampah				363.253.430	191.667.868	2.125.127.000	22 Klp	386.364.100	27 Klp	400.000.000	33 Klp	400.000.000	33 Klp	3.866.412.398	Dinas Lingkungan Hidup		
		- Porsentase timbulan sampah yang tertangani							0		0		0		0	-	Dinas Lingkungan Hidup		
2 6 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	10		18,70%	560.117.843	0	415.456.120	0	461.271.650	0	366.989.700	0	450.000.000	0	500.000.000	0	2.753.835.313	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Jumlah jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang mengurus Izin Lingkungan	10		24 Usaha dan/ atau Kegiatan		20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan	20 Usaha dan/ atau Kegiatan		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Persentase Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan			60%		1		1		1		1		1		-	Dinas Lingkungan Hidup	
2 6 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan perlindungan LH dan Konservasi terhadap SDA yang ada di Kab. Dharmasraya				77.502.476	143.710.500	87.275.900	979.006.500	600.000.000	650.000.000		2.537.495.376						
2 6 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Jumlah lahan kritis yang terinventarisasi di Kabupaten Dharmasraya				33.319.900	-	-	100 Ha	-	-	-	33.319.900						
		Porsentase menurunnya lahan kritis							0							-	Dinas Lingkungan Hidup		
2 6 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen baku mutu lingkungan	14		1 Dok	287.048.551	1 Dok	337.406.532	1 Dok	133.950.100	1 Dok	136.468.500	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	1.244.873.683	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen informasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	2 dok		4 Dok		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok		-	Dinas Lingkungan Hidup	
2 6 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi air (IPA/ Indeks Pencemaran Air)				84.530.250	-	8.046.250	1	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	147.576.500		Dinas Lingkungan Hidup	
		Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi udara (IPU/ Indeks Polusi Udara)							1		1		1		1		-	Dinas Lingkungan Hidup	
2 6 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah RTH yang ekologis				-		192.640.600	2 Unit	27.407.500	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	620.048.100	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 6	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					1.151.160.598	2.533.769.733	3.515.513.500	3.835.164.000	3.851.644.150	4.151.644.150	4.151.644.150	4.151.644.150	19.038.896.131			
x 6 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	545.862.888	549.443.682	561.989.800	681.644.150	681.644.150	681.644.150	681.644.150	681.644.150	3.702.228.820	Dinas Dukcapil		
x 6 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	95.868.400	406.039.700	319.175.200	383.125.600	400.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.054.208.900	Dinas Dukcapil		
x 6 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100									-	Dinas Dukcapil		
x 6 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	18.598.166	29.208.866	9.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	111.807.032	Dinas Dukcapil		
2 6 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					490.831.144	1.549.077.485	2.625.348.500	2.755.394.250	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	13.170.651.379	Dinas Dukcapil		
2 7	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;</b>					2.639.044.950	3.091.537.543	2.943.068.650	3.032.185.000	4.248.790.150	4.348.790.150	4.348.790.150	4.348.790.150	20.303.416.443			
x 7 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	841.529.350	609.143.826	841.529.350	842.372.700	926.820.750	926.820.750	926.820.750	926.820.750	4.988.216.726	Dinas PMD		
x 7 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	-	192.726.718	304.023.700	161.240.200	299.510.400	299.510.400	299.510.400	299.510.400	1.257.011.418	Dinas PMD		
x 7 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	20.000.000	7.820.000	20.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	112.820.000	Dinas PMD		
2 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan peran pemberdayaan Masyarakat				844.062.400	1.283.267.536	844.062.400	907.167.750	1.647.459.000	1.647.459.000	1.647.459.000	1.647.459.000	7.173.478.086	Dinas PMD		
2 7 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Peran Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan				181.456.000	102.346.163	181.456.000	146.524.500	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.011.782.663	Dinas PMD		
2 7 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur Lembaga kemasyarakatan dan Nagari yang terampil				61.368.000	150.495.650	61.368.000	14.115.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	537.346.650	Dinas PMD		
xx	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					665.565.200	694.304.350	665.565.200	821.479.850	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	4.646.914.600	Dinas PMD		
xx	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah pelestarianadat dan budaya yang dikembangkan				25.064.000	51.433.300	25.064.000	124.285.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	575.846.300	Dinas PMD		
2 8	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;</b>					1.968.272.200	2.063.890.520	3.968.390.000	3.189.244.200	3.970.400.000	3.068.500.000	3.068.500.000	3.068.500.000	18.228.696.920			
2 8 15	Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR)	84		70,62	1.919.740.700	1.994.513.270	3.968.390.000	3.147.721.700	3.910.400.000	2.998.500.000	2.998.500.000	2.998.500.000	17.939.265.670	Dinas SOSP3APPKB		
2 8 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M				48.531.500	57.825.000	-	45	41.522.500	60.000.000	70.000.000	70.000.000	277.879.000	Dinas SOSP3APPKB		
2 8 17	Program pelayanan kontrasepsi	angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need)	6380		4340	9.572.250	1.985	1.824	1.795	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.572.250	Dinas SOSP3APPKB		
2 8 19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah kelompok yang telah mendapatkan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat tentang program KB / KS				1.980.000			280	300	335	335	335	1.980.000	Dinas SOSP3APPKB		
2 9	<b>BIDANG PERHUBUNGAN;</b>					1.950.839.396	1.410.551.364	2.555.540.000	2.593.322.000	2.900.500.000	3.298.650.000	3.298.650.000	3.298.650.000	14.709.402.760			
2 9 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	942.551.096	557.575.414	960.142.700	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.460.269.210	Dinas Perhubungan		
2 9 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	102.664.100	102.373.400	330.059.800	449.036.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	2.034.133.300	Dinas Perhubungan		
2 9 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	27.510.200	14.235.600	44.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	220.745.800	Dinas Perhubungan		
2 9 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					-		204.597.500	27.230.000					231.827.500	Dinas Perhubungan		
2 9 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	jumlah angkutan darat				258.960.000	465.841.550	626.240.000	10.000	860.850.000	11.000	905.500.000	12.000	1.203.650.000	12.000	4.321.041.550	Dinas Perhubungan
2 9 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah jenis pembangunan sarana da prasarana perhubungan				200.207.000		172.750.000	4	106.156.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	1.029.113.000	Dinas Perhubungan
2 9 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	jumlah berkurangnya kecelakaan di kabupaten dharmastraya				418.947.000	270.525.400	217.750.000	35	105.050.000	30	200.000.000	25	200.000.000	25	1.412.272.400	Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 10	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;</b>					63.212.350		2.469.391.177		1.992.050.800		2.150.568.800		2.279.136.300		2.394.136.300	-	11.348.495.727	
x 10 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen			100	514.375.000	100	1.084.046.000	100	1.049.136.300	100	1.049.136.300	100	1.049.136.300	100	4.745.829.900	Dinas Kominfo
x 10 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen			100	193.153.125	100	130.524.800	100	139.314.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	772.991.925	Dinas Kominfo
x 10 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen			100	24.511.400	100	21.172.450	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	120.683.850	Dinas Kominfo
2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					63.212.350		947.468.223		529.420.700		600.000.000		650.000.000		700.000.000	-	3.490.101.273	Dinas Kominfo
2 10 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					-		188.067.100		57.779.800		95.453.500		100.000.000		125.000.000	-	566.300.400	Dinas Kominfo
2 10 18	Program kerjasama informasi dan media massa					-		368.407.329		41.450.750		96.665.000		130.000.000		130.000.000	-	766.523.079	Dinas Kominfo
2 10 xx	program peningkatan kualitas pelayanan informasi					-		233.409.000		127.656.300		150.000.000		175.000.000		200.000.000	-	886.065.300	Dinas Kominfo
2 11	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH;</b>					1.362.943.330		1.095.682.097		1.213.714.500		1.317.282.000		1.522.760.775		1.733.674.891	-	8.246.057.593	
2 11 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	569.501.200	100	697.921.416	100	708.984.500	100	804.525.500	100	931.912.850	100	1.071.699.778	100	4.784.545.244	Dinas Kumperdag
2 11 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	132.662.400	100	176.595.200	100	222.504.000	100	288.068.000	100	340.847.925	100	391.975.114	100	1.552.652.639	Dinas Kumperdag
2 11 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	25.054.200	100	45.909.200	100	27.823.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	188.786.400	Dinas Kumperdag
2 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					152.250.150											-	152.250.150	Dinas Kumperdag
2 11 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					131.906.102											-	131.906.102	Dinas Kumperdag
2 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Penguatan Kelembagaan)	Persentase koperasi aktif		persen	49	171.313.650	50	30.628.650	60	81.662.000	70	44.045.000	80	55.000.000	90	60.000.000	90	442.649.300	Dinas Kumperdag
		Jumlah koperasi sehat		unit	6		7		11		15		19		24		24		
	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas		unit	10	-	15	144.627.631	20	172.741.000	25	155.643.500	30	165.000.000	35	175.000.000	35	813.012.131	Dinas Kumperdag
2 11 xx	Program Pengembangan Data/Informasi					180.255.628											-	180.255.628	Dinas Kumperdag
2 12	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL;</b>					1.710.518.308		1.114.624.510		862.971.950		1.591.636.650		2.207.811.500		5.634.092.650	-	13.121.655.568	
2 12 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	744.382.708	100	565.169.447	100	419.259.250	100	785.083.200	100	850.000.000	100	900.000.000	100	4.263.894.605	Dinas Penanaman Modal
2 12 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	436.630.300	100	75.265.900	100	68.392.000	100	150.092.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	1.155.380.200	Dinas Penanaman Modal
2 12 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	11.700.000	100	-	100		100		100		100		100	11.700.000	Dinas Penanaman Modal
2 12 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	2.718.300	100	12.588.000	100	10.820.000	100	21.140.000	100	21.961.500	100	24.157.650	100	93.385.450	Dinas Penanaman Modal
2 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah perusahaan yang berinvestasi		unit	51	149.806.600	55	178.546.887	59	125.229.800	65	331.215.450	72	350.000.000	80	3.650.000.000	80	4.784.798.737	Dinas Penanaman Modal
2 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi Investasi		rp juta	156.805.000	61.459.700	163.766.000	36.634.400	167.035.200	170.375.904	-	173.783.422	465.850.000	177.259.091	512.435.000	177.259.091	1.076.379.100	Dinas Penanaman Modal	
xx	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)		hari	15	289.537.300	14	229.922.976	14	219.698.400	14	290.006.500	14	300.000.000	14	300.000.000	14	1.629.165.176	Dinas Penanaman Modal
2 12 xx	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan		aduan	0	14.283.400	3	16.496.900	1	19.572.500	3	14.099.500	3	20.000.000	3	22.500.000	3	106.952.300	Dinas Penanaman Modal

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 13	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;</b>					7.294.591.120		3.757.981.458		1.726.517.500		2.049.025.650		2.175.000.000		2.250.000.000	-	19.253.115.728		
2 13 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	- Meningkatkan pelayanan kepemudaan				841.583.000		688.532.300		713.392.500		0	730.829.000	0	750.000.000	0	750.000.000	0	4.474.336.800	Dinas Budparpora
		- Jumlah dokumen pengadaan aplikasi data base kepemudaan																		
2 13 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat				868.771.100		42.315.200		50.000.000			88.461.250		100.000.000		150.000.000		1.299.547.550	Dinas Budparpora
2 13 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	- Meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat	23			4.929.976.750		2.409.442.250	1 Perda	476.855.000	3 Perbup		718.785.400	2 Perbup	800.000.000		800.000.000		10.135.059.400	Dinas Budparpora
		Jumlah cabang olahraga yang dibina mengikuti PORPROV Sumbar				24														
2 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga				654.260.270	1	617.691.708	1	486.270.000	1	510.950.000	1	525.000.000	1	550.000.000	1	3.344.171.978	Dinas Budparpora	
2 14	<b>BIDANG STATISTIK;</b>					58.811.200		107.623.300		189.173.000		308.381.500		320.000.000		350.000.000	-	1.333.989.000		
2 14 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0	0	0	58.811.200		107.623.300		-		108.381.500		120.000.000		150.000.000		544.816.000	Dinas Kominfo	
2 14 xx	Program pengembangan statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0	0	0					189.173.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		789.173.000	Dinas Kominfo	
2 15	<b>BIDANG PERSANDIAN;</b>					-		55.642.579		129.507.250		190.915.500		130.000.000		130.000.000	-	636.065.329		
xx	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah							55.642.579		129.507.250		130.000.000		130.000.000		130.000.000		575.149.829	Dinas Kominfo	
xx	Program Persandian Daerah										60.915.500		65.000.000		65.000.000		190.915.500		190.915.500	Dinas Kominfo
2 16	<b>BIDANG KEBUDAYAAN;</b>					-		1.174.010.788		1.990.889.194		2.245.431.250		2.385.000.000		2.460.000.000	-	10.255.331.232		
2 16 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100			633.103.940	100	812.857.944	100	824.782.750	100	850.000.000	100	875.000.000		3.995.744.629	Dinas Budparpora	
2 16 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100			189.682.275	100	279.588.500	100	155.522.500	100	175.000.000	100	175.000.000		974.793.275	Dinas Budparpora	
2 16 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100			-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		40.000.000	Dinas Budparpora	
2 16 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event						126.325.000		129.067.000		143.310.000		200.000.000		200.000.000		798.702.000	Dinas Budparpora	
2 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan pengelola kekayaan budaya						32.302.350		235.142.000		242.420.000		250.000.000		300.000.000		1.059.864.350	Dinas Budparpora	
2 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)						160.294.873		343.887.500		325.640.000		350.000.000		350.000.000		1.529.822.373	Dinas Budparpora	
2 16 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya							32.302.350										32.302.350	Dinas Budparpora	
2 16 xx	Program pengembangan dan pelestarian budaya									180.346.250		543.756.000		550.000.000		550.000.000		1.824.102.250	Dinas Budparpora	
2 17	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN;</b>					1.785.708.565		994.928.249		662.914.500		760.579.200		954.350.000		1.045.208.750	-	6.203.689.264		
2 17 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	380.456.250		473.487.199	100	447.829.300	100	385.024.400	100	450.000.000	100	500.000.000	100	2.636.797.149	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 17 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	1.213.079.515		514.392.050	100	139.449.200	100	346.992.800	100	325.000.000	100	354.000.000	100	2.892.913.565	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 17 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100			4.870.000	100		100			100			100	4.870.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 17 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	49.660.700			100		100	23.600.000	100	66.125.000	100	76.000.000	100	215.385.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 17 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100			2.179.000	100		100	4.962.000	100	13.225.000	100	15.208.750	100	35.574.750	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 17 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan				142.512.100				75.636.000				100.000.000		100.000.000		418.148.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 18	<b>BIDANG KEARSIPAN.</b>					130.131.950	156.233.850	144.985.500	338.940.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	-	1.720.291.300					
2 18 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			64.200.150	92.632.600	55.696.000	131.146.000	150.000.000	150.000.000	-	643.674.750	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
2 18 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata			65.931.800	63.601.250	89.289.500	207.794.000	300.000.000	350.000.000	-	1.076.616.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>33.712.064.068</b>	<b>33.343.402.493</b>	<b>52.542.992.456</b>	<b>54.641.768.400</b>	<b>35.547.690.000</b>	<b>36.369.154.900</b>	-	<b>246.157.072.317</b>							
3 1	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;</b>				<b>2.018.515.260</b>	<b>2.276.527.407</b>	<b>2.104.711.000</b>	<b>2.683.866.000</b>	<b>2.660.000.000</b>	<b>2.750.000.000</b>	-	<b>14.493.619.667</b>							
3 1 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	549.081.613								549.081.613	Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	161.752.126								161.752.126	Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100										Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 xx 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		#N/A	#N/A	#N/A										Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	38.973.066								38.973.066	Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100										Dinas Pangan dan Perikanan				
3 1 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan					25.929.400	65.414.000	149.935.000	160.000.000	200.000.000	-	601.278.400	Dinas Pangan dan Perikanan						
3 1 20	Program pengembangan budidaya perikanan	peningkatan produksi ikan dan benih ikan yang dibangun	19199	Ton	20209	1.150.430.550	1.379.472.607	1.359.320.500	20.809	1.568.531.000	20.809	1.500.000.000	20.809	1.500.000.000	20.809	8.457.754.657	Dinas Pangan dan Perikanan		
3 1 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	meningkatkan produksi olahan perikanan				118.277.905	228.634.950	147.840.000	3.000	167.500.000	3.500	200.000.000	3.500	250.000.000	3.500	1.112.252.855	Dinas Pangan dan Perikanan		
xx	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan					642.490.450	532.136.500	797.900.000		800.000.000		800.000.000		3.572.526.950	Dinas Pangan dan Perikanan				
3 2	<b>BIDANG PARIWISATA;</b>				<b>410.657.350</b>	<b>775.618.580</b>	<b>2.456.049.556</b>	<b>2.674.126.250</b>	<b>3.215.000.000</b>	<b>3.215.000.000</b>	-	<b>12.746.451.736</b>							
3 2 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)		orang	27.294	410.657.350	36.143	665.690.636	43.371	1.206.228.956	52.045	1.311.661.250	62.454	1.500.000.000	74.944	1.500.000.000	74.944	6.594.238.192	Dinas Budparpora
3 2 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		Dinas Budparpora
3 2 17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif		unit	108		135	11.895.000	168	9.466.100	201	215.000.000	241	215.000.000	289	215.000.000	289	666.361.100	Dinas Budparpora
3 2 xx	Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	jumlah kawasan wisata yang dikembangkan		kawasan	19		21	98.032.944	23	1.240.354.500	25	1.147.465.000	27	1.500.000.000	29	1.500.000.000	29	5.485.852.444	Dinas Budparpora
		jumlah destinasi pariwisata daerah		kawasan	30		33		35		38		40		45				
3 3	<b>BIDANG PERTANIAN;</b>				<b>17.748.372.704</b>	<b>23.679.913.978</b>	<b>20.676.836.600</b>	<b>21.168.702.500</b>	<b>21.417.690.000</b>	<b>21.511.154.900</b>	-	<b>126.202.670.682</b>							
3 3 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	710.680.906	1.735.501.662	1.958.820.000	100	1.919.745.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	10.324.747.568	Dinas Pertanian
3 3 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	553.924.650	1.288.709.098	1.492.147.200	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	7.834.780.948	Dinas Pertanian
3 3 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	46.171.030	37.697.752	80.000.000	100	100.000.000	100	107.690.000	100	118.459.000	100	118.459.000	100	490.017.782	Dinas Pertanian
3 3 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM dan Kesejahteraanpelaku utama dan pelaku usaha Tani				587.357.600	630.855.500	541.245.500		648.059.700		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.707.518.300	Dinas Pertanian
3 3 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi beras dan pangan teregister dan terpacking yang dipasarkan				533.514.600	612.325.788	533.514.600	12	521.834.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	3.301.188.988	Dinas Pertanian
3 3 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Teradopsinya teknologi pertanian Perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan lahan					282.001.850											282.001.850	Dinas Pertanian
3 3 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)				12.708.950.912	10.314.614.578	11.439.568.400	28.042	10.000.000.000	28.042	10.000.000.000	28.042	10.000.000.000	28.042	10.000.000.000	28.042	64.463.133.890	Dinas Pertanian

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 3 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat lapangan					798.481.400		1.194.178.600	327	1.160.408.500	398	1.200.000.000	1.115	1.200.000.000	1.115	5.553.068.500	Dinas Pertanian	
3 3 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				461.317.300		507.599.800		498.917.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	-	2.967.834.100	Dinas Pertanian	
3 3 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	meningkatnya produksi dan Populasi Ternak			808.119.350		1.008.098.950		1.111.220.550	20	1.200.000.000	19	1.200.000.000	19	1.200.000.000	19	6.527.438.850	Dinas Pertanian	
3 3 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan distribusi hasil peternakan			429.524.000		-			2	394.790.000	3	400.000.000	2	477.695.900	2	1.702.009.900	Dinas Pertanian	
xx	program kesehatan masyarakat veteriner	peningkatan produksi pangan yang asuh			142.724.400		83.235.850		73.481.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	-	554.441.250	Dinas Pertanian	
xx	penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan	Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian pada kawasan pertanian tanaman pangan dan Perkebunan			345.933.556		6.028.335.650		1.196.476.750	3.388	1.500.000.000	3.389	1.500.000.000	453	1.500.000.000	453	12.070.745.956	Dinas Pertanian	
xx	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara berkelanjutan	Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang dipamerkan			64.040.650		229.410.100		80.904.000	235	65.397.000	235	100.000.000	235	100.000.000	235	639.751.750	Dinas Pertanian	
xx	Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian				356.113.750		123.046.000		46.694.000		132.831.500		150.000.000		150.000.000	-	958.685.250	Dinas Pertanian	
xx	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura				-		-		100.686.000		736.988.800		750.000.000		750.000.000	-	2.337.674.800	Dinas Pertanian	
xx	Program pengembangan agribisnis pertanian				-		-		328.983.000		708.648.000		725.000.000		725.000.000	-	2.487.631.000	Dinas Pertanian	
	Program peningkatan kelembagaan petani	Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Kelembagaan Petani melalui penyuluhan dan pendampingan pada petani dan pelaku agri bisnis			124.843.000				124.843.000	36	-	36	130.000.000	36	130.000.000	36	509.686.000	Dinas Pertanian	
3 4	<b>BIDANG KEHUTANAN;</b>				<b>2.767.122.555</b>												<b>2.767.122.555</b>		
3 4 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.132.680.460											1.132.680.460	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	448.380.611											448.380.611	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		#N/A	#N/A	#N/A												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	34.191.000											34.191.000	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan	100	persen	100												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					212.992.134											212.992.134	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan					734.044.500											734.044.500	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan					204.833.850											204.833.850	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 18	Program pemanfaatan kawasan baton industri		#N/A	#N/A	#N/A												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan		#N/A	#N/A	#N/A												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 20	Program perencanaan dan pengembangan baton		#N/A	#N/A	#N/A												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 4 xx	Program dst...		#N/A	#N/A	#N/A												-	(Kewenangan Provinsi)	
3 5	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;</b>					<b>7.779.857.984</b>											<b>7.779.857.984</b>		

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3 5 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	319.696.583												-	319.696.583	(Kewenangan Provinsi)
3 5 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	89.880.050												-	89.880.050	(Kewenangan Provinsi)
3 5 15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan					46.573.300												-	46.573.300	(Kewenangan Provinsi)
3 5 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					7.284.860.201												-	7.284.860.201	(Kewenangan Provinsi)
3 5 xx	program pemetaan dan inventarisasi geologi dan SDM					35.871.100												-	35.871.100	(Kewenangan Provinsi)
xx	program pembinaan dan pengembangan bidang migas					2.976.750												-	2.976.750	(Kewenangan Provinsi)
3 6	<b>BIDANG PERDAGANGAN;</b>					<b>1.374.779.700</b>												-	<b>28.321.700.550</b>	
3 6 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Alat UTPP bertanda tera sah (unit)		unit	179	163.007.050	400	26.711.000	500	1.508.147.000	600	1.582.504.000	700	1.530.000.000	800	1.573.000.000	800	6.383.369.050	Dinas Kumperdag	
3 6 xx	Program Pengembangan Perdagangan	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu		koefisien	≤ 9 %	-	≤ 9 %	51.435.900	≤ 9 %	66.358.000	≤ 8 %	97.496.000	≤ 8 %	100.000.000	≤ 7 %	100.000.000	≤ 7 %	415.289.900	Dinas Kumperdag	
xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar dalam kondisi baik (persen)		persen	21,62 %	1.211.772.650	22,90%	4.891.919.950	23,70%	3.419.349.000	24,20%	4.000.000.000	25,40%	4.000.000.000	28	4.000.000.000	28	21.523.041.600	Dinas Kumperdag	
3 7	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN; DAN</b>					<b>1.406.102.515</b>												-	<b>48.654.679.743</b>	
3 7 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					1.066.321.250												-	1.066.321.250	Dinas Kumperdag
3 7 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)		persen	6,19%	301.239.134	11,19%	638.947.228	16,19%	21.741.463.000	21,19%	21.398.167.000	26,19%	1.475.000.000	21,19%	1.995.000.000	21,19%	47.549.816.362	Dinas Kumperdag	
3 7 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					38.542.131												-	38.542.131	Dinas Kumperdag
3 8	<b>BIDANG TRANSMIGRASI</b>					<b>206.656.000</b>												-	<b>5.190.969.400</b>	
3 8 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen				560.946.150		400.554.150		738.416.650		800.000.000		850.000.000		-	3.349.916.950	Dinas Transnaker
3 8 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen				151.916.000		108.320.000		125.220.000		150.000.000		175.000.000		-	710.456.000	Dinas Transnaker
3 8 xx 18	Program pengembangan wilayah tertinggal					206.656.000		289.466.300		61.204.150		173.270.000		200.000.000		200.000.000		-	1.130.596.450	Dinas Transnaker
<b>C</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>70.543.270.317</b>		<b>83.001.284.179</b>		<b>93.477.275.187</b>		<b>72.597.356.340</b>		<b>79.281.129.700</b>		<b>83.976.129.700</b>		-	<b>482.876.445.423</b>	
<b>4 1</b>	<b>BIDANG PERENCANAAN</b>					<b>3.421.609.380</b>		<b>4.828.880.321</b>		<b>4.388.737.500</b>		<b>5.126.481.200</b>		<b>4.860.000.000</b>		<b>6.025.000.000</b>		-	<b>28.650.708.401</b>	
4 1 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	852.298.999	100	1.121.015.798	100	1.097.275.100	100	1.361.440.400	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	7.032.030.297	Bappedda	
4 1 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	481.312.672	100	130.594.566	100	327.279.600	100	319.589.600	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.958.776.438	Bappedda	
4 1 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	40.697.200	100	68.685.200	100	102.670.400	100	51.250.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	373.302.800	Bappedda	
4 1 15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	60	persen	60	-	65	-	75	-	85	70.561.700	90	150.000.000	100	170.000.000	100	390.561.700	Bappedda	
4 1 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	75	persen	85	120.030.500	85	155.733.261	90	68.831.000	90	57.084.000	90	65.000.000	95	65.000.000	95	531.678.761	Bappedda	
4 1 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	60	persen	65	1.215.931.555	70	1.979.100.958	75	1.713.155.600	80	1.881.741.700	90	1.900.000.000	95	3.000.000.000	95	11.689.929.813	Bappedda	
4 1 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi				58.127.950		213.188.458		225.025.800		249.971.800		300.000.000		300.000.000		-	1.346.314.008	Bappedda
4 1 23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Sosial budaya				268.730.104		368.489.226		211.427.800		349.638.000		590.000.000		635.000.000		-	2.423.285.130	Bappedda
xx	Program perencanaan tata ruang wilayah	Persentase ketersediaan dokumen penataan ruang		persen		266.891.450		694.969.734		515.879.200		700.000.000						-	2.177.740.384	Bappedda
xx	Program penyediaan dan pengelolaan air baku					117.588.950		97.103.120		87.099.000		85.204.000		100.000.000		100.000.000		-	586.995.070	Bappedda
xx	Program perencanaan fisik dan prasarana					-		-		40.094.000		-		50.000.000		50.000.000		-	140.094.000	Bappedda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4 2	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																				
	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	Peningkatan penelitian dan pengembangan iptek												70	100.000.000	75	100.000.000	75	200.000.000	Bappedda	
4 3	<b>BIDANG KEUANGAN;</b>					6.214.369.777	5.935.647.404	6.448.074.845		6.385.796.940		6.570.000.000	6.570.000.000								
4 3 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.099.045.132	1.175.122.956	1.944.946.195	100	1.880.735.340	100	2.000.000.000	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	10.099.849.623	Badan Keuangan Daerah	
4 3 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	579.147.100	737.083.005	679.284.400	100	435.061.600	100	500.000.000	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	3.430.576.105	Badan Keuangan Daerah	
4 3 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	8.626.000	35.794.400	55.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	309.420.400	Badan Keuangan Daerah	
4 3 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					3.885.322.845	3.987.647.043	3.768.844.250		4.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000							23.641.814.138	Badan Keuangan Daerah
4 4	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;</b>					2.064.789.970	1.560.416.215	1.986.595.710		1.680.462.000		2.025.000.000	2.125.000.000								11.442.263.895
4 4 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	679.775.086	506.347.397	568.237.010	100	651.978.600	100	700.000.000	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.856.338.093	BKPSDM	
4 4 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	88.762.250	90.873.200	94.294.700	100	124.243.200	100	150.000.000	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	723.173.350	BKPSDM	
4 4 xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	43.657.000	290.485.710	181.062.750	100	205.252.100	100	225.000.000	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.195.457.560	BKPSDM	
4 4 28	Program Pendidikan Kedinasan	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II		org		35,71	278.910.750	39,29	119.385.412	38,46	163.489.000	39,00	170.471.250	40,00	200.000.000	42,00	200.000.000	42	1.132.256.412	BKPSDM	
		- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III				31,11		31,85		28,57		30,00		32,00		33,00					
		- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV				26,84		26,84		25,51		30,00		33,00		37,00					
4 4 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					973.684.884	553.324.496	979.512.250		528.516.850		750.000.000	750.000.000							4.535.038.480	BKPSDM
4 xx	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>					2.458.517.353	2.892.693.161	2.186.100.000		2.251.342.000		2.350.000.000	2.400.000.000								14.538.652.514
4 5 xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.009.205.895	852.680.801	727.996.000	100	679.945.400	100	750.000.000	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	4.819.828.096	Inspektorat	
4 5 xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	127.097.605	137.066.000	137.712.000	100	181.912.000	100	200.000.000	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	983.787.605	Inspektorat	
4 5 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					932.833.053	1.655.410.843	1.213.479.500		1.289.484.600		1.300.000.000	1.300.000.000							7.691.207.996	Inspektorat
4 5 21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					378.729.200	240.585.817	106.912.500		100.000.000		100.000.000	100.000.000							1.026.227.517	Inspektorat
4 5 22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					10.651.600	6.949.700													17.601.300	Inspektorat
4 xx	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					29.263.719.079	37.178.606.915	37.843.478.100		31.078.925.300		29.615.000.000	29.725.000.000								194.704.729.394
4 xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	7.411.395.755	10.194.049.145	12.374.592.516	100	10.174.780.450	100	1.300.000.000	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	42.754.817.866	Setda	
4 xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	10.639.786.954	9.623.373.677	7.487.391.034		3.360.333.000		9.000.000.000	9.000.000.000							49.110.884.665	Setda
4 xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	184.370.000	385.600.000	386.000.000		377.500.000		400.000.000	400.000.000							2.133.470.000	Setda
4 xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	208.034.600	248.943.226	463.634.550		494.813.550		500.000.000	500.000.000							2.415.425.926	Setda
4 xx	Program pengembangan dan pembinaan aparatur					-	73.278.815	110.286.800		111.364.250		120.000.000	120.000.000							534.929.865	Setda
4 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					2.075.760.833	2.752.337.869	4.316.774.000		3.543.672.600		4.500.000.000	4.500.000.000							21.688.545.302	Setda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					40.120.770			178.801.000			178.791.000			200.000.000	200.000.000		797.712.770	Setda
4	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				439.148.814			540.703.008			632.868.500			683.275.500	700.000.000	700.000.000		3.695.995.822	Setda
4	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				241.698.808			341.491.650			349.209.000			353.702.000	375.000.000	375.000.000		2.036.101.458	Setda
4	xx	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	analisis standar belanja aparatur			847.381.035			233.304.638			1.107.167.700			1.283.151.500	1.300.000.000	1.300.000.000		6.071.004.873	Setda
4	xx	program pengembangan data/ informasi	monitoring kegiatan fisik dan keuangan SKPD (APBD dan DAK) Pemda Kab. Dharmasraya			133.675.757			460.758.759			118.099.000			150.000.000	150.000.000	150.000.000		1.162.533.516	Setda
4	xx	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)			126.168.350			88.900.433			93.906.950			136.939.500	150.000.000	150.000.000		745.915.233	Setda
4	xx	program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				112.359.750			699.127.082			884.614.800			969.679.500	1.000.000.000	1.000.000.000		4.665.781.132	Setda
4	xx	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				77.991.302			-			37.958.500			-				115.949.802	Setda
4	xx	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				220.526.199			-			60.316.500			56.136.500	65.000.000	70.000.000		471.979.199	Setda
4	xx	Program Optimalisasi Lelang Terpadu				870.101.504			933.141.026			1.050.000.000			1.099.578.500	1.100.000.000	1.100.000.000		6.152.821.030	Setda
4	xx	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa				2.976.670.702			5.301.665.487			4.463.826.500			4.700.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		27.442.162.689	Setda
4	xx	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				-			701.850.483			623.979.500			474.699.000	550.000.000	600.000.000		2.950.528.983	Setda
4	xx	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat				799.643.100			1.676.876.500			1.679.916.000			1.549.062.300	1.700.000.000	1.700.000.000		9.105.497.900	Setda
4	xx	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				987.560.687			1.212.535.637			55.675.000			24.999.000	60.000.000	65.000.000		2.405.770.324	Setda
4	xx	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				104.944.500			240.362.250			105.174.750			110.474.750	120.000.000	130.000.000		810.956.250	Setda
4	xx	Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah				201.766.500			197.745.764			246.906.750			230.855.000	250.000.000	275.000.000		1.402.274.014	Setda
4	xx	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen				-			65.595.271			65.052.250			65.443.500	70.000.000	75.000.000		341.091.021	Setda
4	xx	Program Peningkatan Kehidupan Beragama				-			1.156.620.925			809.746.500			856.258.000	900.000.000	900.000.000		4.622.625.425	Setda
4	xx	Program pengembangan promosi dan kerja sama investasi				-			-			49.903.500			51.511.700	55.000.000	60.000.000		216.415.200	Setda
4	xx	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				-			10.224.500			41.206.000			41.904.200	50.000.000	55.000.000		198.334.700	Setda
4	xx	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM				-			-			50.470.500			-				50.470.500	Setda
4	xx	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>19.192.906.408</b>			<b>20.596.340.372</b>			<b>20.602.881.500</b>			<b>16.874.229.000</b>	<b>21.650.000.000</b>	<b>22.100.000.000</b>		<b>121.016.357.280</b>	
4	xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	8.290.951.134	100	2.513.373.032	100	2.913.959.500	3.003.344.000	100	3.500.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	100	23.821.627.666	Sekretariat DPRD	
4	xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan fungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	4.031.407.749	100	2.974.081.904	100	2.247.414.500	551.540.500	100	2.250.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100	14.554.444.653	Sekretariat DPRD	
4	xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	148.970.000	100	143.440.000	100	292.350.000	463.500.000	100	500.000.000	550.000.000	550.000.000	100	2.098.260.000	Sekretariat DPRD	
4	xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	23.000.000	100	58.500.000	100	376.840.500	339.720.000	100	400.000.000	450.000.000	450.000.000	100	1.648.060.500	Sekretariat DPRD	
4	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				6.698.577.525			14.906.945.436			14.772.317.000			12.516.124.500	15.000.000.000	15.000.000.000		78.893.964.461	Sekretariat DPRD
4	xx	<b>Kebencanaan/ BPBD</b>				<b>1.014.609.478</b>			<b>2.840.598.817</b>			<b>14.344.811.694</b>			<b>2.514.024.400</b>	<b>2.880.000.000</b>	<b>2.905.000.000</b>		<b>26.499.044.389</b>	
4	xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	355.729.278	100	337.655.241	100	395.571.870	720.365.000	100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100	3.809.321.389	BPBD	
4	xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan fungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	217.976.650	100	153.685.050	100	130.885.200	160.495.400	100	200.000.000	225.000.000	225.000.000	100	1.088.042.300	BPBD	
4	xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100	persen	100	88.550.000	100	11.375.000	100	15.000.000	34.500.000	100	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	249.425.000	BPBD	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4 xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	100	22.437.500	100	13.872.000	100	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	126.309.500	BPBD
4	22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					329.916.050		571.200.150		556.166.000		568.664.000		600.000.000		600.000.000		3.225.946.200	BPBD
4	xx Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana					-		1.752.811.376		13.247.188.624		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		18.000.000.000	BPBD
4	xx Program penanganan tanggap Darurat bencana					11.436.000		-		11.436.000		23.995.000		35.000.000		50.000.000		131.867.000	BPBD
4 xx	<b>BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>					<b>687.216.090</b>		<b>782.922.749</b>		<b>623.525.200</b>		<b>997.581.300</b>		<b>1.045.000.000</b>		<b>1.140.000.000</b>		<b>5.276.245.339</b>	
4 xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	270.035.540	100	330.783.502	100	280.569.250	100	439.540.550	100	450.000.000	100	500.000.000	100	2.270.928.842	Kantor Kesbangpol
4 xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100	persen	100	65.314.800	100	64.817.347	100	64.055.200	100	93.110.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	497.297.347	Kantor Kesbangpol
4	18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					116.526.750		75.253.850		25.428.750		23.940.000		30.000.000		35.000.000		306.149.350	Kantor Kesbangpol
4	20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					166.473.750		281.542.900		200.000.000		284.180.000		300.000.000		320.000.000		1.552.196.650	Kantor Kesbangpol
4	21 Program pendidikan politik masyarakat					68.865.250		30.525.150		53.472.000		156.810.750		165.000.000		175.000.000		649.673.150	Kantor Kesbangpol
4	23 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan					-		-		-		-		-		-		-	Kantor Kesbangpol
4 xx	<b>KEWILAYAHAN (KECAMATAN)</b>					<b>6.225.532.782</b>		<b>6.385.178.225</b>		<b>5.053.070.638</b>		<b>5.688.514.200</b>		<b>8.286.129.700</b>		<b>10.986.129.700</b>		<b>42.624.555.245</b>	
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	4.889.583.749	100	5.191.698.350	100	3.954.753.929	100	4.736.396.400	100	5.134.011.900	100	5.634.011.900	100	29.540.456.228	11 kecamatan
	Sungai Rumbai		100	persen	100	409.765.896	100	387.553.658	100	311.823.000	100	324.657.800	100	350.000.000	100	375.000.000	100	2.168.800.354	
	Koto Besar		100	persen	100	435.025.750	100	485.852.750	100	347.827.836	100	508.613.300	100	525.000.000	100	550.000.000	100	2.852.319.636	
	Asam Jujuhan		100	persen	100	445.098.386	100	463.667.400	100	365.477.500	100	455.769.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.780.012.286	
	Koto Baru		100	persen	100	501.788.954	100	522.919.009	100	409.706.303	100	463.478.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.947.892.266	
	Koto Salak		100	persen	100	442.500.250	100	427.608.757	100	350.898.344	100	460.665.800	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.731.673.151	
	Tiung		100	persen	100	511.583.150	100	606.157.274	100	351.311.000	100	503.757.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	3.122.808.424	
	Padang Laweh		100	persen	100	406.693.450	100	401.020.000	100	351.676.680	100	395.240.200	100	450.000.000	100	500.000.000	100	2.504.630.330	
	Sitiung		100	persen	100	453.171.979	100	485.612.915	100	347.652.500	100	357.656.600	100	400.000.000	100	450.000.000	100	2.494.093.994	
	Timpeh		100	persen	100	458.987.500	100	508.232.000	100	357.069.450	100	397.546.800	100	400.000.000	100	450.000.000	100	2.571.835.750	
	Pulau Punjung		100	persen	100	410.308.134	100	472.625.714	100	436.647.127	100	519.883.000	100	569.883.000	100	619.883.000	100	3.029.229.975	
	IX Koto		100	persen	100	414.660.300	100	430.448.873	100	324.664.189	100	339.128.900	100	389.128.900	100	439.128.900	100	2.337.160.062	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	100		100	852.321.933	100	787.306.425	100	639.629.273	100	690.875.900	100	1.240.875.900	100	1.790.875.900	100	6.001.885.331	11 kecamatan
	Sungai Rumbai		100		100	82.817.860	100	105.588.000	100	53.160.000	100	64.000.000	100	114.000.000	100	164.000.000	100	583.565.860	
	Koto Besar		100		100	73.575.900	100	33.764.800	100	-	100	61.544.500	100	111.544.500	100	161.544.500	100	441.974.200	
	Asam Jujuhan		100		100	54.404.100	100	59.929.000	100	51.812.500	100	28.665.000	100	78.665.000	100	128.665.000	100	402.140.600	
	Koto Baru		100		100	51.396.100	100	50.280.100	100	52.070.000	100	78.720.000	100	128.720.000	100	178.720.000	100	539.906.200	
	Koto Salak		100		100	45.886.400	100	87.402.400	100	41.800.000	100	48.384.000	100	98.384.000	100	148.384.000	100	470.240.800	
	Tiung		100		100	111.550.400	100	53.424.000	100	77.653.600	100	50.107.200	100	100.107.200	100	150.107.200	100	542.949.600	
	Padang Laweh		100		100	82.995.400	100	97.848.660	100	60.057.600	100	61.257.600	100	111.257.600	100	161.257.600	100	574.674.460	
	Sitiung		100		100	74.599.000	100	48.762.600	100	44.118.800	100	82.851.200	100	132.851.200	100	182.851.200	100	566.034.000	
	Timpeh		100		100	49.913.950	100	50.647.679	100	49.384.000	100	63.520.000	100	113.520.000	100	163.520.000	100	490.505.629	
	Pulau Punjung		100		100	119.048.600	100	122.564.000	100	100.942.873	100	41.111.000	100	91.111.000	100	141.111.000	100	615.888.473	
	IX Koto		100		100	106.134.223	100	77.095.186	100	108.629.900	100	110.715.400	100	160.715.400	100	210.715.400	100	774.005.509	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	100		100	314.674.800	100	165.654.000	100	340.883.636	100	105.500.000	100	655.500.000	100	1.205.500.000	100	2.787.712.436	11 kecamatan
	Sungai Rumbai		100		100	31.428.800	100	21.549.000	100	43.000.000	100	21.500.000	100	71.500.000	100	121.500.000	100	310.477.800	
	Koto Besar		100		100	35.700.000	100	35.250.000	100	31.060.000	100	69.400.000	100	119.400.000	100	310.210.000	100	310.210.000	
	Asam Jujuhan		100		100	1.945.000	100	17.980.000	100	11.400.000	100	16.500.000	100	66.500.000	100	116.500.000	100	230.825.000	
	Koto Baru		100		100	29.400.000	100	20.980.000	100	89.903.636	100	7.000.000	100	57.000.000	100	107.000.000	100	311.283.636	
	Koto Salak		100		100	55.228.000	100	-	100	10.500.000	100	18.300.000	100	68.300.000	100	118.300.000	100	270.628.000	
	Tiung		100		100	-	100	-	100	51.000.000	100	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	201.000.000	
	Padang Laweh		100		100	36.875.000	100	22.500.000	100	19.250.000	100	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	228.625.000	
	Sitiung		100		100	37.500.000	100	11.250.000	100	33.250.000	100	11.250.000	100	61.250.000	100	111.250.000	100	265.750.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Timpeh		100		100	31.300.000	100	17.830.000	100	21.000.000	100	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	220.130.000		
	Pulau Punjung		100		100	31.850.000	100	-	100	-	100	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	181.850.000		
	IX Koto		100		100	23.448.000	100	18.315.000	100	30.520.000	100	11.550.000	100	61.550.000	100	111.550.000	100	256.933.000		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100		100	10.461.000	100	10.079.300	100	9.250.000	100	27.250.000	100	577.250.000	100	1.127.250.000	100	1.761.540.300	11 kecamatan	
	Sungai Rumbai		100		100	5.961.000	100	2.760.000	100		100	3.000.000	100	53.000.000	100	103.000.000	100	167.721.000		
	Koto Besar		100		100	-	100	-	100	250.000	100	250.000	100	50.250.000	100	100.250.000	100	151.000.000		
	Asam Jujuhan		100		100	4.500.000	100	7.319.300	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	161.819.300		
	Koto Baru		100		100	-	100	-	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000		
	Koto Salak		100		100	-	100	-	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000		
	Tiumang		100		100	-	100	-	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000		
	Padang Laweh		100		100	-	100	-	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000		
	Sitiung		100		100	-	100	-	100		100	5.000.000	100	55.000.000	100	105.000.000	100	165.000.000		
	Timpeh		100		100	-	100	-	100		100	10.000.000	100	60.000.000	100	110.000.000	100	180.000.000		
	Pulau Punjung		100		100	-	100	-	100	9.000.000	100	9.000.000	100	59.000.000	100	109.000.000	100	186.000.000		
	IX Koto		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (tahun 2016 hingga tahun 2019)		100		100	158.491.300	100	230.440.150	100	108.553.800	100	128.491.900			100		100	2.532.960.950	11 kecamatan	
	Program Koordinasi kecamatan (tahun 2020 dan tahun 2021)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	100		100		100		100		100		100	678.491.900	100	1.228.491.900	100	173.940.000		
		Jumlah Daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD	100		100		100		100		100		100		100		100			
		persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100		100		100		100		100		100		100		100			
		persentase verifikasi dana desa/nagari yang dilaksanakan kecamatan melalui Siskeudes	100		100		100		100		100		100		100		100			
	Sungai Rumbai		100		100	17.609.500	100	18.439.200	100	11.120.000	100	11.970.000	100	61.970.000	100	111.970.000	100	233.078.700		
	Koto Besar		100		100	16.695.200	100	17.891.250	100	6.359.500	100	5.000.000	100	55.000.000	100	105.000.000	100	205.945.950		
	Asam Jujuhan		100		100	16.176.700	100	40.166.500	100	7.592.000	100	8.280.000	100	58.280.000	100	108.280.000	100	238.775.200		
	Koto Baru		100		100	16.376.150	100	16.904.050	100	6.930.000	100	9.800.000	100	59.800.000	100	109.800.000	100	219.610.200		
	Koto Salak		100		100	16.940.100	100	23.527.500	100	8.412.800	100	3.500.000	100	53.500.000	100	103.500.000	100	209.380.400		
	Tiumang		100		100	8.784.000	100	14.740.000	100	15.135.000	100	26.503.600	100	76.503.600	100	126.503.600	100	268.169.800		
	Padang Laweh		100		100	6.638.500	100	16.421.500	100	15.520.000	100	13.320.000	100	63.320.000	100	113.320.000	100	228.540.000		
	Sitiung		100		100	16.331.850	100	17.169.700	100	8.500.000	100	10.000.000	100	60.000.000	100	110.000.000	100	222.001.550		
	Timpeh		100		100	26.670.550	100	18.845.500	100	11.872.500	100	22.081.000	100	72.081.000	100	122.081.000	100	273.631.550		
	Pulau Punjung		100		100	14.489.500	100	23.485.000	100	10.970.000	100	8.113.800	100	58.113.800	100	108.113.800	100	223.285.900		
	IX Koto		100		100	1.779.250	100	22.849.950	100	6.142.000	100	9.923.500	100	59.923.500	100	109.923.500	100	210.541.700		
<b>TOTAL</b>						441.922.254.470		511.009.742.628		478.656.349.114		421.327.259.946		449.560.742.711		451.460.928.159				



































# Bab VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



# BAB VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari pelaksanaan kegiatan (*output*/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) mencakup akumulasi keluaran dan berbagai efek pembangunan.

Pengukuran kinerja pembangunan mengukur kinerja daerah secara berkelanjutan sebagai umpan balik untuk mencapai target kinerja di masa mendatang. Dengan adanya informasi terukur pencapaian kinerja maka pemerintah daerah dapat mengukur kinerjanya secara obyektif dalam periode waktu tertentu sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator hasil program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

**Tabel 8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	IPM	indeks	70,25	70,42	70,66	70,71	70,88	71,2	Bappeda
2.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,34	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00	Bappeda
3.	PDRB perkapita (juta Rp)	Rp Juta	36,78	39,17	41,65	44,10	46,83	49,67	Bappeda
4.	Indeks Gini	bobot	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	Bappeda
5.	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	70,30	70,57	70,78	71,01	71,23	71,46	Dinas Kesehatan
6.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,23	8,31	8,40	8,48	8,57	8,65	Dinas pendidikan
7.	Harapan lama sekolah	Persen	12,39	12,56	12,73	12,9	13,07	13,24	Dinas pendidikan
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,24	2,87	2,56	2,26	1,95	1,65	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,98	66,64	67,03	67,44	76,86	68,29	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		88,6	88,91	89,22	89,53	89,84	90,15	Dinas SOSP3PPKB
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		48,014	48,558	49,102	49,646	50,19	50,734	Dinas SOSP3PPKB
12	Persentase masyarakat Miskin	Persen	7.16	6,76	6,46	6,17	5,89	5,62	Dinas SOSP3PPKB
13	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	persen	44,44	47,99	51,82	55,65	59,49	63,33	Dinas PUPR
14	Rasio rumah layak huni	persen	87,59	87,88	88,17	88,45	88,73	89,00	Dinas PUPR
15	Akses Air Minum Layak	persen	14,53	16,26	19,26	22,71	26,29	30,08	Dinas PUPR
16	Akses Sanitasi Layak	persen	39,99	39,79	40,01	40,62	41,6	42,91	Dinas PUPR
17	Tanaman Pangan : produksi padi (ton)	Ton	66.555	69.883	71.000	71.500	72.000	72.500	Dinas Pertanian
18	Tanaman Pangan : produksi jagung (ton)	ton	2.424,00	2500	2600	2650	2700	2750	Dinas Pertanian
19	Perkebunan : Karet (ton)	Ton	36.135	37.763	39.391	41.019	42.647	44.275	Dinas Pertanian
20	Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat)	Ton	74020	75000	77500	78000	79000	80000	Dinas Pertanian
21	Peternakan : produksi daging (ton)	Ton	1,072.30	1,072.30	1..093,75	1,115.62	1,137.94	1,160.69	Dinas Pertanian

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22	Perikanan : produksi ikan (ton)	Ton	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	Dinas Pangan dan Perikanan
23	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	Kalori	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	Dinas Pangan dan Perikanan
24	Persentase koperasi aktif	persen	49	50	60	70	80	90	Dinas Kumperdag
25	pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)	Persen	6,19%	11,19%	16,19%	21,19%	26,19%	21,19%	Dinas Kumperdag
26	Pasar dalam kondisi baik (persen)	Persen	21,62%	22,90%	23,70%	24,20%	25,40%	28,1	Dinas Kumperdag
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,85	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	Dinas Lingkungan Hidup
28	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP/WDP/	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
29	Hasil evaluasi AKIP	nilai	C(45,67)	B(60,46)	B	B	BB	BB	Setda
30	Tingkat Kapabilitas APIP	nilai	2	2	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
31	Nilai LPPD	3,1226 (tinggi) urutan 120	3,1500 (tinggi) naik peringkat	3,2000 (tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat	3,1226 (tinggi) naik peringkat	Setda
32	persentase pencapaian target dan sasaran RKPd terhadap RPJMD	Persen	60	70	80	90	95	100	Bappeda
33	Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal)	Persen	84.64	73.43	76.56	80.02	80.03	80.19	Badan Keuangan Daerah
34	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	55,77	26,92	23,08	19,23	15,38	11,54	Dinas PMD
35	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	unit							Dinas Budparpora

**Tabel 8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021**

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Urusan pemerintahan wajib</b>							
<b>1</b>	<b>Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>							
<b>1</b>	<b>Bidang pendidikan</b>							
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,23	8,31	8,40	8,48	8,57	8,65
	Harapan lama sekolah	tahun	12,39	12,56	12,73	12,9	13,07	13,24
	APK PAUD	persen	53,09	55,06	57,08	59,06	62,06	67,07
	APK SD/MI	persen	112,43	110,12	110,07	110,03	109,98	108,61
	APK SMP/MTs	persen	82,17	78,6	81,2	82,4	83	90,93
	APM SD/MI	persen	98,23	98,35	98,5	98,65	98,7	100
	APM SMP/MTs	persen	76,19	77,88	79,5	80	80,53	78,33
	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	11,79	11,89	11,99	12,09	12,19	12,44
	Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	3,15	3,17	3,18	3,2	3,21	3,23
<b>2</b>	<b>Bidang kesehatan</b>							
<b>-</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>							
	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	70,3	70,57	70,78	71,01	71,23	71,46
	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	jiwa/100.000 kelahiran hidup	330	325	310	305	300	280

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Kematian Bayi (AKB)	jiwa/ 1000 kelahiran hidup	22	21	21	20	20	20
	Angka Kematian Balita (AKABA)	jiwa/ 1000 kelahiran hidup	30	28	25	24	23	22
	Prevalensi Gizi Buruk	persen	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
	Prevalensi stunting	persen	30	25	15	15	15	15
	Persentase Puskesmas terakreditasi	persen	13	42,86	85	100	100	100
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	persen	65	70	80	90	95	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CDR)	persen	90	95	100	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	90	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen	90	95	100	100	100	100
	cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun)	persen	85	90	100	100	100	100
	cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun)	persen	80	85	100	100	100	100
	cakupan imunisasi dasar lengkap	persen	70	75	80	80	85	85
	cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per 1.000 penduduk)	persen	80	85	100	100	100	100
-	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>							
	Akreditasi rumah sakit	bobot	Dasar		Utama			Pripurna
	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	57,54	63,29	63,3	63,35	63,4	63,45
	Average Length of Stay (AVLOS)	persen	4,7	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
	Turn Over Internal (TOI)	persen	3	3	3	3	3	3
	Bed Turn Over (BTO)	persen	40	40	40	42	44	46

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Net Death Rate (NDR)	persen	0,007	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005
	Gross Death Rate (GDR)	persen	0,03	0,025	0,025	0,024	0,023	0,023
<b>3</b>	<b>Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>							
	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/Jam)	persen	44,44	47,99	51,82	55,65	59,49	63,33
	Persentase panjang jalan lengkap kabupaten	persen	-	-	12,00	13,00	14,00	15,00
	Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan mantap	persen	65,38	69,23	73,08	76,92	80,77	84,62
	Akses Air Minum Layak	persen	14,53	16,26	19,36	22,71	26,29	30,08
	Akses Sanitasi Layak	persen	39,99	39,79	40,01	40,62	41,60	42,91
<b>4</b>	<b>Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>							
	Cakupan permukiman layak huni	persen	n/a	82,5	83,32	84,15	85	85,85
	Cakupan rumah layak huni	persen	n/a	88	89	88	89	89
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	persen	n/a	50	55	65	75	80
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	persen		50	55	65	75	80
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	persen		7	7	8	9	9
	Persentase permukiman yang tertata	persen	n/a	71	73	74	76	77
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	n/a	17	16	15	14	13
	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen		60	72	84	96	100
<b>5</b>	<b>Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>							

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Cakupan Penegakan PERDA	persen	80%	80%	80%	80%	80%	100%
	Cakupan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	288 kali
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Bidang sosial.</b>							
	Persentase masyarakat Miskin	persen	07,17	07,16	6,68	6,42	6,2	6
	Persentase PMKS yang tertangani	persen	75	88	88,06	88,62	90	93
<b>2</b>	<b>Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</b>							
<b>1</b>	<b>Bidang tenaga kerja</b>							
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	3,24	3	3	2	2	2
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	65,98	67	67	67	77	68
<b>2</b>	<b>Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>							
	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	persen	-	-	44,11	44,11	61,76	76,47
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	persen	-	-	85,71	85,71	90,47	95,23
	Menuju Kota Layak Anak (KLA)	Point	-	-	142	250	350	450
	Rasio KDRT	persen	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	-	-	0,17	0,18	0,15	0,12
	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	persen	-	-	0,14	0,2	0,14	0,12
<b>3</b>	<b>Bidang pangan</b>							
	Jumlah ketersediaan energi							
	Jumlah ketersediaan protein							

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penguatan cadangan pangan	persen	30	30	50	60	70	80
	Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan di daerah	persen	52	52	52	52	52	52
	Skor Pola Pangan dan Harapan (PPH)	persen	78,00	78,00	79,00	79,50	79,50	80,00
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	50	50	55	60	65	70
	swasembada pangan : konsumsi dan produksi beras (surplus/defisit)	persen	93	92,4	91,8	91,2	90,6	90
	swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan (surplus/defisit)	persen	25	27	35	40	45	50
	Penanganan daerah rawan pangan	persen	2	2	2	3	3	4
<b>4</b>	<b>Bidang pertanahan</b>							
	Prosentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	persen		40	43	55	70	78
	Posentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	n/a	33	40	50	67	75
<b>5</b>	<b>Bidang lingkungan hidup</b>							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	bobot	62.85	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50
	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	0,02	0,02	39	42	45	48
	Jumlah Kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	kawasan	0.22%	0.20%	1 Kawasan	0.50%	0.75%	1.00%
	Jumlah kawasan sumber daya Lahan yang harus dilindungi	kawasan	18	22	1 Kawasan	22	22	22
	Persentase menurunnya lahan kritis	persen	-	-	0,025% ( 5 Ha )	4 Ha	4 Ha	4 Ha
<b>6</b>	<b>Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>							
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	persen	96	97	98	99	100	100
	Persentase kepemilikan KTP-el	persen	92	95	97	99	99	100

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	-	-	5	40	65	70
	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	persen	75	80	82	85	90	92
	Jumlah pengurusan akta kematian	dokumen	300	350	750	1000	1000	1000
	Akurasi Data Base Kependudukan	persen	90	92	95	98	99	99
<b>7</b>	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa</b>							
	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	55,07,00	26,9	23,06	19,23	15,38	11,54
	Persentase aplikasi Sistem Informasi (Sinar) yang dimanfaatkan nagari	persen	0	50	61,54	73,08	80,77	92,31
	Persentase aplikasi profil desa yang dimanfaatkan dalam pembangunan nagari	persen	57,69	67,31	76,92	86,64	96,15	100
	Persentase BUMNag yang aktif	persen	23,08	76,92	82,69	88,46	94,23	100
	Persentase Kelompok PKK yang aktif	persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Strata Pasyandu yang aktif mandiri	persen	44,9	46,94	48,37	50,61	52,65	55,1
	Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan	persen	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>							
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,63	2,64	2,51	2,3	2,25	2,23
<b>9</b>	<b>Bidang perhubungan</b>							
	Jumlah kasus kecelakaan	kasus	91	76	61	60	59	58
	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	persen	50	50	67	81	92	100
	Persentase keterpasangan marka jalan	persen	N/A	0	1	1	68	100

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan
	Jumlah trayek	izin	1	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal	terminal	1	1	1	1	1	1
	Jumlah fasilitas parkir umum	unit	6	6	6	7	9	10
	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	akreditasi	-	-	C	B	B	B
	Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	persen	75	77	80	83	85	90
<b>10</b>	<b>Bidang komunikasi dan informatika</b>							
	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	0	32	51	73	100	100
	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	0	15	46	62	81	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	persen	0	12	21	50	77	100
	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	persen	0	54	68	81	100	100
<b>11</b>	<b>Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>							
	Persentase Koperasi Aktif	persen	20	25	30	35	40	45
	Jumlah Koperasi Sehat	koperasi	5	7	15	20	25	30
	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	umkm	15	20	25	30	35	40

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>12</b>	<b>Bidang penanaman modal</b>							
	Nilai realisasi Investasi	rupiah	156.805.000	163.766.000	167.035.200	170.375.904	173.783.422	173.783.422
	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	perusahaan	51	55	59	65	72	72
	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)	hari	15	14	14	14	14	14
<b>13</b>	<b>Bidang kepemudaan dan olah raga</b>							
	Persentase kelompok olahraga yang aktif	persen	88					
	jumlah cabang olahraga yang dibina	cabang olahraga						33
	peringkat dalam Porprov	rangking	18	-	15	-	sepuluh besar	
	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali	cabang olahraga		-		-		
	persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	10	13	16	20	25	40
<b>14</b>	<b>Bidang statistik</b>							
	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	persen	0	75	80	85	90	100
<b>15</b>	<b>Bidang persandian</b>							
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	persen	0	-	-	15	50	100
<b>16</b>	<b>Bidang kebudayaan</b>							
	Jumlah event budaya yang dikembangkan	Unit	4	2	4	11	15	20
	tersedianya museum budaya	Unit	-	-	-	-	-	1
	Jumlah pelestarian cagar budaya	unit	50	80	152	170	180	190
	Persentase grup kesenian yang dibina	persen	6	10	13	15	20	25

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase tokoh dan pemangku adat yang dibina	persen						
<b>17</b>	<b>Bidang perpustakaan</b>							
	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan		17.136	22.447	129.500	143.450	145.325	146.425
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah	jiwa	213	324	300	350	400	450
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling	jiwa	16.923	11.882	7.000	8.250	9.000	10.000
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah	jiwa	-	10.241	121.450	134.000	135.000	135.000
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari	jiwa	-	-	350	400	425	450
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM	jiwa	-	-	400	450	500	525
	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	persen	20,22%	4,04%	7,35%	7,35%	9,19%	11,03%
<b>18</b>	<b>Bidang kearsipan.</b>							
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	8,11%	7,89%				
	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	persen	0%	1,92%	3,85%	5,77%	5,77%	5,77%
<b>3</b>	<b>Urusan pemerintahan pilihan</b>							
<b>1</b>	<b>Bidang kelautan dan perikanan</b>							
	Produksi perikanan budidaya	ton	19.565,0	20.543	21.000	23.100	24.948	26.944
	Produksi perikanan tangkap	ton	273,6	201,8	191,7	185,9	180,3	176,7
	Produksi pengolahan perikanan	ton	3,1	3,2	3,7	4,1	4,5	4,95
	Luas kolam (hektar)	ha	476	483	485	490	495	500

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>2</b>	<b>Bidang pariwisata</b>							
	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	jiwa	27.294	36.143	43.371	52.045	62.454	74.944
	jumlah destinasi pariwisata daerah	kawasan	30	33	35	38	40	45
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha	108	135	168	201	241	289
<b>3</b>	<b>Bidang pertanian</b>							
	Produksi padi	ton	59.282	58.265	58.848	59.436	60.031	60.631
	Produksi jagung	ton	2.590	10.000	15.500	15.500	16.000	16.500
	Produksi Kedelai	ton	78	80	80	80	85	90
	Produksi Duku	ton	6.661,00	6.785,10	6.727,78	6.761,42	6.795,22	6.829
	Produksi Jeruk	ton	200	200	340	350	350	365
	Produksi Cabe	ton	185	190	198	200	200	205
	Produksi Karet	ton	35.510	35.865	36.224	36.586	36.952	37.321
	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	ton	84.868	85.717	86.574	87.440	88.314	89.197
	Produksi Kakao	ton	2.719	2.746	2.774	2.801	2.829	2.858
	Produksi daging	ton	1.072	1.072	1.093,75	1.116	1.138	1.161
	produktivitas padi sawah	Ku/Ha	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5
	indeks penanaman padi sawah	kali/tahun	1,85	1,85	1,85	2,00	2	2,2
	luas panen padi	Ha	12.358	13.168	13.826	14.518	15.244	15.328
	produktivitas sawit	Kg/Ha	2,76	2,76	2,76	2,76	3,00	3,00
	produktivitas karet	Kg/Ha	0,91	0,91	0,91	1,00	1,00	1,00
	Luas sawah	Ha	6.669	6.785	6.805	6.826	6.846	6.866,89
	Luas Perkebunan sawit (kebun rakyat)	Ha	30.704,00	31.413,64	32.042	32.663	33.336,41	34.003
	Luas Perkebunan karet	Ha	38.908,50	40.974,05	41.793,53	42.629	3.481,99	44.352
	Luas perkebunan kakao	Ha	4.058	3.903	3.981	4.061	4.142	4.225
	Populasi sapi/kerbau	ekor	48.279	48.303,14	48.327,29	48.351	8.375,63	48.400

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Panjang jalan usaha tani	km	5	5	10	5	8	10
	panjang jalan produksi	km	35	50	65	80	95	110
	Kelompok tani naik kelas	kelompok	5	20	30	40	45	50
	Penumbuhan Kelembagaan Petani	kelompok	5	5	5	5	5	5
<b>4</b>	<b>Bidang kehutanan</b>							
<b>5</b>	<b>Bidang energi dan sumber daya mineral;</b>							
<b>6</b>	<b>Bidang perdagangan</b>							
	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	persen	18%	20%	22%	25%	28%	30%
	Koefisien Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	persen	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8
	Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	unit	300	400	500	600	700	800
<b>7</b>	<b>Bidang perindustrian</b>							
	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	persen	2	2	5	6	6	7
	Persentase Pertumbuhan IKM	persen	7	7	7	7	7	8
	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	ikm	10	11	21	25	30	35
<b>8</b>	<b>Bidang transmigrasi</b>							
	Terbangunnya kawasan transmigrasi	kawasan	1	1	1	1	1	1
<b>4</b>	<b>A</b>	<b>Urusan penunjang</b>						
<b>1</b>	<b>Bidang Pengawasan</b>							
	Level kapabilitas APIP	level	-	2	3	3	3	3
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)	level	-	2	3	3	3	3
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	laporan	24	24	24	24	24	24

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persen	70,00	75,00	77,00	80,00	82,00	84
	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah yang material	persen	70,00	75,00	77,00	79,00	80,00	83
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	bobot	-	-	-	60	65	67
<b>2</b>	<b>Bidang perencanaan</b>							
	Penilaian PPD	Peringkat		Peringkat 2 dari 19 kab/kota	Peringkat 3 dari 12 kabupaten	-	Nominasi provinsi	Nominasi provinsi
	Persentase kesesuaian RPJMD terhadap RPJPD	%		80	-	-	95	-
	Persentase kesesuaian RKPd terhadap RPJMD	%		80	85	90	95	100
	Persentase Kesesuaian APBD terhadap RKPd	%		80	85	90	95	100
	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	%		80	85	90	95	100
	Persentase Kesesuaian Renja PD dengan RKPd			80	85	90	95	100
	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPd	%		20	25	30	35	40
	Persentase Kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	%		80	85	90	95	100
	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan daerah	%		75	80	90	95	100
	Persentase pencapaian RKPd terhadap RPJMD	%		75	80	85	90	95
	Persentase belanja bidang Pendidikan	18	4	4	5	20	20	20
	Persentase belanja Bidang Kesehatan	13	17	16	18	10	10	10

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase belanja Infrastruktur daerah	22	26	19	15	15	25	25
	Persentase belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ke nagari/desa	-	-	5	5	10	10	10
	Persentase bantuan keuangan ke nagari (ADD)	8,01	11	12	12	10	10	10
<b>3</b>	<b>Bidang keuangan</b>							
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Rata-rata ketergantungan dana transfer	%	84,6	73,43	74,92	77,43	77,38	77,34
	Persentase perkembangan PAD	%	73,78	5	5	5	5	5
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,49	3,38	3,09	3	2,8	2,5
<b>4</b>	<b>Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>							
	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II	persen	23	27	30	37	60	83
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III	persen	24	25	26	28	64	100
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV	persen	17	17	17	19	46	72
	2. Persentase ASN yang telah melakukan uji kompetensi	persen	8	10	31	41	51	61
	1. Tersedianya data kepegawaian yang akurat	org	N/A	N/A	3489	3734	3921	4117
	2. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	persen	28	41	59	72	86	100
<b>5</b>	<b>Bidang penelitian dan pengembangan</b>							
	Jumlah pengkajian kelitbangan daerah	Kajian		-	-	-	-	1
	Jumlah fasilitasi inovasi daerah	Inovasi		-	-	-	-	1
<b>B</b>	<b>Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>							

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>6</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase pencapaian realisasi keuangan kegiatan tahunan	persen	100	100	100	100	100	100
	Nilai LPPD	skor, status, peringkat	3,1226 (sangat tinggi) urutan 120	3,1500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2000 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat
	hasil evaluasi AKIP	bobot	C (45,67)	B (60,46)	B	B	BB	BB
	Persentase Barang Subsidi yang diawasi	persen	100	100	100	100	100	100
	Nilai PPID	bobot	1	1	1	1	1	1
	Persentase tingkat Pelayanan Keprotokolan	persen	95	96	99	99	99	99
	Peringkat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi	ranking		13		sepuluh besar		sepuluh besar
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi penyusunannya	dokumen	15	15	15	15	15	15
	Jumlah penanganan perkara hukum	perkara	5	5	5	5	5	5
	Persentase pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai RUP	persen	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>							
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan	persen	75	80	80	85	90	90
	APBD yang ditetapkan menjadi Perda	persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	rekomendasi	12	14	16	16	18	20
<b>8</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>							

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase kelompok masyarakat/nagari di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	persen	2	2	4	6	7	7
	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	persen	1	1	1	1	1	1
	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	jam	1	1	1	1	1	1
	Persentase daerah pascabencana yang bisa dipulihkan	persen	6	6	6	6	6	6
<b>9</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
	Jumlah Konflik Sosial	kasus	6	7	5	7	7	7
	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat	kasus	5	5	5	5	5	5
	Rasio Pembinaan Ormas dan LSM Serta Partai Politik	persen	30	35	30	50	50	50
	Jumlah Kasus Narkoba	kasus	26	19	7	6	6	6
	Rasio Warga Negara Asing (WNA) yang di pantau	persen	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Kecamatan</b>							
	<b>Kecamatan Pulau Punjung</b>							
	<b>Kecamatan Sitiung</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		40	50	50	60	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen		100	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari		4	4	4	4	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen		237	268	280	285	300
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		3	5	10	15	20
	<b>Kecamatan Koto Baru</b>							

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Kecamatan Sungai Rumbai</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		30	50	50	60	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen		100	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari		4	4	4	4	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen		1.055	1.199	1.220	1.300	1.400
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		52	13	20	25	30
	<b>Kecamatan IX Koto</b>	-						
	<b>Kecamatan Timpeh</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		25	35	50	55	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen		100	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari		4	4	4	4	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen		1.025	1.035	1.045	1.085	1.200
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		40	15	18	22	35
	<b>Kecamatan Koto Salak</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	30	30	50	60	65	65
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen	80	80	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari	5	5	5	5	5	5

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen	-	1.055	1.199	1.220	1.300	1.400
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		52	13	20	25	30
	<b>Kecamatan Asam Jujuhan</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		30	50	50	60	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen		100	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari		5	5	5	5	5
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen		85	86	86	86	86
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		52	13	20	25	30
	<b>Kecamatan Koto Besar</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Kegiatan	316	105	110	110	110	110
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Nagari	7	7	7	7	7	7
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	Dokumen	76	80	80	82	97	86
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Kecamatan Padang Laweh</b>							
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		40	50	50	60	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	persen		100	100	100	100	100

Kode	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	nagari		4	4	4	4	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	dokumen		237	268	280	285	300
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	dokumen		3	3	4	4	4
	<b>Kecamatan Tiumang</b>	-						



# *Bab IX*

## **PENUTUP**



# BAB IX

## PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan terhadap RPJMD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016 dan tahun 2017. Dalam rangka penyempurnaan penjaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, maka hal ini menjadi tujuan agar dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambil kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini. Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan adanya peningkatan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan kewenangannya maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta dapat dijabarkan dengan baik ke dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD) yang akan disusun, serta telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui RPJM Nasional tahun 2014-2019 maupun keselarasan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

### 9.1. PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN

Bahwasanya Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana strategis Perangkat daerah (Renstra PD) dan RKPD, serta digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah pada tahun transisi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada tahun dengan periode kepemimpinan berikutnya pada tahun 2021. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh bupati dan Wakil bupati periode selanjutnya.

## 9.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021.

Setelah dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 ini disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk Perubahan Renstra PD. Selanjutnya Renstra PD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

2. Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2021.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan (RKPD). Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja PD harus konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

3. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJMD

Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 tidak hanya menggunakan pendekatan *top down*, politis, dan teknokratis tapi juga melalui pendekatan partisipatif dan *bottom up*. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan *stakeholders*, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah lainnya, serta Dunia Usaha untuk mendukung pelaksanaan RPJMD.

Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara pendapatan asli daerah sangat terbatas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Dunia Usaha juga menjadi hal strategis dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

5. RPJMD merupakan dasar pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Dengan adanya dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang memuat indikator yang jelas dan terukur, akan membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan dari penjabaran Visi dan Misi bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan melalui RPJMD ini, baik dari muatan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan maupun indikator kinerja pemerintah daerah.

**BUPATI DHARMASRAYA**

**SUTAN RISKA**